# FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM BIDANG PENDAFTARAN TANAH

(Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

# **TESIS**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister



oleh
HADI YUNTARTO
NIM. 166030111111013

# PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017

#### **HALAMAN PENGESAHAN**

#### **TESIS**

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DALAM BIDANG PENDAFTARAN TANAH
(Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Oleh: HADI YUNTARTO NIM. 166030111111013

telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 13 November 2017 dinyatakan telah memenuhi syarat

> Menyetujui Komisi Pembimbing,

<u>Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si.</u> NIP.19610202 198503 1 006 Anggota

<u>Dr. Irwan Noor, MA.</u> NIP. 19611024 198601 1 002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

<u>Dr. Irwan Noor, MA.</u> NIP. 19611024 198601 1 002

> Mengetahui, kuftas Ilmu Admir

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

#### JUDUL TESIS:

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM BIDANG PENDAFTARAN TANAH (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nama Mahasiswa : HADI YUNTARTO
NIM : 166030111111013

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Minat : Perencaaan Pembangunan Daerah

#### **KOMISI PEMBIMBING:**

Ketua : Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si.

Anggota : Dr. Irwan Noor, MA.

# TIM DOSEN PENGUJI:

Dosen Penguji 1 : Dr. Bambang Santoso Haryono, MS

Dosen Penguji 2 : Dr. Sarwono, M. Si

Tanggal Ujian : 13 November 2017

# PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

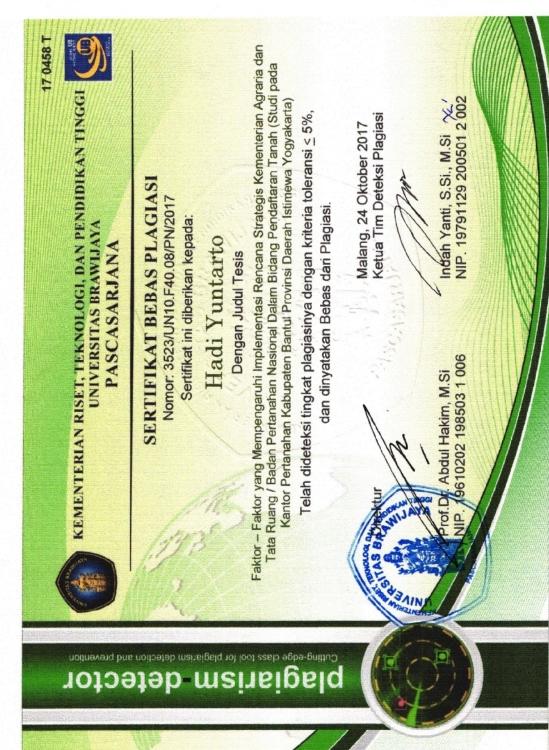
Malang, 13 November 2017

Mahasiswa.

Nama : HADI YUNTARTO NIM : 166030111111013

PS : Magister Ilmu Administrasi Publik

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Istri dan Putra Putriku tersayang.

#### **RIWAYAT HIDUP**

Hadi Yuntarto lahir di Palangkaraya pada tanggal 13 Juni 1984, putra dari ayah Subardo dan Ibu Lestari. Menikah dengan Diah Irfaningrum, S.Sos dan mempunyai dua orang anak : Adlina Malika Hadi (7 tahun) dan Al Khalifi Khaizuran Hadi (2 tahun).

### Riwayat Pendidikan:

Pendidikan SD N Panggang II Bantul 1996, SLTP N 2 Bambanglipuro Bantul 1999, SMU N 1 Bantul 2002, S1 Universitas Gadjah Mada Jurusan Teknik Geodesi, 2006.

# Riwayat Pekerjaan:

Selepas Iulus mulai tahun 2006 - 2007 bekerja *freelance* sebagai Insruktur Surveyor, Surveyor *GIS* dan Surveyor perkebunan kelapa sawit. Tahun 2007-2009 bekerja di perusahaan pertambangan batu bara di Pulau Kalimantan. Kemudian diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (2009-2010), Ialu berpindah pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (2010-2012), Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat (2012-2014) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (2014 – sekarang).

Malang,13 November 2017
Penulis,

Hadi Yuntarto

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini, dan menyampaikan terima kasih kepada:

- Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S. yang telah menerima penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya;
- Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S;
- 3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Irwan Noor, MA yang penuh dedikasi dan keterbukaan;
- Sekretaris Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya,
   Ibu Dr. Firda Hidayati, S.Sos, M.PA beserta staf akademik atas bantuan dan kemudahan administrasi pendidikan;
- Komisi Pembimbing, Bapak Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si., dan Bapak Dr.
   Irwan Noor, MA yang penulis hormati dan taati atas segala bimbingan dan saran demi keberhasilan penelitian dan penulisan tesis;
- Dosen Penguji Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS dan Bapak Dr.
   Sarwono, M.Si atas segala saran dan perbaikan dalam penyusunan tesis;
- Para dosen pada program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas segala ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat;
- Orang Tua Penulis Bapak Subardo dan Ibu Lestari, Bapak Sayono dan Ibu
   Nur Wasilatul Khasanah yang telah meridhoi dan mendoakan setiap upaya

yang penulis lakukan, istri tercinta Diah Irfaningrum yang dengan sabar

mendoakan dan mendukung penulis, putra putri tersayang ananda Adlina

Malika Hadi dan Al Khalifi Khaizuran Hadi atas doa dan kesabarannya, adik-

adik penulis Dedi astono dan Ratna Dwijayanti, Tri Puspita Sari, Yaro Arofah

dan Umi Trisnahati, Ramadhan Tri Sasongko, Yosa Daru Aksa, keponakan

Hammam, Asma serta Zaida atas doa dan dukungannya;

9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dan semua staf atas bantuan

dan partisipasinya dalam penulisan tesis ini;

10. Kepala Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan kesempatan dan

dukungan materiil dalam menempuh studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Universitas Brawijaya;

11. Rekan-rekan Tailor Made XIII yang senantiasa menjadi tempat bertukar

pikiran selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan

anugerahNya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan,

doa dan dukungan kepada penulis.

Malang, 13 November 2017

Penulis,

Hadi Yuntarto

ix

#### RINGKASAN

Hadi Yuntarto, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dalam Bidang Pendaftaran Tanah (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". Komisi Pembimbing: Ketua: Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, anggota: Dr. Irwan Noor, MA.

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya kebijakan pendaftaran tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sudah baik. Dikatakan baik karena kebijakan itu selalu menguntungkan publik (Wibawa, 1994). Manfaat dan keuntungan bagi publik dari sebuah sistem administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah yang baik ada dalam buku Land Administration Guidelines with special Reference to Countries in Transition (United Nations, 1996). Kebijakan pendaftaran tanah yang baik sudah seharusnya diikuti dengan implementasi yang baik pula. Secara empiris implementasi pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini diketahui dari pendapat sumbang dari para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul ataupun dari warga masyarakat penerima program. Rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional bidang pendaftaran tanah termuat dalam agenda prioritas (nasional) sebagai upaya pencapaian visi misi Presiden yang dapat diidentifikasi pada agenda ke 4 (empat) yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Sasaran arah kebijakan agenda ke 4 (empat) yaitu memperbesar cakupan peta dasar pertanahan dan memperbesar cakupan bidang tanah yang bersertipikat. Menurut George C Edward III (1980), Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dikategorikan sebagai kebijakan yang bersifat Centralized Policies. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, namun program pengimplementasiannya di serahkan pada masing – masing daerah. Kesulitan yang timbul dikarenakan interpretasi yang bisa jadi beragam antar daerah dan juga kesiapan daerah yang masing - masing tidak sama, sehingga pengimplementasian dan hasilnya pun bisa berbeda dari tujuan utama kebijakan tersebut. Gerald E Caiden (1982) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dapat dianggap sebagai titik lemah dari pemerintahan, sehingga ditekankan pentingnya peranan tahapan implementasi kebijakan bagi keberhasilan seluruh proses kebijakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana gambaran implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam bidang pendaftaran tanah; (2) bagaimana gambaran faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten

Bantul dalam bidang pendaftaran tanah, berdasarkan pendapat dari George C Edwards III; (3) sejauh mana pengaruh faktor – faktor tersebut dalam proses implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ekplanasi dan tipe penelitian asosiasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survai, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1989). Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan wawancara dan studi dokumen serta kepustakaan. Alat analisis yang digunakan yaitu dengan analisa jalur untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang disusun menggunakan koefesien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen exogenous terhadap variabel dependen endogenous.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa secara keseluruhan responden menilai implementasi renstra belum dilaksanakan dengan baik (ratarata 2.72). Diantara 9 (sembilan) item yang dinilai ada 2 (dua) item dengan penilaian lebih dari rata rata dan baik, yaitu terkait peningkatan jumlah cakupan bidang tanah tersertipikatkan (3.28) dan peningkatan kecepatan legalisasi aset di pedesaaan (3.95). Sedangkan sisanya 7 (tujuh) item kesemuanya dibawah rata - rata. Model struktural yang dibangun adalah Y= 0.27 X1 + 0.22 X3 + 0.94 sebagai persamaan struktural 1 dan Z= 0.23 X1 + 0.22 X2 + 0.26 Y + 0.89 sebagai persamaan struktural 2. Ada pengaruh secara parsial antara komunikasi level I dan komunikasi level III terhadap situasi dan kondisi sumberdaya yang ada, dengan pengaruh masing – masing sebesar 27 % dan 22 %. Ada pengaruh secara parsial antara variabel komunikasi level I, variabel komunikasi level II, variabel komunikasi level III dan variabel sumber daya terhadap variabel implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah sebesar berturut turut 30%, 22 %, 6% dan 26%. Ada pengaruh secara bersama sama antara variabel komunikasi level I, variabel komunikasi level II, variabel komunikasi level III dan variabel sumber daya terhadap variabel implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah sebesar 21.5 %. Variabel komunikasi secara langsung mempengaruhi implementasi renstra namun tidak pada semua level. Variabel komunikasi level I merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi implementasi renstra.

Kata Kunci: Implementasi, Rencana Strategis, Analisa Jalur

#### SUMMARY

Hadi Yuntarto, Master's Program in Public Administration, Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya, "Affecting Factors In The Implementation Of The Ministry Of Agrarian And Spatial Planning / National Land Agency Strategic Plan On Land Registration: Study In The Land Agency Office In Bantul, Yogyakarta". Supervisor: Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, Co-supervisor: Dr. Irwan Noor, MA

The government has had sufficient system and policy for land registration. The policy has always paid attention towards public interest (Wibawa,1994). Referring to Twaroch and Muggenhuber (1997) and Zevenbergen (1998), there is a relationship between land administration, land registration and cadastre. The elaboration on the benefits and advantage of sufficient land administration and land registration system for the public (United Nations, 1996). Sufficient land registration policy should be followed with qualified implementation as well.

However, the land registration policy has not been implemented properly yet in Bantul. The conclusion is drawn based on the opinion of the Land Agency Office of Bantul staffs or the public at the other end of the policy. The Strategic Plan of the Indonesia's Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency about land registration is considered as national priority (agenda) as an effort to achieve the Presidential vision/mission identified as the 4th agenda, to strengthen the country's presence in conducting system reform and honest, dignified and trustworthy law enforcement. The objective of the 4th agenda policy is to widen spatial planning-based map coverage and to increase number of certified land. Reflecting on Edward III's opinion (1980), the Strategic Plan of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency is categorized as centralized policy. It is established by the central government, but applied by regional government. Problems emerge due to various interpretations between different regional government as well as different amount of resource each regional government has. As the effect, in each region in Indonesia, the implementation and outcomes of the Strategic Plan may be different from the main objectives of the policy. Caiden (1982) argues that policy implementation may be regarded as the weakling of governance, and thus the government should emphasize on the importance of policy implementation stage for the success of the entire policy.

The objective of the study is to describe and analyze factors that influence the implementation of the Strategic Plan or policy on land registration in the Land Agency Office in Bantul, Yogyakarta.

The study used quantitative approach and questionnaire as the data collection technique. The research methodology was survey, a study taking sample from certain population using questionnaire as the primary data collection technique (Singarimbun and Effendi, 1989).

The population referred to (1) the sampling or the National Land Agency in Bantul, (2) targeted population or individuals in or staffs of the National Land Agency in Bantul. The sampling technique was probability sampling or sampling technique in which every member of population has equal chance to be selected as sample (Sugiyono, 2010). The number of sample was 88, referring to Yamane (1967).

The variables were elements affecting the implementation of the Strategic Plan, namely level I communication (X1), level II communication (X2), level III communication (X3) and resources (Z). X1, X2, and X3 were exogenous variables. Z was called intervening variable/ mediator, while Y was endogenous variable, the implementation of the Strategic Plan.

The data analysis method was trimming path analysis. Trimming means eliminating insignificant exogenous variable from its analysis, and then recalculating; the eliminated exogenous variable is no longer involved in the analysis. The steps in data analysis were as follows (1) formulating hypotheses based on the theories or literature, (2) designing Likert scale-based questionnaire, (3) asking 30 respondents to test the questionnaire, (4) conducting validity and reliability test towards the questionnaire. When the questionnaire came out as valid, the researchers decided the required size of sample and redistributed the questionnaire. Since path analysis requires interval data, Likert scale data is transformed into interval data using Successive Interval Method (SIM).

Next, the classical assumption test was conducted in which the transformed data became the object. After that, the researchers drew a complete path diagram, and formulated a structural equation. Based on each of the variables that had been formulated using regression coefficient, path coefficient was obtained. The path coefficients were tested simultaneously and partially. The last step was interpreting the results, drawing conclusions and summarizing the conclusion into a table.

Edward III (1980) stated factors affecting policy implementation, (1) communication, (2) resource, (3) disposition and (4) structure of bureaucracy. The four factors are essential criteria in policy implementation. These four factors should be carried out simultaneously because each of them is closely related to each other. In the study, Edward III's theory, communication and resource, is adopted as the factors affecting the implementation of the Strategic Plan. Furthermore, communication is divided into 3 (three), level I communication (communication between super-intendent and lower-intendent), level II communication (communication between the Land Agency Office and targeted group) and level III communication (communication between the Land Agency Office and other related institutions)

The results are Level I communication and level III have partial influence towards the resources. Their degrees of influence are 27 % and 22 % simultaneously. The X1, X2, X3 and Z variable had influence towards the Y

variable; their degrees of influence are 30%, 22 %, 6% and 26%. As the result,  $H_0$  is rejected. It means:

- H<sub>1</sub>: Level I communication has partial influence (30% influence) towards the implementation of the Strategic Plan;
- H<sub>2</sub>: Level II communication has partial influence (22% influence) towards the implementation of the Strategic Plan;
- H<sub>3</sub>: Level III communication has partial influence (6% influence) towards the implementation of the Strategic Plan;
- H<sub>4</sub>: Resource has partial influence (22% influence) towards the implementation of the Strategic Plan.

The X1, X2, X3 and Z variable has simultaneous influence towards the Y variable; their degree of influence is 21.5% and therefore, H<sub>o</sub> is rejected. It means:

H<sub>5</sub>: Level I communication, level II communication, level III communication, and resource simultaneously had influence towards the implementation of the Strategic Plan. The degree of influence is 21.5%.

Communication between the super-intendent and the lower-intendent is the most dominant variable influencing the implementation of the Strategic Plan.

Keywords: Implementation, Strategic Plan, Path Analysis.

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyajikan tulisan tesis yang berjudul: Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dalam Bidang Pendaftaran Tanah ( Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan meliputi: gambaran implementasi renstra, gambaran faktor yang mempengaruhi implementasi renstra serta seberapa besar pengaruh faktor – faktor yang dimaksud terhadap implementasi renstra.

Selama tesis ini disusun, penulis telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran. Hal tersebut tidak akan mudah apabila dilakukan penulis seorang diri tanpa kontribusi dan kerjasama berbagai pihak. Maka, sudah sepatutnyalah penulis menghaturkan terima kasih kepada pembimbing, responden, informan dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tulisan ini, terlebih kepada kedua orang tua, istri dan putra putri tercinta atas dukungannya.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak ketidaktepatan, oleh karena itu penulis mengaharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 13 November 2017 Penulis,

Hadi Yuntarto

# **DAFTAR ISI**

Ha	alaman
HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN IDENTITAS TIM PENGUJI LEMBAR ORISINALITAS TESIS SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI HALAMAN PERUNTUKAN RIWAYAT HIDUP UCAPAN TERIMA KASIH RINGKASAN SUMMARY KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN DAFTAR LAMPIRAN	vi viii viii x xii xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
BAB II. KERANGKA TEORI	20
2.1 Penelitian Terdahulu	20
2.2 Implementasi	27
2.2.1 Definisi Implementasi	27
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan	29
2.2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi	31
2.3 Perencanaan Strategis	35
2.3.1 Definisi Perencanaan	35
2.3.2 Proses Perencanaan	37
2.3.3 Rencana Strategis Kementerian / Lembaga	40
2.4 Pendaftaran Tanah	47

BAB III.	KE	RANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	53
	3.1	Kerangka Pemikiran	53
	3.2	Hipotesis	66
BAR IV	MF	ETODE PENELITIAN	69
5/(5 11)		Jenis Penelitian	
		Konsep dan Operasional Variabel Penelitian	
		4.2.1. Definisi Konseptual	
		4.2.2 Variabel Penelitian	
		4.2.3. Definisi Operasional	
	4.3	Populasi dan Sampel	
		4.3.1 Populasi	
		4.3.2 Sampel	
	4.4	Pengumpulan Data	
		Skala Pengukuran Instrumen Penelitian	
		Validitas dan Realibilitas	
	4.7	Uji Asumsi Klasik	90
		4.7.1 Uji Normalitas	91
		4.7.2 Uji Multikolinearitas	94
		4.7.3 Uji Heteroskedastisitas dan Homokedastisitas	94
		4.7.4 Uji Linearitas	97
	4.8	Lokasi Penelitian	97
	4.9	Analisis Data	98
BAB V.	НА	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	101
	5.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	101
		5.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	101
		5.1.2 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten	
		Bantul	103
	5.2	. Karakteristik Responden	109
		5.2.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	110
		5.2.2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia	111
		5.2.3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat	
		Pendidikan	112

5.2.4. Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan 113
5.3. Gambaran Faktor Komunikasi dan Sumber Daya 115
5.3.1 Komunikasi Level I (Komunikasi antara atasan dan
bawahan) 115
5.3.2 Komunikasi Level II (Komunikasi antara Kantor Pertanahan
dan Kelompok sasaran)123
5.3.3 Komunikasi Level III (Komunikasi antara Kantor Pertanahan
dan Instansi terkait)131
5.3.4 Sumber Daya138
5.3.5 Implementasi Rencana Strategis Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul Dalam Bidang Pendaftaran Tanah 150
5.4 Hubungan antara Faktor Komunikasi dan Sumberdaya terhadap
implementasi Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten
Bantul Dalam Bidang Pendaftaran Tanah161
5.5. Model struktural analisa jalur169
5.6 Pengaruh Dominan171
5.7 Perbandingan hasil penelitian dengan teori dan penelitian yang lain
174
5.8 Keterbatasan Penelitian176
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN178
6.1 Kesimpulan
6.2 Saran
0.2 0.3 0.1 0.0
DAFTAR PUSTAKA 183
AMPIRAN 188

# **DAFTAR TABEL**

Tal	bel Judul	Halaman
1.1	Hasil Pembangunan Tahun 2010 – 2014 oleh Kementerian Agrai	ria
	dan Tata Ruang / BPN	7
1.2	Arah Kebijakan Agenda ke 4 (Empat) Kementerian Agraria	
	dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	10
1.3	Perbandingan bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar	
	di Kabupaten Bantul dari tahun 1961 - 2015	11
4.1	Konsep, Variabel, Indikator dan Item	76
4.2	Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	86
4.3	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	90
4.4	Hasil Uji Normalitas dengan angka	92
4.5	Hasil Uji Multikoleniaritas	94
4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Rank	
	Spearman	95
4.7	Hasil Uji Linearitas	97
5.1	Luas Wilayah Dan Bidang Tanah Di Kabupaten Bantul	102
5.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Bantul	103
5.3	SDM Kantor Pertanahan Kab. Bantul Berdasarkan Jenis Jabatan.	106
5.4	SDM Kantor Pertanahan Kab. Bantul Berdasarkan Jenis Pendidik	an. 106
5.5	SDM Kantor Pertanahan Kab. Bantul Berdasarkan	
	Jenis Golongan PNS	107
5.6	SDM Kantor Pertanahan Kab. Bantul Berdasarkan Usia	108
5.7	SDM Kantor Pertanahan Kab. Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin.	109
5.8	Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul,	
	kondisi s/d Tahun 2020	109
5.9	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	110
5.10	Distribusi Responden Berdasarkan Usia	111
5.11	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	112
5.12	Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan	114
5.13	B Distribusi Frekuensi Responden terhadap	

	Variabel Komunikasi Level I	116
5.14	Distribusi Frekuensi Responden terhadap	
	Variabel Komunikasi Level II	124
5.15	Distribusi Frekuensi Responden terhadap	
	Variabel Komunikasi Level III	131
5.16	Distribusi Frekuensi Responden terhadap Sumber Daya	139
5.17	Distribusi Frekuensi Responden terhadap Implmentasi Renstra	151
5.18	Analisis regresi antara Komunikasi level I, Komunikasi Level II	
	dan Komunikasi level III dengan Sumber Daya	163
5.19	Analisis regresi antara Komunikasi level I dan Komunikasi level III	
	dengan Sumber Daya setelah variabel komunikasi level II	
	dihilangkan	164
5.20	Analisis regresi antara Komunikasi level I, Komunikasi Level II dan	
	Komunikasi level III dan Sumber Daya dengan Implementasi	
	Renstra	165
5.21	Analisis regresi antara Komunikasi level I, Komunikasi Level II	
	dan Sumber Daya dengan Implementasi Renstra setelah	
	variabel komunikasi level III dihilangkan	166
5.22	Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total,	
	dan pengaruh bersama variabel Komunikasi level I,	
	Komunikasi Level II ,Komunikasi level III dan Sumber Daya	
	terhadap Implementasi Renstra	168

# **DAFTAR GAMBAR**

Gan	nbar Judul Gambar	Halaman
1.1	Pendaftaran Tanah Sebagai Bagian Sistem Ekonomi Secara Luas	2
1.2	Core Entities Connected	3
2.1	Implementation as a Political and Administrative Process	. 29
2.2	Model Linier Implementasi Kebijakan	30
2.3	Bagan Alur Keterkaitan Renstra K/L dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	43
2.4	Bagan Renstra K/L bagi Kementerian	44
2.5	Mekanisme Penyusunan Renstra K/L bagi Kementerian	44
2.6	Jenis Pendaftaran Tanah	50
2.7	Pendaftaran Tanah Pertama Kali	51
2.8	Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	52
3.1	Attitude Sebagai Hasil Evaluasi	57
3.2	Sikap Sebagai Hasil Dari Proses Kognitif, Afektif dan Perilaku	58
3.3	Model Implementasi Kebijakan George C Edward III	62
3.4	Kerangka Pemikiran	63
3.5	Hipotesis Teoritis Penelitian	66
3.6	Hipotesis Statistik Penelitian	67
4.1	Hasil uji Normalitas menggunakan kurva regression residual	93
4.2	Hasil uji Normalitas dengan normal p-plot regression	93
4.3	Hasil uji Heteroskedastisitas yang menggunakan scatter plot	96
5.1	Peta administrasi Kabupaten Bantul	101
5.2	Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	105
5.3	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	110
5.4	Distribusi Responden Berdasarkan Usia	112
5.5	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	113
5.6	Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan	114
5.7	Bentuk Komunikasi Level I Berupa Apel Pagi	121
5.8	Bentuk Komunikasi Level I Via Saluran Elektonik	123

5.9	Bentuk Komunikasi Level II Berupa Sosialisasi	130
5.10	Bentuk Komunikasi Level III Berupa Sosialisasi	136
5.11	Model Komunikasi dalam Perspektif Good Governance	138
5.12	Rumusan Diagram jalur model struktural	162
5.13	Diagram jalur persamaan struktural 1	164
5.14	Diagram jalur persamaan struktural 2	166
5.15	Diagram jalur model struktural	167

#### DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

GU: Gambar Ukur, dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.

GEO-KKP: Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan, merupakan aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas/fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibangun/dikembangkan mengacu pada alur, persyaratan, waktu, biaya dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K/L : Kementerian atau Lembaga, lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Kementerian ATR / BPN : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Yaitu Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP: Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.

Renstra: Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015 - 2019, yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

RPJPN: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

SDM: Sumber Daya Manusia, individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang

memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya

SG: Sultan Ground merupakan tanah adat dimana tanah tersebut peninggalan yang dimiliki lembaga Kraton. Menurut Hamengkubuwono X (2007) yang disebut Sultan Ground adalah tanah-tanah raja dan keluarga Keraton yang terdiri atas situs, magersari dan tanah kosong serta garapan kosong

SOP: Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008).

SPPN: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, program komputer yang dipakai untuk analisis statistika dimana Sejak tanggal 28 Juli 2009, SPSS disebut sebagai PASW (Predictive Analytics SoftWare), karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM.

SU: Surat Ukur, dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

UU : Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden, sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

UUPA : Undang-Undang Pokok Agraria, Hukum yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lam	piran Judul	Halaman
1.	Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Terhadap Responden	189
2.	Rekapitulasi Data Interval (Hasil Konversi Data Original	
	ke Data Interval Dengan Metode Succesice Interval	194
3.	Kuesioner Penelitian	198
4.	Hasil Uji Validasi	205
5.	Hasil Uji Reliability	210
6.	Hasil Uji Asumsi Klasik	212
7.	Hasil Regresi Linier	217
8.	Target dan Realisasi Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan	
	Kabupaten Bantul	220

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

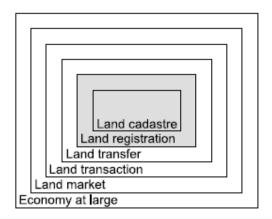
#### 1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber kehidupan, kekuasaan, dan kesejahteraan. Tanah memiliki hubungan yang kekal dengan manusia. Keberadaan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah adalah sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Karena sifatnya yang multidimensional dan sarat akan persoalan keadilan, permasalahan yang terkait dengan pertanahan seakan tidak pernah ada habisnya.

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia akan nyata apabila didukung oleh jaminan hukum hak atas tanah tersebut . Salah satu cara untuk menjamin kepastian hukum adalah dengan melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dapat di definisikan sebagai proses merekam kepentingan yang diakui secara hukum terkait kepemilikan dan atau penggunaan tanah. (McLaughlin dan Nichols, 1989). Istilah pendaftaran mengacu pada proses aktif yang didominasi hukum, di mana orang dapat melihat siapa yang seharusnya memiliki tanah. Biasanya berisi semua dokumen hukum yang relevan mengenai tanah.

Pendaftaran tanah sebagai bagian dari sistem ekonomi secara luas sangat dipengaruhi oleh keadaan kadaster tanahnya.

Gambar1.1 **Pendaftaran Tanah Sebagai Bagian Sistem Ekonomi**Secara Luas



Sumber: System of Land Registration, Aspects and Effects, Zevenbergen, J, 2002

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa apabila pendaftaran tanah kita sebut sebagai suatu sistem maka sistem ini terdiri dari sub sistem yaitu kadaster. Baik buruknya pendaftaran tanah di suatu daerah akan banyak dipengaruhi oleh kadaster tanah nya. Menurut McLaughlin dan Nichols (1989), kadaster adalah catatan resmi yang berisi informasi tentang bidang tanah, termasuk rincian batas, penguasaan, penggunaan dan nilai dari bidang tanah tersebut. Henssen dan Williamson (1990) mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai proses resmi pencatatan hak atas tanah melalui akte atau hak milik (pada properti). Ini berarti bahwa ada catatan resmi ( tanah register) hak atas tanah atau perbuatan mengenai perubahan situasi hukum dari tanah. Hal ini memberikan jawaban untuk pertanyaan "siapa" dan "bagaimana" (gambar 1.2). Sedangkan kadaster adalah metode yang secara umum digunakan untuk inventarisasi data mengenai tanah pada negara atau kabupaten, didasarkan pada survei dari batas-batas bidang tanah. Bidang tanah secara sistematis diidentifikasi dengan cara memberikan tanda pemisah. Garis - garis atau batas -

batas bidang tanah dan identifikasi bidang tanah biasanya ditampilkan pada peta skala besar yang bersama-sama dengan catatan tanah, menunjukkan untuk setiap properti yang terpisah alam, ukuran, nilai dan hak-hak hukum yang terkait dengan bidang tanah. Ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan "Mana" dan "berapa banyak" (gambar 1.2). Rekaman / catatan tanah biasanya digunakan untuk menunjukkan pendaftaran tanah dan kadaster bersama-sama sebagai suatu keseluruhan. pendaftaran tanah dan kadaster biasanya saling melengkapi dan beroperasi sebagai suatu sistem interaktif.

Owner Who?

Right (title) How?

Parcel Where? How much?

Gambar1.2 Core entities connected

Sumber: System of Land Registration, Aspects and Effects, Zevenbergen, J, 2002

Administrasi pertanahan adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan keterkaitan pendaftaran tanah dan kadaster.(Twaroch / Muggenhuber 1997 dan Zevenbergen 1998). Hal ini mencakup istilah yang lebih luas yang meliputi pendaftaran tanah, kadaster dan banyak lagi. Hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut : administrasi tanah merupakan komponen operasional kepemilikan tanah; administrasi pertanahan menyediakan mekanisme untuk mengalokasikan dan menegakkan hak dan pembatasan

mengenai tanah. fungsi administrasi tanah termasuk mengatur pengembangan lahan dan penggunaan, mengumpulkan pendapatan dari tanah (melalui penjualan, penyewaan, dan perpajakan), mengendalikan transaksi tanah, dan memberikan informasi tentang tanah. fungsi-fungsi ini dicapai, sebagian melalui pengembangan sistem tertentu yang bertanggung jawab untuk penetapan batasbatas dan organisasi spasial permukiman, pendaftaran tanah, penilaian tanah, dan informasi kegiatan manajemen.(McLaughlin dan Nichols 1989). Administrasi pertanahan juga dapat digambarkan sebagai proses dimana tanah dan informasi tentang tanah dapat dikelola secara efisien. Ini mencakup penyediaan informasi identitas orang-orang yang memiliki kepentingan dalam real estate; informasi terkait kepentingan mereka misal durasi hak, batasan dan tanggung jawab; informasi tentang bidang tanah, misalnya lokasi, ukuran, peningkatan, nilai. (MOLA, 1996). Sehingga penjelasan mengenai administrasi tanah adalah mencakup pendaftaran tanah dan kadaster dengan cara yang sebanding dengan gambar 1.1, kotak yang terkecil adalah kadaster, kemudian pendaftaran tanah dan kotak terluar adalah administrasi tanah. Sebagaimana dikutip dari buku Land Administration Guidelines with special Reference to Countries in Transition yang diterbitkan oleh United Nations tahun 1996, dampak dari sebuah sistem administrasi pertanahan yang baik diantaranya yaitu:

- (1) Kepemilikan Jaminan dan keamanan kepemilikan;
- (2) Mendukung tanah dan properti perpajakan;
- (3) Memberikan keamanan untuk kredit;
- (4) Mengembangkan dan memantau pasar tanah;
- (5) Melindungi tanah Negara;
- (6) Mengurangi sengketa tanah;

- (7) Memfasilitasi reformasi tanah;
- (8) Meningkatkan perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur;
- (9) Mendukung pengelolaan lingkungan;
- (10) Menghasilkan data statistik.

Pemerintah Republik Indonesia tahun 1960 mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang -Undang tersebut, pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum guna melindungi hak-hak pemilik tanah yang juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, jenis hak, luas tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Adapun pendaftaran akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan:

"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya".

Untuk saat ini lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran tanah adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Lembaga ini telah mengalami beberapa kali pergantian format mulai dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria hingga

fungsinya yang diemban sekarang ini. Pada periode 2015 sampai sekarang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2015. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional adalah instansi vertikal di tingkat pusat. Sedangkan untuk tingkat provinsi adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan untuk tingkat Kabupaten / Kota.

Sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peratuan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sejak dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 telah banyak bidang tanah yang didaftarkan dan disertipikatkan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini jumlah tanah yang belum tersertipikatkan masih sangat banyak, jauh dari yang diharapkan. Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, "hingga tahun 2016 jumlah lahan yang dimiliki masyarakat mencapai 100 juta bidang tanah, sementara baru 40-42 juta sertifikat yang telah diterbitkan". (bpn.go.id).

Oleh sebab itu saat ini Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional mengadakan program sertipikasi tanah secara besar besaran dengan target

sampai dengan tahun 2025 seluruh tanah di indonesia sudah terdaftar, seperti dikutip dari *website* BPN.go.id sebagai berikut :

"Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri ATR / Kepala BPN untuk mengadakan program sertifikasi tanah bagi masyarakat secara besar-besaran. Sofyan berharap hingga tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah memiliki sertifikat. "Tanah belum bersertifikat itu aset mati, jika ada sertifikatnya akan memiliki nilai lebih,"ujar Sofyan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI)"

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan untuk mensertipikasi 20 - 23 juta bidang tanah hingga tahun 2019. Hal ini berarti ada target 4-5 juta bidang tanah per tahun yang akan disertipikatkan. Padahal Kemampuan pencapaian Kementerian ATR / BPN dalam legalisasi bidang tanah di 5 (lima) tahun terakhir 2010 – 2014 adalah 1 juta bidang tanah / Tahun. Kondisi ini tentu saja akan menjadi suatu permasalahan yang harus diantisipasi.

Tabel 1.1 Hasil Pembangunan Tahun 2010 – 2014 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN

Pembangunan	Realisasi
Bidang tanah yang telah dilegalisasi	5.006.897 bidang
Peningkatan cakupan Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta	29.154.540 Ha
Potensi	
Penyelesaian Kasus Pertanahan	11.736 kasus
Bidang tanah yang telah diredistribusi Tanah	736.604 bidang
Bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah	25.665 bidang
Luas tanah terlantar yang telah diidentifikasi	2.050.088 Ha
Hak tanggungan selama tahun 2014	658,63 triliun
Jumlah persetujuan substansi RTRW :	
- Provinsi	33 provinsi
- Kabupaten	397 kabupaten
- Kota	93 kota
Jumlah peraturan daerah RTRW :	
- Provinsi	26 provinsi
- Kabupaten	326 kabupaten
- Kota	82 Kota

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, 2017

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang terkait langsung dengan pembangunan bidang pertanahan secara khusus disebutkan pada misi ke 5 (lima) yaitu mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadlian dengan poin - poin sebagai berikut :

- (1) Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif;
- (2) Melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip - prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi;
- (3) Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *landreform*, agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah;
- (4) Penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat;
- (5) Peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan;
- (6) Penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tersebut Presiden Republik Indonesia telah memberi arahan melalui visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 yang dijadikan alur seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan kementerian. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional merespon arahan Presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian agraria dan tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019. Salah satu area strategis terkait pendaftaran tanah yang potensial harus direspon dan atau ditindaklanjuti oleh Kementerian dalam lima tahun kedepan terkait dengan keberadaan agenda prioritas (nasional) sebagai upaya pencapaian visi misi Presiden dapat diidentifikasi pada agenda ke 4 (empat) yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Arah kebijakan agenda ke 4 (empat) dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Arah Kebijakan Agenda ke 4 (Empat) Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Sub Agenda	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah	Memperbesar cakupan peta dasar pertanahan	<ul> <li>Membangun system pendaftaran tanah positif</li> </ul>	Percepatan Layanan pemeliharaan Data Pertanahan Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan dan Informasi bidang Tanah Ruang dan Perairan
	Memperbesar cakupan bidang tanah yang bersertipikat		Percepatan Legalisasi Aset kususnya di Pedesaan Penyusunan Regulasi Penyelesaian Sengketa aset Milik Negara, Pengkajian penanganan Kasus Pertanahan

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten tentu saja wajib mengikuti arah kebijakan agenda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah melakukan kegiatan pendaftaran tanah sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Namun sejak tahun 1961 sampai tahun 2015, selama lebih dari 50 tahun kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul belum selesai. Berikut ini disajikan tabel perbandingan bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar di Kabupaten Bantul dari tahun 1961 – 2015.

Tabel 1.3 Perbandingan bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar di Kabupaten Bantul dari tahun 1961 - 2015

No.	Uraian	Jumlah		Jumlah	
		Bidang	%	M²	%
1.	Kabupaten Bantul	566.541	100	506.850.000	100
2.	Tanah Terdaftar				
	Hak Milik	459.108	81,04	285.113.244	56,25
	<ul><li>Hak Guna Bangunan</li></ul>	17.064	3,01	5.259.678	1,04
	Hak Pakai	3.001	0,53	8.364.498	1,65
	<ul> <li>Wakaf</li> </ul>	1.352	0,24	310.212	0,06
	<ul> <li>Hak Lainnya (HPL, Sarusun)</li> </ul>	11	0,002	2.433.413	0,48
Jumlah		480.536	84,82	301.481.045	59,48
3.	Tanah Belum Terdaftar	86.005	15,18	205.368.955	40,52

Sumber : Kementerian Agraria dan tata Ruang / Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2017

Disamping arah Kebijakan Agenda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bantul terdapat isu strategis terkait terbitnya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta yang menyatakan :

(a) Dalam Pasal 32, ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan / Kadipaten dan berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk

- sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (b) Pasal 33 Hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten didaftarkan pada lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pengelolaan serta pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan ijin persetujuan Kasultanan maupun Kadipaten;
- (c) Pasal 35 pengelolaan dan pemanfatan tanah Kasultanan dan Kadipaten diatur dalam Peraturan Daerah D.I.Yogyakarta (Perdais).

Dalam implementasinya di Kabupaten Bantul ada perbedaan data administrasi di Peta dan leger desa dengan kenyataan penguasaan dan pemilikan fisik dilapangan, yaitu di peta dan leger desa masih tetap atas nama SG/PD/RVO/sejenisnya (katagori masuk SG), tetapi dilapang pada waktu pemerintahan yang lampau sudah diterbitkan sertipikat hak atas tanah, baik atas nama perorangan maupun subyek yang lain, dengan sertipikat Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, bahkan Hak Milik. Dengan adanya isu strategis tersebut maka, untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul arah Kebijakan Agenda ditambahkan dengan sasaran memperbesar cakupan bidang tanah bersertipikat milik Keraton.

Pada dasarnya kebijakan pendaftaran tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sudah baik. Dikatakan baik karena kebijakan publik itu selalu bermanfaat dan atau menguntungkan publik. (Wibawa, 1994). Mengacu pada pendapat Twaroch / Muggenhuber 1997 dan Zevenbergen 1998 bahwa ada keterkaitan yang erat antara administrasi pertanahan, pendaftaran tanah dan kadaster. Manfaat / keuntungan bagi publik dari sebuah sistem administrasi

pertanahan dan pendaftaran tanah yang baik telah penulis uraikan pada penjelasan diatas. Kebijakan pendaftaran tanah yang baik sudah seharusnya diikuti dengan implementasi yang baik juga. Berdasarkan pengamatan penulis, secara empiris implementasi pendaftaran tanah belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini diketahui dari pendapat para pegawai Kementerian Agaria dan Tata Ruang / Badan Pertanahanan Nasional ataupun dari warga masyarakat penerima program. Seperti diungkapkan oleh salah seorang warga di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

"Sawah kae le, tak melokke pemutihan,tapi ra sesuai karo luase, ketoke kok ra teliti ngono" (sawah itu, saya ikutkan program prona, namun luas disertipikat tidak sesuai dengan luas sebenarnya, sepertinya tidak teliti dalam mengerjakannya)(wawancara tgl 5 Juni 2017).

Adapun dari pihak pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sendiri ada yang berpendapat sebagimana petikan berikut ini:

"Banyak kesulitan kita didalam melakukan pendaftaran tanah, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pensertipikatan tersebut, karena kebijakan ini dipantau langsung dari pusat, maka temen - temen di daerah melakukan segala upaya dalam menyukseskan kebijakan tersebut, sehingga di dalam pelaksanaanya terkadang banyak kekurangan di sana sini. Namun kita selalu berusaha meningkatkan kualitas pelaksanaan pendaftaran tanah mas".)(wawancara tgl 5 Juni 2017).

Harsono melakukan penelitian tahun 2009 dengan judul, "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara". (Harsono, 2009). Penulis membatasi dan memfokuskan variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi berdasarkan teori dan pendapat dari Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu pada faktor komunikasi, sumber daya dan sikap. Variabel ini juga sama dengan 3 (tiga)

variabel yang berpengaruh terhadap implementasi menurut Edward III (1980). Fenomena - fenomena Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional dilihat gejala - gejala dari dasar hukum dan kualitas pelayanan Komunikasi, fenomena komunikasi dan sumber daya. Dari hasil penelitian menunjukkan masih diperlukannya pensertifikasi tanah secara terartur, tertib, atau prosedural sesuai dengan standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan. Dalam menyelesaikan persoalan pertanahan atau sengketa pertanahan sudah sesuai dengan aturan yang ada, Kantor pertanahan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas - tugas pembangunan telah merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Mengenai Kualitas Pelayanan, masih adanya permasalahan - permasalahan dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat dalam pelayanan serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Dilihat dari fenomena komunikasi menunjukkan bahwa para pegawai mengetahui dan memahami dan mengetahui secara baik tentang Kebijakan SIMTANAS. Adanya Permasalahan khususnya Jobs Description masing-masing petugas, belum tersedianya dukungan finansial secara khusus yang dialokasikan untuk mendukung SIMTANAS, masih diperlukannya peningkatan tingkat pemahaman dan ketrampilan petugas. Sedangkan dilihat dari fenomena sikap, menunjukkan bahwa sikap para pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sangat mendukung kebijakan SIMTANAS, serta masih diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Sedangkan pada tahun 2005 M Thoriq telah lebih dahulu melakukan penelitian, "faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik pada prona swadaya di Kabupaten Semarang". (Thorig, 2005). Thorig menggunakan teori Edward III dalam menganalisa faktor-faktor yang dimaksud dan seberapa besar pengaruh faktor itu terhadap pelaksanaan pensertifikasian tanah melalui program Prona Swadaya. Namun ada penilaian sebesar 45,5% yang menunjukkan masih ada kekurangan dalam implementasi kebijakan publik pada Prona Swadaya. Komunikasi perlu ditingkatkan baik secara kualitas dan kuantitas komunikasi untuk menunjang implementasi kebijakan. Sosialisasi belum merata : masih banyak Perangkat Desa yang belum mendaptkan informasi terait program Prona Swadaya; media penyampai informasi yang belum maksimal, walaupun ada brosur namun masyarakat masih belum memahami terkait kebijakan yang dijalankan. Berkaitan dengan kemampuan pegawai, kemampuan dalam hal menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan peraturan, persyarakat, prosedur dan biaya Prona Swadaya serta kemampuan pegawai dalam menggunakan peralatan kerja modern perlu mendapat perhatian lebih. Penelitian membenarkan dan membuktikan teori yang dikemukakan para ahli tentang pengaruh dari komunikasi, kemampuan pegawai dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan publik.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Thoriq dan Harsono diatas pada dasarnya memandang bahwa kajian implementasi suatu kebijakan publik menggunakan pendekatan *top-down*, dengan mengasumsikan bahwa apa yang sudah diputuskan (policy) adalah alternatif terbaik, dan agar mencapai hasil yang baik maka kontrol administrasi dalam pelaksanaanya adalah hal yang mutlak. Pendekatan ini memandang proses pembuatan kebijakan sebagai proses yang berlangsung secara rasional dan implementasi adalah melaksanakan tujuan yang telah dipilih tersebut dengan menentukan tindakan-tindakan rasional untuk mencapai tujuan itu. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses

administrasi yang terpisah dari penentuan kebijakan (yang bersifat politik). Implementasi sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. (Pressman dan Wildavsky, 1973). Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa setiap terjadi kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus dicari faktor-faktor penyebab dari kegagalan proses implementasi tersebut.

Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks dan rumit. Tanah berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar Tahun 1945 harus dikuasai oleh negara karena tanah adalah perekat Negara Kesatuan republik Indonesia. Sehingga kebijakan yang diambil terkait dengan pendaftaran tanah haruslah bersifat *top down* agar tidak menjadi sumber pemecah belah dan disintegrasi bangsa. George C Edward III merupakan salah satu tokoh yang mengusung teori dan pemikiraan pendekatan rasional *top down* dalam implementasi suatu kebijakan. Penulis sendiri merupakan seorang birokrat di instansi dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan pendaftaran tanah, sehingga penulis memiliki pemikiran yang sejalan dengan teori yang diusung oleh George C Edward III.

George C Edward III (1980), mengkategorikan kebijakan berdasarkkan sifat atau karakteristik kebijakan. Menurut George C Edward III ada beberapa jenis kebijakan yang pada dasarnya mudah menemui permasalahan dalam pengimplementasiannya. (Edward III, 1980). Rencana Strategis Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional dikategorikan sebagai kebijakan yang bersifat *Centralized Policies*. Yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi program pengimplementasiannya diserahkan pada tiap daerah. Kesulitan yang muncul dikarenakan penafsiran yang bisa jadi beragam antar daerah dan

juga kesiapan daerah yang masing - masing tidak sama, sehingga pengimplementasian dan hasilnya pun bisa berbeda dari tujuan utama kebijakan tersebut. Hal ini dikuatkan oleh Gerald E Caiden (1982), yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan dapat dianggap sebagai titik lemah dari pemerintahan, sehingga ditekankan pentingnya peranan tahapan implementasi kebijakan bagi keberhasilan seluruh proses kebijakan.

Sederet fakta – fakta baik teoritis, normatif dan empiris yang telah dikemukaan di atas menjadi alasan bagi penulis bahwa perlu dilakukan penelitian di Kabupaten Bantul terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George C Edward III.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- (1) Bagaimana gambaran implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam bidang pendaftaran tanah?
- (2) Bagaimana gambaran faktor faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam bidang pendaftaran tanah?
- (3) Sejauh mana pengaruh faktor faktor tersebut dalam proses implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana gambaran implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam bidang pendaftaran tanah;
- (2) Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana gambaran faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam bidang pendaftaran tanah;
- (3) Untuk menentukan sejauh mana pengaruh faktor faktor tersebut dalam proses implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam bidang pendaftaran tanah;

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi dunia akademik maupun bagi institusi dan negara. Hasil penelitian diharapkan akan melengkapi kekurangan penelitian tentang implementasi kebijakan berdasarkan pendapat dari George C Edwards III serta berguna untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah.

Bagi institusi penelitian akan berguna sebagai masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul terkait kinerja implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah. Melalui penelitian juga diharapkan akan memberikan solusi dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam bidang pendaftaran tanah pada khususnya

dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional pada umumnya serta berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan nasional.

#### BAB II

#### **KERANGKA TEORI**

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah disampaikan pada bab pendahuluan, bahwa masalah yang akan dikaji dalam rencana penelitian ini terkait dengan faktor — faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah sehingga sudah sepatutnya penelitian ini memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan yang pernah dilakukan sebelumnya. Sepengetahuan peneliti, selama ini sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait implementasi suatu kebijakan. Namun demikian khusus faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul belum pernah dilakukan. Selanjutnya, peneliti memilih sejumlah penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat memberi gambaran dan arah bagi penelitian yang akan dilakukan.

"Implementasi program pembangunan desa mandiri anggaran untuk rakyat menuju sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara)". (Tiza,A.L, Hakim, A., dan Haryono ,B.S., 2014). Penelitian ini adalah penelitian pertama yang penulis anggap relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian dilakukan oleh Tiza,A.L, Abdul Hakim, dan Bambang Santoso Haryono pada tahun 2014. Penelitian dengan metode kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis realitas pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dipotret melalui kajian implementasi program pembangunan desa mandiri

(Anggur Merah) dengan penekanan pada penggunaan model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III (1980) yang lebih dikenal dengan model pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementataion, dimana terdapat empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi diantara pelaku program dari tingkat propinsi sampai tingkat desa belum terlaksana secara maksimal; Masyarakat penerima program belum memahami secara baik manfaat dan kegunaan program sehingga terkesan mereka kurang partisipatif; Belum meratanya alokasi bantuan dana sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat desa; Pendampingan yang belum maksimal sehingga penggunaan dana belum direncanakan secara baik dengan berpatok pada kebutuhan dasar masyarakat desa; Kesiapan tenaga pendamping (Anggur Merah) yang tersebar di desa sasaran dalam hal sumberdaya manusianya dan konsolidasi yang tercipta di desa belum memadai; Akses untuk memperoleh informasi program bagi masyarakat belum optimal; Pepengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program (Anggur Merah) belum dilakukan secara maksimal. Kesimpulan dalam peneilitan menunjukkan bahwa Program Pembangunan Desa Mandiri (Anggur Merah) di Kabupaten Timor Tengah Utara belum terimplementasikan secara optimal.

Seperti telah diutarakan oleh penulis pada bab I latar belakang di depan, ada dua penelitian lain terkait implementasi ini, yaitu "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik pada prona swadaya di Kabupaten Semarang". (Thoriq, 2005). Serta penelitian oleh Harsono dengan judul "implementasi kebijakan sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional

(SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara". (Harsono, 2009). Kedua penelitian ini terkait dengan tema yang sama yaitu dibidang pertanahan. Penelitian yang dilakukan M Thorig bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik pada Prona Swadaya serta seberapa besar pengaruh faktor tersebut (komunikasi, kemampuan pegawai dan struktur birokrasi) terhadap pelaksanaan pensertifikasian tanah melalui program Prona Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Sedangkan penelitian oleh Harsono dengan melihat model implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975). Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Harsono (2009), "implementasi yang berhasil merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan". Penelitian dibatasi dan difokuskan pada variabel-variabel implementasi dari Van Meter dan Van Horn yaitu pada faktor komunikasi, sumber daya, dan sikap. Dari kedua penelitian tersebut akan digunakan oleh penulis sebagai gambaran dan arah penelitian yang akan dilakukan khususnya terkait dengan penggunaan variabel sebagai faktor yang berpengaruh terhadap implementasi.

Kajian selanjutnya berjudul "analisis terhadap faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi program kredit usaha keluarga sejahtera (KUKESRA) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Studi Tentang Sikap, Sumberdaya dan Pengawasan Terhadap Implementasi)". (Widodo, A.S, 2002). Widodo (2002) menjelaskan "implementasi program KUKESRA di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang masih rendah. Hal ini disebabkan karena sikap yang rendah terhadap program, sumber daya yang rendah bagi kelancaran program, pengawasan yang kurang terhadap penglolaan dana KUKESRA". Penelitian menggunakan pendekatan Kauntitatif, dengan fokus penelitian yaitu

studi tentang sikap, sumberdaya dan pengawasan terhadap implementasi Program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera. Hasil Penelitian menguatkan teori - teori dari George C Edward III(1980), David C Korten ( 1988), William N Dunn(1922) tentang hubungan antar sikap, sumberdaya dan pengawasan dengan implementasi kebijakan.

Selanjutnya ada beberapa penelitian ya dilakukan dengan acuan teori Edward III dalam implementasi kebijakan atau renstra seperti penelitian oleh Ahmad Nurcholish dengan judul "implementasi rencana strategis pengelolaan taman nasional (studi pada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Provinsi NTB)"( Nurcholish, 2017); "implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah" (Mirwan, 2016); "faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi rencana peningkatan mutu pendidikan dasar di kabupaten Padang Pariaman (penelitian survei pada SD dan SMP di Kabupaten Padang Pariaman).( Adnan, 2013); serta "implementasi pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sleman" (Yusana, 2013). Ahmad Nurcholish (2017), menggunakan teori Edward III sebagai acuan dalam penelitian. Edward III menyatakan bahwa terdapat 4 variabel atau critical factor yang menentukan dalam kebijakan publik yaitu : komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi .Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara bersama - sama karena antara satu dengan lainnya memiliki hubungan erat. Nurcholish menemukan fakta bahwa komunikasi memiliki peran yang dominan dalam implementasi renstra Taman Nasional Gunung Rinjani. Komunikasi yang intensif , jelas namun tidak kaku dan rinci untuk memberikan ruang kreativitas bagi pelaku kebijakan. Dalam implementasi renstra terdapat beberapa keterbatasan sumber daya anggaran maupun sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Keterbatasan ini berpotensi menjadi faktor penghambat dalam kesuksesan implementasi renstra. Dalam pemberian disposisi para pembuat kebijakan mempertimbangkan implementor yang sesuai dengan tupoksinya serta mempunyai kecakapan atau kemampuan dalam melaksanakan tugas. Dilihat dari struktur birokrasi yang ringkas dan sederhana memudahkan para pelaku kebijakan untuk saling berkoordinasi, namun belum adanya SOP menjadikan implementor tidak memiliki batasan patokan minimal standar untuk pekerjaan. Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Mirwan (2016), bertujuan untuk : (1) menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan hutan alam di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah; (2) menganalisis permasalahan penerapan kebijakan pengelolaan hutan alam di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kebijakan Pengelolaan Hutan Swasta Kabupaten Donggala tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan analisis penerapan kebijakan sesuai teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi 4 (empat) faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini tidak berjalan baik. Permasalahan dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Hak menurut teori Edward III adalah:

- (a) Proses komunikasi kebijakan belum berjalan dengan baik;
- (b) Sumberdaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan hutan hak belum terpenuhi dengan baik khususnya dari aspek SDM dan fasilitas.
- (c) Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan belum memberikan perhatian yang maksimal dalam pengelolaan Hutan Hak; dan
- (d) Struktur Birokrasi belum mendukung sepenuhnya dalam pengelolaan hutan hak yang dibuktikan dengan belum adanya SOP dalam pengelolaan hutan

hak bahkan belum adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan hutan hak.

Kajian yang dilakukan oleh Adnan (2013), untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi implementasi program di bidang pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman. Kajian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Variabel (faktor-faktor) yang digunakan adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur biokrasi , isi rencana dan partisipasi masyarakat. Hasil dari kajian menyebutkan bahwa ke enam faktor tersebut berpengaruh secara simultan terhadap implementasi program bidang pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan secara parsial yang memberikan pengaruh signifikan adalah variabel sumberdaya, struktur birokrasi dan partisipasi masyarakat. Adapun faktor paling dominan yang mempengaruhi implementasi rencana peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman adalah Partisipasi masyarakat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yusana (2013), membahas mengenai implementasi pelayanan kesehatan hewan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Yusana adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/09/2007 terkait dengan pelayanan kesehatan hewan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/09/2007 terkait dengan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sleman tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sleman belum optimal. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yang sifatnya mendukung adalah

komunikasi dalam hal tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/09/2007 terkait dengan pelayanan kesehatan hewan yang telah dirumuskan dengan jelas dan disampaikan dengan baik sehingga pelaksana sudah memahaminya; sumber daya berupa petugas pelayanan kesehatan hewan yang sudah berkompeten; disposisi dalam bentuk komitmen yang tinggi mulai dari Dinas sampai dengan petugas puskeswan; dan faktor struktur birokrasi yaitu sudah dibuatnya SOP sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan. Faktor-faktor yang sifatnya menghambat implementasi diantaranya: faktor komunikasi adalah tidak adanya konsistensi rumusan tujuan pelayanan kesehatan hewan dengan instrumen kebijakan yang berupa pelayanan gratis dan tidak ada tindak lanjut peraturan di tingkat pusat dengan peraturan daerah; faktor sumber daya yaitu jumlah SDM pelayanan kesehatan hewan, anggaran dan sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan masih kurang; faktor struktur birokrasi berupa jenjang hierarki birokrasi yang cukup panjang dan SOP yang ada belum sepenuhnya bisa dijalankan terutama dalam hal pemberian resep obat kepada peternak / klien. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar: membuat instrumen pelayanan kesehatan hewan yang lebih tepat; petugas puskeswan lebih patuh pada aturan yang telah dibuat; aturan yang ada harus konsisten dan ada konsistensi tujuan dan isi kebijakan dengan instrumen kebijakan; perlu penambahan jumlah petugas, anggaran dan sarana prasarana; perlu dipertimbangkan untuk dibentuknya puskeswan menjadi UPT tersendiri sehingga dapat menyederhanakan jenjang birokrasi; dan perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap SOP yang telah ada.

Penelitian terakhir yang dipakai penulis untuk salah satu acuan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2013) yang dilakukan dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi rencana program – program strategis Kota di Kota Batu. Faktor yang dimaksud berdasarkan gabungan teori dari beberapa ahli yaitu komunikasi, sumberdaya, kontrol (Faludi, 1973, Van Meter dan Van Horn, 1985), lingkungan (Van Meter dan Van Horn, 1985, Grindle, 1980) dan isi rencana (Conyern, 1990, Grindle, 1980). ). Penelitian menggunakan metode penelitian survey dengan hasil bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, kontrol, lingkungan dan isi rencana berpengaruh secara bersama sama terhadap implementasi rencana program – program strategis Kota di Kota Batu. Sedangkan secara parsial yang berpengaruh secara signifikan adalah variabel sumberdaya dan control. Variabel komunikasi, lingkungan dan isi rencana berpengaruh lemah atau tidak signifikan. Ada indikasi bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi implementasi adalah variabel kontrol.

### 2.2 Implementasi

# 2.2.1 **Definisi Implementasi**

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982, dalam Tarigan, 2000; Wibawa, 1994). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Edwards III (1984) bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* bagi warga masyarakat.

Grindle (1980) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (1975) dalam Wibawa (1994) menyatakan bahwa, implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. (Grindle ,1980).

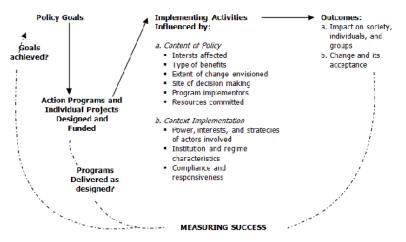
Menurut Lane (1995), implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation = F (Intention, Output, Outcome). Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time). Sabatier berpendapat penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. (Sabatier, 1986).

Implementasi kebijakan sebagai penghubung antara tujuan kebijakan serta realisasinya dengan hasil kegiatan dari pemerintah. Ini sesuai dengan pendapat dan gagasan dari Van Meter dan Horn dalam Grindle yang menyatakan tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders).(Van Meter dan Horn, 1975 dalam Grindle, 1980).

### 2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. (Grindle,1980).

Gambar 2.1 Implementation as a Political and Administrative Process
(Merilee S. Grindle. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton University Press, New Jersey)



Sumber : Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektof,Model dan Kriteria Pengukurannya, Akib,H., Tarigan,A., 2000

Ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. (Nakamura dan Smallwood, 1980). Pada gambar 2.1 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan

proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur keluaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Keluaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Keluaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.(Grindle,1980).

Fase Agenda Fase Keputusan Fase Pelaksanaan Sukses dilaksanakan Keputusan kebijakan Dalam Perkuat Institusi Agenda Isu Kebijakan Tidak ada **Gagal** kebijakan Tidak Tingkatkan kemauan politik

Gambar 2.2 Model Linier Implementasi Kebijakan

Sumber : Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektof, Model dan Kriteria Pengukurannya, Akib, H., Tarigan, A., 2000

Baedhowi (2004) berpendapat, "pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif". "Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan

upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana". (Baedhowi, 2004).

# 2.2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Salah satu pendekatan dalam implementasi kebijakan publik adalah "implementation problems approach" yang dicetuskan oleh Edwards III (1984). Pada awalnya Edwards III mengajukan pendekatan terkait implementasi publik dengan menyusun dua pertanyaan pokok, yakni: (1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? (Edwards III,1984). Selanjutnya berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan 4 (empat) faktor syarat utama keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi dan struktur organisasi, trmasuk tata aliran kerja birokrasi.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut terkait faktor -faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III (1984):

### (a) Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang

berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif. siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada implementor serius para secara mempengaruhi implementasi kebijakan.

## (b) Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan

terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill / kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan / program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi / pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan / mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan / program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

### (c) Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses

implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap / respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk / arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan / program.

#### (d) Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van

Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- (1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- (2) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
- (3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- (4) Vitalitas suatu organisasi;
- (5) Tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- (6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. (Van Horn dan Van Meter, 1989)

Apabila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih akan gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

### 2.3 Perencanaan Strategis

# 2.3.1 Definisi Perencanaan

"Perencanaan dapat didefinisikan sebagai: (1) Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, perencanaan pada hakekatnya ada pada manusia; (2) Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang lebih efisien dan efektif. (3)

Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa". (Tjokroamidjojo ,1996). Conyers dan Hills mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambungan, yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yakni

- (1) Pemilihan; perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat;
- (2) Sumber daya; perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Sumber daya menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya); sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya;
- (3) Tujuan; perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Seringkali tujuan tujuan tersebut didefinisikan

- secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain;
- (4) Waktu; perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan - tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan. (Conyers dan Hills ,1994).

Definisi perencanaan yang dikemukakan oleh Conyers dan Hills ini sesuai dengan pendapat yang lain, berdasarkan LANDSE unsur-unsur perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- (1) Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan; memilih prioritas dan memilih cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.
- (2) Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya; optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dan anggaran; Pengumpulan dan analisis data sumber daya yang tersedia;
- (3) Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan; tujuan harus jelas (ekonomi, politik, sosial, ideologi, atau kombinasi dari semuanya).
- (4) Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang dan
- (5) Perencanaan merupakan kegiatan yang terus menerus (kontinyu). (LANDSE, 1999).

## 2.3.2 Proses Perencanaan

Pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematik, yang tanggap terhadap perkembangan zaman, yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa

"SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah".

"Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ada 4 (empat) tahap proses perencanaan pembangunan, yakni dimulai dari : a.) Penyusunan Rencana, b.) Penetapan Rencana, c.) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan, d.) Evaluasi Pelaksanaan Rencana". (Undang-undang No. 25 Tahun 2004). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut maka, "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan yaitu: (1) pendekatan politik; (2) pendekatan teknokratik; (3) pendekatan partisipatif; (4) pendekatan atas-bawah (top-down); dan (5) pendekatan bawahatas (bottom-up)". Para ahli teori perencanaan publik menjelaskan, "proses perencanaan, yaitu : (a) perencanaan teknokrat; (b) perencanaan partisipatif; (c) perencanaan top-down; (d) perencanaan dari bawah ke atas atau bottom-up". (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007). Penjelasan untuk masing - masing proses perencanaan digambarkan sebagai berikut:

#### (1) Perencanaan teknokrat

Menurut Suzetta (2007), "perencanaan teknokrat adalah proses perencanaan yang dirancang berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dari pengamat profesional, baik kelompok masyarakat yang terdidik yang walau tidak mengalami sendiri namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat disediakan pasar, untuk menghasilkan perspektif akademis pembangunan. Pengamat ini bisa pejabat pemerintah, bisa non-pemerintah, atau dari perguruan tinggi". Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, perencanaan teknokrat dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

# (2) Perencanaan partisipatif

"Perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah, dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders)". (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasiorganisasi non-pemerintah. Sedangkan Sumarsono mengartikan, "perencanaan partisipatif yaitu metode perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subyek pembangunan". (Sumarsono, 2010). Menurut penjelasan UU. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dalam UU No. 25 Tahun 2004, dijelaskan pula partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan

#### (3) Perencanaan top-down.

"Perencanaan *top-down* adalah proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga / departemen / daerah yaitu menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya". (Suzetta,1997)

### (4) Perencanaan bottom-up

Menurut penjelasan UU 25 Tahun 2004, pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, dan Desa.

# 2.3.3 Rencana Strategis Kementerian / Lembaga

Supriyanto dan Ernawati (2010) menyatakan, "rencana strategis adalah proses manajemen dalam menciptakan dan memelihara kesesuaian antara tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki guna menangkap peluang pasar yang selalu berkembang. Perencanaan strategis juga menguji bagaimana cara memilih sasaran hasil, tujuan organisasi dan rencana tindakan yang strategis untuk disebarkan dan dirubah jika keadaan berubah, serta bagaimana kemajuan program yang telah ditetapkan". Menurut teori Bryson (2002), penyusunan perencanaan strategis terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: (1) Penetapan visi, misi dan tujuan organisasi, merupakan tindakan mengembangkan dan mengklarifikasikan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang berkaitan dengan pernyataan visi, misi dan tujuan organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi; (2) Analisis lingkungan eksternal, yaitu mengungkapkan lingkungan luar yang dimaksud untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, berkaitan dengan faktor politik, ekonomi, sosial dan arah perkembangan teknologi merupakan bagian dari aktivitas analisis luar; (3) Analisis lingkungan internal, merupakan langkah yang digunakan utuk menganalisi kedalam organisasi itu sendiri, dengan menilai sumberdaya organisasi. Indikator dalam analisis lingkungan internal ini hanya berfokus pada kekuatan dan kelemahan organisasi itu sendiri; (4) Identifikasi isuisu strategis berkaitan dengan yang dihadapi organisasi, merupakan pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan fundamental tentang pengaruh
mandat organisasi, visi, misi, pelayanan biaya, pendanaan, maupun rencana
organisasi atau manajemen; (5) Mengembangkan strategi, yaitu melaksanakan
tindakan-tindakan dari keputusan atas dasar isu-isu strategis yang telah
diidentifikasikan pada langkah sebelumnya, untuk mengelola isu strategis dan
penetapan visi organisasi yang efektif dan efesien.

Perencanaan strategis dibagi dua, yaitu: pengembangan strategi dan implementasi strategi (Gaspersz, 2011). Menurut Supriyanto dan Ernawati, "Pengembangan strategi adalah cara yang dilakukan oleh organisasi dalam menetapkan strateginya dan sasaran hasil yang strategis mencakup bagaimana menunjukkan tantangan strategis, meringkas sasaran hasil strategis dan tujuan". (Supriyanto dan Ernawati , 2010). Gaspersz menguraikan apa saja yang termasuk dalam pengembangan strategi : (1) Memahami kebutuhan dari pelanggan, karyawan, masyarakat dan pemerintah sebagai masukan untuk menetapkan arah, sasaran dan tujuan organisasi; (2) Mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan kesempatan untuk diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya; (3) Malakukan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats atau kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Analisis ini meliputi analisis keadaan internal organisasi dan analisis keadaan eksternal; (4) Menetapkan sasaran, tujuan strategis indikator kinerja dan batas waktu untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis tersebut, serta mekanisme penilaiannya; (5) Melakukan analisis tentang kemampuan untuk melaksanakan rencana - rencana strategis; (6) Menjamin bahwa program - program peningkatan keunggulan kinerja yang akan dilaksanakan itu terintegrasi atau selaras dengan arah, sasaran dan tujuan strategis organisasi yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan, karyawan masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Implementasi Strategi (strategy implementation) adalah proses di mana manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur dan anggaran. Implementasi strategi juga dapat diartikan sebagai pengembangan strategi dalam bentuk tindakan, implementasi strategi yang sesuai adalah implementasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan strategis dan misi strategis yang telah ditetapkan. Hal - hal yang harus diperhatikan dalam implementasi strategi adalah : (1) Penataan staf mengikuti strategi; (2) Perubahan dalam kebutuhan merekrut dan melatih; (3) Menyesuaikan manajer dengan strategi, seleksi dan pengembangan manajemen serta (4) Mengidentifikasi kemampuan dan potensi. (Gaspersz, 2011).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian
/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 yang dimaksud Rencana Strategis
Kementerian / Lembaga adalah

"Dokumen perencanaan Kementerian/ lembaga untuk periode 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi ,kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian / Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat Indikatif".

Didalam sistem Perencanaan Pembangunan nasional, dokumen Renstra K/L memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra K/L berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN, dimana dalam penyusunan Renstra K/L harus

berpedoman pada RPFMN. Renstra K/L selanjutnya akan dijabarkan secara lebih rinci dalam rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian/lembaga. Selain itu Renstra K/L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan rencana kerja kementerian /Lembaga( Renja K/L). Berikut ini gambaran bagan alur Keterkaitan Renstra K/L dengan dokumen Perencanaan Lainnya.

Pedonan

Presiden

RIJM
Nasional

Presiden

RIJM
Nasional

Presiden

Renja K/L

Renja K/L

LAPORAN:

Kinerja Pembangunan;

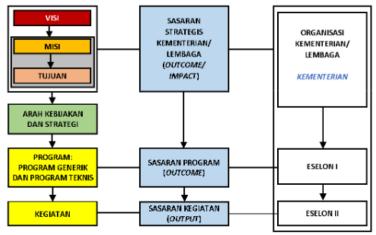
Kinerja Pembangunan;

Kinerja Crganisasi

Gambar 2.3 **Bagan Alur Keterkaitan Renstra K/L dengan Dokumen Perencanaan Lainnya** 

Sumber: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014

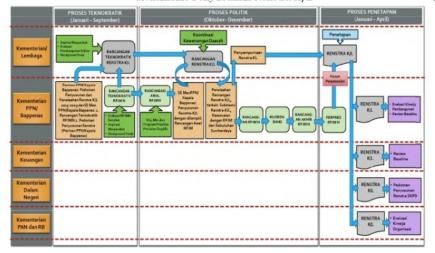
Dalam penyusunan rencana strategis kementerian / lembaga , secara organisasi setiap kementerian harus membuat visi,misi, tujuan dan sasaran strategis lembaganya. Selanjutnya visi,misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut akan dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan ,beserta kerangka regulasi, kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan. Bagan rencana strategis kementerian / lembaga bagi Kementerian dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4 Bagan Renstra K/L bagi Kementerian

Sumber: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014

Sedangkan dalam penyusunan Renstra K/L, mekanisme atau alur kegiatam yang dilalui meliputi 3 (tiga) proses yaitu : (1) Proses Teknokratik;(2) Proses Politik, dan (3) Pemetapan renstra K/L. Mekanisme detail dalam penyusuna Renstra K/L dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.5 Mekanisme Penvusunan Renstra K/L bagi Kementerian

Sumber: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014

Adapun rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional bidang pendaftaran tanah termuat dalam agenda

prioritas (nasional) sebagai upaya pencapaian visi misi Presiden yang dapat diidentifikasi pada agenda ke 4 (empat) yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Arah kebijakan agenda ke 4 (empat) dapat dilihat pada tabel 1.2 di bab I, dengan sasaran memperbesar cakupan peta dasar pertanahan dan memperbesar cakupan bidang tanah yang bersertipikat.

Rencana Strategis Kementerian agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tersebut kemudian dijabarkan dalam program-program yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pendaftaran tanah. Adapun rencana strategis bidang pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul adalah program progam yang dikeluarkan dengan tujuan melakukan pendaftaran tanah diantaranya:

(1) PRONA; nama kegiatan legalisasi asset yang umum dikenal dengan PRONA, adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan

- desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.
- (2) PRODA; Kegiatan pendaftaran tanah yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Sertipikasi Tanah Sultan; Kegiatan inventarisasi dan pendaftaran tanah atas tanah Kasultanan (Sultan Ground) dan tanah Kadipaten (Pakualaman Ground) yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan (DANAIS).
- (4) Sertipikasi Tanah UKM; adalah sub komponen dari komponen kegiatan legalisasi asset dengan subyek hak adalah pengusaha kecil dan mikro. Sertipikasi tanah UMK pada hakekatnya adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh perorangan pengusaha kecil dan mikro. Legalisasi aset ini merupakan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional RI dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri. Program ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi akses penguatan hak berupa sertipikasi tanah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (5) Sertipikasi Tanah Pertanian; adalah sub komponen dari komponen kegiatan legalisasi aset. Objek kegiatan ini adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh petani sedangkan subjek kegiatan ini adalah petani (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan). Seperti kegiatan legalisasi aset lainnya, sertipikasi tanah petani pada hakekatnya merupakan proses adminstrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, (pengukuran, pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman, penetapan/pemberian hak),

pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sertipikasi tanah petani dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi petani, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan Keputusan bersama Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor: 2/SKB/BPN/2004 tanggal 02 September 2004.

- (6) Sertipikasi Tanah Massal Swadaya (SMS), pelaksanaan sertifikasi masal yang dilakukan dengan melibatkan banyak orang atas biaya sendiri. Dalam pelaksanaanya, pendaftaran tanah tersebut dilakukan dengan pelayanan sistem jemput bola dengan melibatkan banyak orang dan minimal untuk 50 bidang tanah dengan dana dari masyarakat dengan tujuan Mewujudkan program peningkatan penataan manajemen pertanahan melalui percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistimatik untuk mendukung pengembangan kebijakan dan sistem manajemen pertanahan yang terpadu dan terkoordinasi.
- (7) Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), merupakan percepatan PRONA yaitu pendaftaran tanah pertama kali secara serentak yang meliputi semua obyek yang belum terdaftar, termasuk pemetaan seluruh obyek yang sudah didaftar untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya, dalam satu wilayah desa /kelurahan.

#### 2.4 Pendaftaran Tanah

"Istilah pendaftaran berasal dari kata *Cadastre* yaitu suatu daftar yang melukiskan semua persil tanah yang ada dalam suatu daerah berdasarkan

pemetaan dan pengukuran yang cermat". (Abdurrahman, 1985). "Istilah Cadastre ini dalam bahasa Belanda disebut Kadaster yang berasal dari bahasa latin Capistrastrum yang dalam bahasa Perancis berubah menjadi Cadastre yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diadakan diadakan untuk kepentingan pajak tanah Romawi". (Parlindungan, 1990). Selanjutnya menurut Parlindungan sebagaimana dikutip oleh Elko Lucky Mamesah, Cadastre dapat juga diartikan sebagai record (rekaman) dari lahan, nilai dari bidang tanah dan pemegang haknya untuk kepentingan perpajakan. (Parlindungan, 1990). Tujuan awal dari dilaksanakan pendaftaran tanah adalah untuk kepentingan pemungutan pajak ( fiscale kadaster) namun kemudian ditujukan juga guna kepastian hak atas tanah (rechts kadaster). Di dalam perkembangannya kedua istilah kadaster ini dipisah, sehingga saat ini ada dua jenis pendaftaran tanah yaitu fiscale kadaster dan rechts kadaster. Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah pendaftaran tanah dalam arti rechts kadaster yang bertujuan untuk kepastian hak atas tanah,

Boedi Harsono (1982) menyatakan bahwa, "pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan keterangan-keterangan mengenai semua tanah atau tanah – tanah tertentu di suatu wilayah". Menurut S. Rowton Simpson (1976) pendaftaran tanah merupakan suatu upaya yang tangguh dalam administrasi kenegaraan, sehingga dapat diartikan juga sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal 19 ayat 1 UUPA). Pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana

dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dinyatakan ada 2 (dua ) kewajiban pokok yaitu :

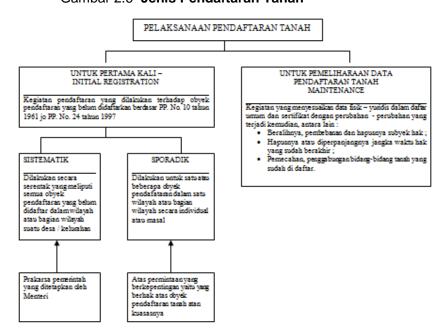
- (1) Kewajiban pemerintah yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Kewajiban para pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dipegangnya.

Pendaftaran tanah ini meliputi kegiatan kegiatan sebagaimana berikut:

- (a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah Kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang dimaksud yaitu pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur.
- (b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- (c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat 2 UUPA).

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : (a) pengumpulan dan pengolahan data fisik; (b) pembuktian hak dan pembukuannya; (c) penerbitan sertipikat; (d) penyajian data fisik dan data yuridis; dan (e) penyimpanan daftar umum dan dokumen. Sedangkan Kegiatan pemelihaan data pendaftaran tanah meliputi : (a) pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; serta (b) pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. (PP no. 24 Tahun 1997 pasal 12).

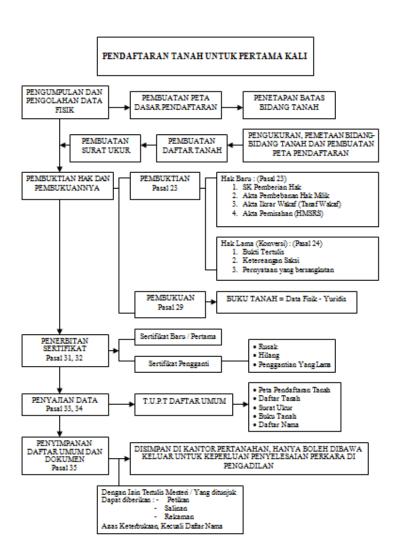
Adapun Jenis jenis Pendaftaran Tanah menurut PP no. 24 Tahun 1997 pasal 1 dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendaftaran tanah secara sistematik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan; (b) Pendaftaran tanah secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan secara individual atau massal. Untuk lebih memahami terkait jenis pendaftaran tanah dan bagaimana pelaksanaannya, akan dijelaskan pada gambar 2.6 sampai dengan 2.8 di bawah ini.



Gambar 2.6 Jenis Pendaftaran Tanah

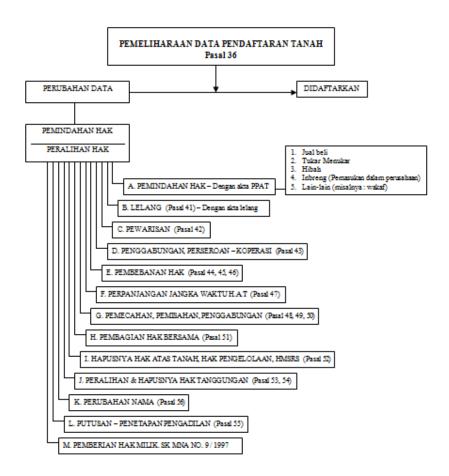
Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017

Gambar 2.7 Pendaftaran Tanah Pertama Kali



Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017

Gambar 2.8 Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah



Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017

#### **BAB III**

#### KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 3.1 Kerangka Pemikiran

Suriasumantri dalam Sugiyono mengemukakan, "seorang peneliti harus menguasai teori - teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan ilmuwan, adalah alur - alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis". (Suriasumantri, 1986 dalam Sugiyono, 2009).

Uma Sekaran (2006) dalam Sugiyono (2010) berpandangan, kerangka berpikir merupakan hasil analisis secara kritis dan sistematis terhadap teori yang telah dideskripsikan sehingga menghasilkan sintesa hubungan antara variabel yang akan diteliti. Sintesa variabel kemudian menjadi dasar dalam penyusunan hipotesa. Teori yang dideskripsikan harus mencakup uraian penjelasan pendapat pakar / ahli dan hasil penelitian terdahulu mengenai variabel yang akan diteliti sehingga hubungan antar variabel menjadi jelas dan terarah. Dalam penelitian ini teori yang mendasari adalah teori Edward III tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Menurut Edward III (1980) faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah:

## (1) Komunikasi

Implementasi akan terlaksana dengan efektif , jika infromasi diketahui oleh para pengambil keputusan dengan komunikasi yang baik. "Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Ketiga indikator tersebut yaitu: (1) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan; (2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu / mendua; (3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan". (Edward III, 1980 dalam Agustino, 2006).

#### (2) Sumber Daya

Kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*) merupakan syarat berjalannya suatu organisasi. Schermerchorn mengelompokkan sumberdaya ke dalam, "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". (Schermerchorn, Jr, 1994). Adapun Hodge (1996) mengelompokkan sumberdaya ke dalam, "*Human resources, Material resourcess, Financial resourcess and Information resources*". Kemudian Hodge (1996) membagi

sumber daya tersebut dengan lebih spesifik sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: "Human resources- can be classified in a variety of ways: labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc; Material resources:equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc; Financial resources: cash on hand, debt financing, owner's investment, sale reveue, etc; Data resources: historical, projective, cost, revenue, manpower data etc". (Hodge, 1996). Edwards III (1980) mengkategorikan sumber daya organisasi yaitu, "Staff, Information, Authority, Facilities, Building, Equipment, Land and Supplies". "Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed ". (Edward III,1980). Menurut Edward III (1980) dalam Agustino (2006), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikatorindikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: (1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan; (2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan

regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. (3) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya; (4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

## (3) Sikap Birokrasi atau Pelaksana

Edward III (1980) dalam Winarno (2005) mengemukakan bahwa, "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik

kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius".

Eagly dan Chaiken (1993) mengemukakan bahwa sikap dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek sikap yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku, sebagaimana digambarkan pada gambar 3.1. Sebagai hasil evaluasi, sikap yang disimpulkan dari berbagai pengamatan terhadap objek diekspresikan dalam bentuk respon kognitif, afektif (emosi), maupun perilaku. (Katz & Stoland, 1959; Triandis, 1971).

Gambar 3.1 Attitude sebagai hasil Evaluasi

Observable Infered Observable

Cognitive Responses

Stimulus (Object)

Attitude Attitude

Behavioral Responses

Sumber: Eagly & Chaiken, 1993 dalam Neila Ramdhani
Sependapat dengan Katz dan Stoland (1959), Triandis (1971) menyatakan bahwa sikap berkaitan dengan proses kognitif, afektif, dan perilaku. Namun, Greenwald (1968); Triandis (1971); serta Zanna dan Rempel (1988) mengemukakan bahwa sikap didahului oleh proses-proses kognitif, afektif,

dan perilaku. Sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.2.

Cognitive Processes

Affective Processes

Behavioral Processes

Gambar 3.2 **Sikap sebagai hasil dari proses kognitif, afektif, dan perilaku** 

Sumber : Neila Ramdhani ."SIKAP & PERILAKU: Dinamika Psikologi Mengenai Perubahan Sikap dan Perilaku".

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa sikap terdiri dari tiga komponen pokok yaitu kognisi, afeksi dan perilaku.

## (a) Kognisi (Keyakinan)

Respon evaluatif dalam bentuk kognitif meliputi beliefs yang dimiliki individu terhadap objek sikap dengan berbagai atributnya. (Fishbein dan Ajzen, 1975). Individu yang memiliki evaluasi negatif terhadap suatu kebijakan berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak akan bermanfaat bagi masyarakat, Sebaliknya evaluasi positif akan menyebabkan individu berpendapat bahwa kebijakan akan bermanfaat bagi masyarakat. Mann (1969) dalam Azwar (1988) menjelaskan," komponen kognisi berisi persepsi, kepercayaan dan stereotip yang dimiliki individu terhadap sesuatu. Kognisi juga sering disamakan dengan opini (pendapat) terhadap isu tertentu".

## (b) Afeksi (perasaan)

Respon evaluatif dalam bentuk afektif berupa perasaan individu terhadap objek sikap. Sikap dan perasaan yang dikaitkan dengan masalah emosional, misalnya perasaan senang atau tidak senang terhadap adanya suatu kebijakan.

### (c) Perilaku

Sikap yang menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan yang ada pada diri seseorang berkaitan dengan obyek yang dihadapi. Hal ini tergantung dari tingkat kepercayaan individu terhadap suatu obyek tersebut. Seseorang bisa menunjukkan perilaku yang baik apabila memiliki keyakinan yang baik pula terhadap suatu kebijakan. Sebaliknya seseorang akan menunjukkan perilaku penolakan apabila memiliki keyakinan yang tidak baik terhadadap suatu kebijakan. Penolakan – penolakan tersebut memiliki bentuk yang beraneka ragam seperti yang dikemukakan Edward III (1980) sebagai zona ketidakacuhan yaitu saat para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan - tindakan menghambat yang lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2006), sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (1980) dalam Agustino (2006) mengenai "disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: (a) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-

hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat; (b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi".

## (4) Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III (1980) dalam Winarno (2005), "terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi". "*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Berdasakan hasil

penelitian Edward III (1980) yang dirangkum oleh Winarno (2005) dijelaskan bahwa:

"SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini".

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III (1980) dalam Winarno (2005) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan suatu koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Winarno (2005), "hambatanhambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik diantaranya: (1) Tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masingmasing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk; (2) Pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan".

Resources

Implementation

Dispositions

Bureaucratic
Structure

Gambar 3.3 Model Implementasi Kebijakan

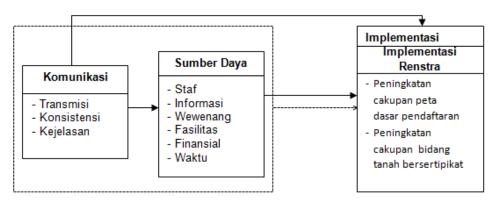
Menurut George C Edward III, Direct and Indirect Impacts
on Implementation

Sumber: Edward III, G,C, Implementing Public Policy, 1980

Gambar 3.3 di atas dapat memberikan gambaran bahwa keempat faktor memberikan pengaruh pada keberhasilan implementasi baik secara langsung maupun tidak langsung, secara parsial maupun simultan. Sebagai contoh faktor komunikasi akan berpengaruh secara langsung terhadap implementasi yang ditunjukkan dengan anak panah berkepala tunggal menuju ke variabel implementasi. Disamping berpengaruh secara langsung faktor komunikasi juga berpengaruh secara tidak langsung yaitu komunikasi mempengaruhi sumberdaya ,disposisi, struktur birokrasi yang selanjutnya akan mempengaruhi implementasi. Dengan asumsi yang sama dengan contoh faktor komunikasi tersebut, berdasarkan pola anak panah pada gambar model di atas, maka ketiga faktor yang lain akan memberikan pengaruh baik langsung ataupun tiidak langsung

terhadap implementasi. Secara simultan atau bersama sama keempat faktor akan memberikan pengaruh terhadap implementasi yang ditunjukkan dengan panah berkepala dua yang saling tertuju antar satu faktor dengan faktor lainnya.

Berdasarkan model implementasi Edward III (1980) tersebut, penulis dapat gambarkan kerangka pikir dari penelitian yang dilakukan.



Gambar 3.4 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah dari Edward III, Implementing Public Policy, 1980

Penulis membatasi penelitian pada variabel komunikasi dan sumber daya. Kemudian variabel komunikasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) Komunikasi level I ( Komunikasi antara atasan dan bawahan); (2) Komunikasi level II ( Komunikasi antara Kantor pertanahan dengan kelompok sasaran); serta (3) Komunikasi level III ( Komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait). Adapun pertimbangan dalam memilih variabel tersebut antara lain sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dibangun oleh George C Edward III (1980), apabila semua variabel diteliti maka akan terlalu rumit dan komplek.
- (2) Secara empiris pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul melibatkan banyak pihak (stakeholder) diantaranya Kantor Pertanahan,

masyarakat kelompok sasaran, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi (keraton Yogyakarta), Badan Informasi Geospasial, Ikatan Surveyor Indonesia, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, sehingga peran komunikasi menjadi aspek yang penting menurut pandangan penulis. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa, "70 % waktu bangun manusia digunakan untuk berkomunikasi". (Rakhmat,2003). Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang organisasi sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama, komunikasi memiliki perananan penting salah satunya dalam menjalin hubungan dengan para *stakeholder* (Robbins,1994).

- (3) Bertinghaus (1968) menyebut paling tidak ada 3 (tiga) bentuk komunikasi formal yaitu yang berdasarkan: (1) arah yang dituju: vertikal, horizontal, pesan dalam komunikasi formal biasanya mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas secara vertikal dan dari tingkat yang sama atau horizontal dan komunikasi lintas saluran; (2) sifat, tipe jaringan komunikasi disesuaikan dengan tugas misalnya pelaporan, perintah, pengarahan atau perlindungan dan kepenasihatan; (3) keformalan (sisi formal), sejauh mana alur komunikasi dibatasi oleh kewenangan
- (4) Kantor pertanahan Kabupaten Bantul pada faktanya kekurangan sumber daya, namun di dalam implementasi rencana strategis selalu menggunakan sumber daya yang melibatkan banyak pihak seperti dari Surveyor berlisensi, Mahasiswa STPN, Abdi dalem Keraton dan warga masyarakat serta menggunakan teknologi terbaru seperti drone dan alat ukur berbasis satelit.

- (5) Struktur Birokrasi tidak masuk dalam variabel penelitian karena pertimbangan bahwa telah berlaku 2 (dua) struktur organisasi pada Kantor Pertanahan kabupaten Bantul yaitu struktur organisasi lama pada tahun 2015 2016 serta struktur organisasi baru yang terbentuk dan berlaku pada tanggal 7 Desember 2016. Adapun penelitian dilakukan terhadap renstra tahun 2015 2019. Dalam rentang waktu tersebut karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi tentu akan mengalami perubahan perubahan. Kondisi ini menurut pendapat penulis pasti akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga perlu diadakan penelitian tersendiri terhadap struktur birokrasi ini.
- (6) Sedangkan variabel disposisi penulis abaikan karena alasan sebagaimana berikut: Seligman (2002) mengemukakan bahwa budaya mempengaruhi kekuatan karakter seseorang. Masyarakat di Kabupaten Bantul terkenal dengan budaya kegotong royongannya. Hal ini mempengaruhi karakteristik masyarakatnya. Masyarakat Jawa merasa dirinya bukanlah persekutuan individu-individu, melainkan suatu kesatuan bentuk "satu untuk semua dan semua untuk satu" (Herusatoto, 2008). Wijayanti dan Nurwianti (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ada 5 (lima) kekuatan karakteristik suku Jawa yaitu berterima kasih, kebaikan, kependudukan, keadilan, dan integritas. Dengan karakter sebagaimana disebutkan diatas khususnya terkait dengan kegemaran bekerja sama dan karakteristik integritas, penulis berpendapat tidak akan ada sikap penolakan dari pelaksanan terhadap Renstra yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hal ini ditambah dengan telah dilaksanakannya pemberian Intensif bagi para pegawai sejak tahun 2014 sebagai faktor pendorong untuk menjalankan

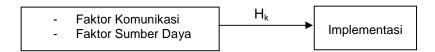
perintah dengan baik, maka penulis berkesimpulan tidak ada masalah dalam dispoisisi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam Implementasi Renstra.

## 3.2 Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Hipotesis Teoritis

Gambar 3.5 Hipotesis Teoritis Penelitian

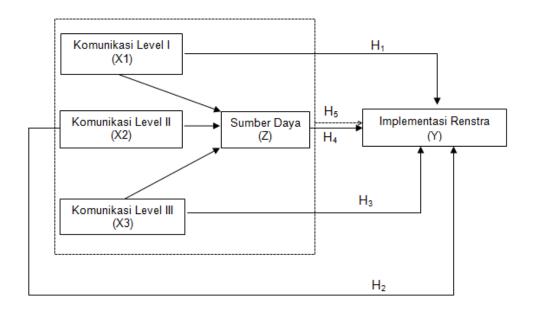


Hipotesis teoritis dalam penelitian secara verbal dapat dinyatakan sebagai berikut:

- (a) H<sub>k</sub> sebagai hipotesa kerja yaitu konsep faktor komunikasi dan faktor sumberdaya menurut teori Edward III mempengaruhi proses implementasi
- (b) H<sub>o</sub> sebagai hipotesa nol yaitu formulasi terbalik dari hipotes kerja, Konsep faktor komunikasi dan faktor sumberdaya menurut teori Edward III tidak mempengaruhi proses implementasi

## (2) Hipotesis Statistik

## Gambar 3.6 Hipotesis Statistik Penelitian



Keterangan: → parsial -----> Simultan

Hipotesis statistik dalam penelitian secara verbal dapat dinyatakan sebagai berikut:

- (a) H<sub>o</sub>: Tidak ada pengaruh antara variabel komunikasi level I (X1), komunikasi level II (X2), komunikasi level III (X3) dan sumber daya (Z) secara parsial terhadap implementasi renstra (Y).
  - H<sub>1</sub>: variabel komunikasi level I secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra
  - H<sub>2</sub>: variabel komunikasi level II secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra
  - H<sub>3</sub>: variabel komunikasi level III secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra

- H<sub>4</sub>: variabel sumber daya secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra
- (b) H<sub>o</sub>: Tidak ada pengaruh antara variabel komunikasi level I (X1), komunikasi level II (X2), komunikasi level III (X3) dan sumber daya (Z) secara bersama-sama terhadap implementasi renstra (Y).
  - H<sub>5</sub>: variabel komunikasi level I, komunikasi level II, komunikasi level
     III, dan variabel sumberdaya, secara simultan / bersama-sama
     mempengaruhi proses implementasi renstra

#### BAB IV

#### **METODE PENELITIAN**

#### 4.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berjudul faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah (studi pada kantor pertanahan Kabupaten Bantul). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ekplanasi. Pertimbangan dalam menggunakan pendekatan kuantitatif salah satunya adalah pendekatan kuantitaif mampu menjawab rumusan masalah yang ditetapkan yang menitikberatkan pada aspek pengukuran yang mengkonversi realitas yang ada kedalam angka kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis tertentu. Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2006) ialah :

"Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2002) memberikan penjelasan bahwa,

"Jenis penelitian eksplanasi adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data atau fakta dilapangan penelitian. Penelitian eksplanasi menjelaskan berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu peristiwa, dengan ciri yaitu menjelaskan antar hubungan atau pengaruh antar variabel independen (bebas) dan dependen (terikat)".

Adapun tipe penelitian untuk jenis penelitian ekplanasi ini adalah tipe penelitian asosiasi. "Penelitian asosiasi merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih".

(Sugiyono,2003). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survai, "penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok". (Singarimbun dan Effendi, 1989).

### 4.2 Konsep dan Operasional Variabel Penelitian

## 4.2.1. **Definisi Konseptual**

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2002), "definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian dan keadaan kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial". Konsep dibentuk dengan kebutuhan untuk menguji hipotesis dan menyusun teori yang masuk akal, serta dapat diuji regularitasnya. (Bungin, 2010). Konsep diartikan sebagai sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, dengan kata lain konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasi dari fakta tertentu (Davis dan Cosenza ,1993). Rakhmat (1999) menambahkan bahwa "konsep merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus".

Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation = F (Intention, Output, Outcome). Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (Policy, Formator, Implementor,

Initiator, Time). Implementasi rencana strategis adalah variabel yang akan digunakan untuk mengukur konsep implementasi

(2) Faktor berpengaruh (Edward III) adalah segala sesuatu atau hal, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkup organisasi yang mempengaruhi implementasi rencana strategis yang didasarkan pada teori dan pendapat dari Edward III. Konsep ini dioperasionalisasi menjadi 4 (empat) variabel antara lain Komunikasi level I ( Komunikasi antara atasan dan bawahan), Komunikasi level II ( Komunikasi antara Kantor pertanahan dengan kelompok sasaran), Komunikasi level III ( Komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait) dan sumber daya. Variabel tersebut berdasarkan hasil kajian teroitis dan empiris tentang implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah.

## 4.2.2 Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai variasi nilai dan merupakan hasil operasionalisasi dari konsep agar dapat diteliti secara empiris. Biasanya variabel belum siap untuk diukur oleh sebab itu diperlukan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel yang disebut definisi operasional. (Singarimbun dan Effendi, 2011). Kerlinger (1990) mendefinisikan variabel sebagai simbol atau lambang yang padanya kita lekatkan bilangan atau nilai. Sedangkan menurut Zainal Mustafa (2009), "variabel adalah indikator yang mempunyai nilai bervariasi. Apabila dikaitkan dengan hirarki dari sebuah konsep, indikator merupakan ukuran paling kecil dari sebuah konsep. Berdasarkan indikator ini kemudian disusun instrumen untuk membantu pengumpulan data. Pertanyaan yang disusun dalam instrumen untuk setiap

indikator dapat lebih dari satu pertanyaan. Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati".

"Adapun jenis-jenis variabel dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- (a) Variabel terikat (dependent variabel, disebut juga varibel criteria criterion variable) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti atau variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel terikat, menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya.
- (b) Variabel bebas (independent variable disebut juga variabel predictor predictor variable) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif.
- (c) Variabel moderator (*moderating variable*) adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan (*contingent effect*) yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan variabel bebas.
- (d) Variabel antara (intervening variable) adalah varabel yang mengemuka antara waktu variabel bebas mulai bekerja memengaruhi variabel terikat, dan waktu pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat". (Sekaran, 2003).

Di dalam penelitian yang akan dilakukan variabel yang mempengaruhi proses implementasi renstra adalah variabel Komunikasi level I (selanjutnya disebut variabel X1), Komunikasi level II (selanjutnya disebut variabel X2), Komunikasi level III (selanjutnya disebut variabel X3) serta variabel sumber daya (selanjutnya disebut variabel Z). Berdasarkan jenis variabel yang ada, variabel Komunikasi level I (X1), Komunikasi level II (X2), Komunikasi level III (X3) serta variabel sumber daya (Z) disebut variabel bebas. Variabel Komunikasi level I

(X1), Komunikasi level II (X2), Komunikasi level III (X3) Disebut juga variabel eksogen dalam model analisa jalur. Adapun variabel sumberdaya (Z) disebut variabel intervening / mediator yang menentukan besar kecilnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel implementasi renstra (selanjutnya disebut variabel Y), yang merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti atau variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Disebut juga variabel endogen dalam model analisa jalur.

## 4.2.3. **Definisi Operasional**

Seperti sudah dijelaskan di sub bab variabel penelitian di atas bahwasanya variabel belum siap diukur maka dari itu diperlukan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. "Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional suatu penelitian akan diketahui pengukuran suatu variabel sehingga dapat diketahui baik buruknya pengukuran tersebut". (Singarimbun dan Effendi, 1984). Dengan demikian definisi operasional merupakan sesuatu yang memperjelas suatu konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur untuk keperluan pengukuran dilapangan.

Berikut ini penjabaran definisi operasional dari masing masing variabel penelitian :

- (1) Variabel Implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah dapat diukur dengan indikator indikator sebagai berikut :
  - a. Peningkatan cakupan peta dasar pendaftaran, diukur dengan:
    - 1. Luas cakupan peta dasar pendaftaran
    - 2. Tingkat kualitas peta dasar pendaftaran

- 3. Kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah
- 4. Tingkat kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan
- b. Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat, diukur dengan :
  - Jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan, termasuk juga tanah milik keraton
  - 2. Kecepatan legalisasi aset khususnya dipedesaan
  - 3. Jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun
  - 4. Jumlah penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan
- (2) Variabel komunikasi secara operasional dapat dilihat melalui indikator :
  - a. Transmisi, yang diukur dari
    - Keragaman media penyampai informasi
    - 2. Intensitas sosialisasi program kebijakan
    - 3. Tingkat pemerataan sosialisasi
    - 4. Tingkat kelancaran penyampaian informasi
  - b. Konsistensi,yang diukur dari ketetapan informasi
  - c. Kejelasan,yang diukur dari
    - 1. Kejelasan informasi
    - 2. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi
    - Intensitas pertanyaan masyarakat terhadap penjelasan informasi program
- (3) Variabel Sumber daya secara operasional dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut:
  - a. Staf,diukur melalui
    - 1. Kecukupan jumlah staf

- 2. Tingkat pengetahuan terhadap program kebijakan
- 3. Tingkat keterampilan pengunaan alat dalam pelaksanaan tugas
- 4. Pengalaman dalam melaksanakan tugas
- Pendidikan yang dimiliki ( pendidikan umum mapun teknis yang berhubungan dengan tugas)
- Informasi, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan serta informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, diukur melalui
  - Kepatuhan petugas terhadap peraturan dalam pensertipikatan bidang tanah
  - 2. Pelaksanaan tahapan tahapan dalam proses pensertipikatan tanah
  - 3. Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan
- c. Wewenang, diukur melalui
  - 1. Koordinasi antar pelaksana kebijakan
  - 2. Tingkat pembagian kewenangan antar pelaksana
- d. Fasilitas, diukur melalui
  - 1. Kecukupan jumlah peralatan untuk melaksanakan tugas kebijakan
  - 2. Kondisi peralatan untuk melaksanakan tugas kebijakan
- e. Finansial, diukur melalui kecukupan anggaran yang disediakan
- f. Waktu, diukur melalui
  - 1. Kecukupan waktu untuk menyelesaikan program

Berdasarkan definisi konsep, operasional dan variabel yang telah disajikan, peneliti dapat menyajikan ringkasannya sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Konsep, Variabel, Indikator dan Item

No.	Konsep	Variabel	Indikator	ltem
1	Implementasi	Implementasi Rencana strategis	Peningkatan cakupan peta dasar pendaftaran	1. Luas cakupan peta dasar pendaftaran 2. Tingkat kualitas peta dasar pendaftaran 3. Kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah 4. Tingkat kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan
			Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat	<ol> <li>Jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan, termasuk juga tanah milik keraton</li> <li>Kecepatan legalisasi aset khususnya dipedesaan</li> <li>Jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun</li> <li>Jumlah penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan</li> <li>Sesuai ketentuan (1 hamparan, warga miskin dll)</li> </ol>
2	Faktor Berpengaruh (Edward III)	Komunikasi level I, II dan III	Transmisi	Keragaman media penyampai informasi     Intensitas sosialisasi program kebijakan     Tingkat pemerataan sosialisasi     Tingkat kelancaran

No.	Konsep	Variabel	Indikator	Item
				penyampaian informasi
			Konsistensi	Ketetapan informasi
			Kejelasan	1. Kejelasan informasi 2. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi 3. Intensitas pertanyaan masyarakat terhadap penjelasan informasi program
		Sumber Daya	Staf	1. Kecukupan jumlah staf 2. Tingkat pengetahuan terhadap program kebijakan 3. Tingkat keterampilan pengunaan alat dalam pelaksanaan tugas 4. Pengalaman dalam melaksanakan tugas 5. Pendidikan yang dimiliki (pendidikan umum mapun teknis yang berhubungan dengan tugas)
			Informasi (informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan serta informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi)	1. Kepatuhan petugas terhadap peraturan dalam pensertipikatan bidang tanah  2. Pelaksanaan tahapan – tahapan dalam proses pensertipikatan tanah  3. Informasi yang

No.	Konsep	Variabel	Indikator	Item
				berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan
			Wewenang	Koordinasi antar pelaksana kebijakan     Tingkat pembagian kewenangan antar pelaksana
			Fasilitas	Kecukupan jumlah peralatan untuk melaksanakan tugas kebijakan     Kondisi peralatan untuk melaksanakan tugas kebijakan
			Finansial	Kecukupan     anggaran yang     disediakan
			Waktu	Kecukupan waktu untuk menyelesaikan program

## 4.3 Populasi dan Sampel

## 4.3.1 Populasi

Populasi merupakan subyek penelitian. "Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri - cirinya akan diduga". (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989). Populasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu populasi sampling dan populasi sasaran. Untuk membedakan populasi sampling dengan populasi sasaran, dapat dijelaskan apabila peneliti mengambil rumah tangga sebagai sampel, sedangkan yang diteliti adalah anggota rumah tangga yang bekerja sebagai petani. Dalam hal ini seluruh rumah tangga di dalam wilayah

penelitian adalah populasi sampling, sedangkan seluruh petani dalam wilayah penelitian disebut populasi sasaran (Palte, 1978 dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989)

Berdasarkan penjelasan tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) populasi sampling yaitu kantor pertanahan Kabupaten Bantul;
- (2) populasi sasaran yaitu individu individu atau para pegawai yang ada di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bantul

# 4.3.2. **Sampel**

"Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki tersebut". (Sutrisno Hadi, 1986). Berdasarkan pendapat dari Singarimbun dan Effendi, sampel sebagai sebuah himpunan merupakan bagian dari sebuah populasi, tetapi sebagian dari populasi yang diambil dengan cara – cara yang tidak sesuai dan tidak benar tidak dapat disebut sebagai sampel. (Singarimbun dan Effendi, 1987).

"Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan sebagai mana berikut ini :

## (1) Probability Sampling

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi:

## (a) Simple random sampling

Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

### (b) Proportionate stratified random sampling

Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.

### (c) Disproportionate stratified random sampling

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional.

## (d) Cluster sampling

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.

## (2) Nonprobability Sampling

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang / kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi:

## (a) Sampling sistematis

Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut.

## (b) Sampling kuota

Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.

# (c) Sampling insidental

lalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan insidental bertemu dengan peenliti dapat digunakan sebagai sampel.

## (d) Sampling purposive

Yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

## (e) Sampling jenuh

Disebut teknik penentuan sampel jenuh apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

### (f) Snowball sampling

Yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar". (Sugiyono, 2010).

Dalam penentuan ukuran sampel sebenarnya tidak ada aturan yang tegas berapa jumlah sampel yang harus diambil dari populasi yang tersedia. Tidak ada pula batasan yang pasti dan jelas apa yang dimaksud dengan sampel besar dan sampel yang kecil (Arsyad, 2001). Namun Masri Singarimbun dan Sofian Effendi berpendapat, "dalam hal menentukan ukuran / jumlah sampel akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang terdiri dari : (1) derajat keseragaman dari populasi; (2) presisi yang dikehendaki dalam penelitian;(3) rencana analisa; (4) tenaga, biaya dan waktu. (Singarimbun dan Effendi ,1989)

Sebagaimana yang dikembangkan oleh Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (1992), "penentuan jumlah sampel mengikuti aturan sebagai berikut:

- (1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
- (2) Apabila sampel dibagi dalam kategori (misalnya : pria-wanita, pegawai negeri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
- (3) Jika dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = 10 x 5 = 50

(4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masingmasing antara 10 s/d 20".

Walaupun besarnya sampel didasarkan atas 4 (empat) pertimbangan seperti penjelasan Masri Singarimbun dan Sofian Effendi di atas, tetapi peneliti harus bisa memperkirakan besarnya sampel yang akan diambil sehingga presisinya tepat, sebagai jaminan tingkat kebenaran hasil penelitian. Jadi peneliti sendiri yang menentukan tingkat presisi yang dikehendaki, dan berdasarkan presisi tersebut dapat ditentukan besarnya sampel. Tingkat besar kecilnya presisi biasanya dinyatakan dalam taraf signifikansi ( ). Dalam penelitian sosial taraf signifikansi biasanya bernilai 0,05 atau (5%), oleh karena itu keakuratan hasil penelitiannya (selang kepercayaannya) yakni 1– = 95%.

Berdasarkan penjelasan terkait tingkat presisi yang diinginkan, penetapan ukuran sampel dari populasi dapat juga menggunakan rumus dari Taro Yamane (1967) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = batas toleransi kesalahan pengambilan sampel yang digunakan.

1 = bilangan konstan

Penentuan sampel dalam penelitian dilakukan dengan teknik probability sampling sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono yaitu, "teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel". (Sugiyono, 2010). Selanjutnya

dipilihlah Simple random sampling, dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan acak dan tidak memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang tersedia.

Untuk penentuan jumlah sampel mengikuti pendapat dari Taro Yamane didapat sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi yaitu 113

d = batas toleransi kesalahan pengambilan sampel yang digunakan (5% dengan tingkat kepercayaan 95%,

Sehingga jumlah sampel yang diperlukan adalah

$$n = \frac{113}{113 \times (0.05)^2 + 1} = 88,11 \text{ sampel atau dibulatkan menjadi } 88 \text{ sampel}$$

maka jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 88 buah sampel

## 4.4 Pengumpulan Data

Berdasarkan perolehan sumber datanya, pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Sugiyono (2006), "sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data". Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai dasar pengujian hipotesis serta menggunakan data sekunder sebagai bahan pelengkap dalam analisa hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan kuesioner. "Pada jenis penelitian survai penggunaan kuesioner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan data". (Singarimbun dan Effendi, 1989). Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder digunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan terhadap dokumen pendukung implementasi renstra pendaftaran tanah (data realisasi program/kegiatan, data target program / kegiatan, struktur organisasi ), dokumen kepegawaian (jumlah pegawai kantor Pertanahan, data pendidikan pegawai kantor pertanahan, dan data masa kerja pegawai kantor pertanahan) serta bahan-bahan lain dari sumber yang relevan selama penelitian ini berlangsung Wawancara dilakukan terhadap sampel terkait dan hanya dilakukan apabila diperlukan untuk melengkapi data sekunder.

## 4.5 Skala Pengukuran Instrumen Penelitian

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan skala pengukuran dan diberi skor. Penelitian ini menggunakan *skala Likert* yang dimodifikasi, yaitu dari 1 sampai 5. "Skala Likert yakni skala yang mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang mengenai suatu kejadian atau gejala sosial". (Riduwan, 2009). Menurut pendapat dari Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1984) dalam mengukur kepentingan, sikap atau persepsi maka tingkat pengukuran yang dilakukan masuk dalam kategori tingkat ukuran ordinal. Karena dalam analisi jalur diperlukan data interval maka dalam penelitian ini penulis melakukan transformasi / merubah data dari data berskala *likert* menjadi data interval dengan menggunakan *Metode Suksesive Interval* (MSI).

Untuk setiap jawaban dari responden akan dibagi menjadi 5 (lima) kategori, dengan kategori semua jawaban positif yaitu :

- a. Jawaban sangat setuju / sangat baik diberi nilai 5
- b. Jawaban setuju / baik diberi nilai 4
- c. Jawaban netral / cukup baik diberi nilai 3
- d. Jawaban kurang setuju / kurang baik dibri nilai 2
- e. Jawaban sangat tidak baik diberi nilai 1.

#### 4.6 Validitas dan Realibilitas

Melakukan pengujian pada kuesioner atau angket sebelum angket tersebut disebarkan merupakan suatu hal yang penting untuk memastikan pertanyaan yang terdapat pada angket dapat dimengerti oleh responden (Sekaran, 2000). "Pretest dilakukan untuk menyempurnakan kuesioner". (Singarimbun dan Effendi, 1989). Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989) mengatakan, "jumlah responden untuk uji coba (pretest) disarankan berjumlah minimal 30 orang. Dengan jumlah minimal 30 orang ini, maka distribusi skor (nilai) akan lebih mendekati kurva normal". Asumsi kurva normal sangat diperlukan dalam perhitungan statistik, sehingga pretest dalam penelitian ini dilakukan dengan jumlah 30 orang dengan taraf signifikansi sebesar 5 %. Pretest meliputi uji validitas dan reliabilitas.

Ada beberapa definisi tentang validitas diantaranya menurut Fraenkel (1993) dikatakan bahwa, validitas menunjukkan kesamaan, pengertian maupun penggunaan masing-masing peneliti yang berbeda dalam mengumpulkan data. "Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur". (Singarimbun dan Effendi, 1989). Untuk mendapatkan data yang valid dalam metode kuantitatif diperlukan instrumen yang valid, oleh

karenanya diperlukan uji validitas instrumen. "Validitas instrumen menggambarkan tingkat instrumen yang mampu mengukur apa yang akan diukur". (Arikunto, 2003).

Didalam penelitian ini uji validitas item dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi computer *SPSS 16.0.* Sedangkan model statistika yang digunakan yaitu Uji Korelasi *Pearson Product Moment.* Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh akan dilakukan perbandingkan dengan angka kritik pada tabel korelasi nilai – r. Tabel bersumber dari Fisher dan Yates, " *Statistical tables for biological agricultural and medical research* yang dikutip dari R.P Kolstoe (1973), *Introduction to Statistic for the Behavioral Sciences* dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989). Cara melihat angka kritik adalah dengan melihat baris N-2 (Singarimbun dan Effendi ,1989). N adalah jumlah responden. Berikut ini hasil uji validitas instrumen penelitian sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Item	Angka Korelasi	Angka Kritik Tabel	Kesimpulan
X1.1		Keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dengan bawahan	0.585		Valid
X1.2	Komunikasi	Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah pegawai yang tersosialisasikan) antara atasan dengan bawahan	0.693	0.361	Valid
X1.3	Level I	Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara atasan dengan bawahan	0.695		Valid
X1.4		Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan	0.396		Valid

No	Variabel	ltem	Angka Korelasi	Angka Kritik Tabel	Kesimpulan
X2.1		Keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran	0.617		Valid
X2.2	Komunikasi Level II	Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah pegawai yang tersosialisasikan) antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran	0.694		Valid
X2.3		Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran	0.705		Valid
X2.4		Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran	0.613		Valid
X3.1		Keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait	0.78		Valid
X3.2	Komunikasi Level III	Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah pegawai yang tersosialisasikan) antara kantor pertanahan dengan instansi terkait	0.825		Valid
X3.3		Ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait	0.408	0.361	Valid
X3.4		Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait	0.45		Valid
Z.1	Sumber Daya	Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana renstra	0.51		Valid
Z.2		Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan dalam implementasi renstra	0.519		Valid
Z.3		Tahapan-tahapan dalam	0.674		Valid

No	Variabel	Item	Angka Korelasi	Angka Kritik Tabel	Kesimpulan
		proses pensertipikatan tanah			
Z.4		Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra	0.503		Valid
Z.5		Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana	0.568		Valid
Z.6		Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana	0.759		Valid
Z.7		Jumlah anggaran dalam implementasi renstra	0.802		Valid
Z.8		Waktu yang tersedia	0.641		Valid
Y.1		Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan sesuai target	0.751		Valid
Y.2		Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran sesuai target	0.716		Valid
Y.3		Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah	0.615		Valid
Y.4		Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan	0.405		Valid
Y.5	Implementasi Renstra	Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan	0.54	0.361	Valid
Y.6		Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran sesuai target	0.392		Valid
Y.7		Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun	0.625		Valid
Y.8		Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan	0.467		Valid
Y.9		Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal	0.531		Valid

Sumber: Output SPSS 16.0, 2017

Sedangkan reliabilitas menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989) adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu

hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dikatakan reliabel bila diteliti oleh peneliti yang berbeda diperoleh data yang sama, begitu juga bila dilakukan dalam waktu yang tidak sama didapat data yang sama, tentunya berkenaan pada sampel yang sama. Reliabilitas menurut Fraenkel (1993) adalah konsistensi skor, dan stabilitas data dari instrument penelitian.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengukuran ulang, berdasarkan pendapat dari Anastasi (1973) dalam Singarimbun dan Effendi (1989). Untuk mengetahui reliabilitas dilakukan dengan meminta responden yang sama agar menjawab semua pertanyaan dalam alat pengukur sebanyak 2 (dua) kali. Selang waktu antara 15 - 30 hari. Hasil pengukuran pertama dan ke dua dikorelasikan dengan teknik Korelasi *Pearson Product Moment* seperti pada perhitungan validasi di atas. Apabila angka korelasi yang diperoleh melebihi angka kritik dalam table nilai r, maka korelasi tersebut significant. Hal ini berarti hasil pengukuran pertama dan pengukuran ke dua relative konsisten. Dengan demikian skala pengukur yang disusun adalah reliabel. Dan sebaliknya apabila angka korelasi yang diperoleh di bawah angka kritik dalam tabel, hasil pengukuran pertama dan kedua tidak konsisten. Alat pengukur tersebut dianggap tidak reliabel. Hail uji reliabilitas ditunjukaan dalam tabel 4.3

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Angka Korelasi	Angka Kritik Tabel	Kesimpulan
Komunikasi Level I	0.381		Reliabel
Komunikasi Level II	0.449		Reliabel
Komunikasi Level III	0.462	0.361	Reliabel
Sumber Daya	0.416		Reliabel
Implementasi Renstra	0.459		Reliabel

Sumber: Output SPSS 16.0, 2017

### 4.7 Uji Asumsi Klasik

Metode analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisa jalur (Path Analysis). Menurut Rutherford (1993) dalam Sarwono (2007), analisis jalur dapat didefinisikan sebagai suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel eksogennya mempengaruhi variabel endogen tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Analisis jalur merupakan perluasan dari regresi linier berganda, dan yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks (Streiner, 2005). Sedangkan menurut Paul Webley (1997), analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (magnitude) dan signifikansi (significance) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangakat variabel. Dari definisi-definisi di atas dapat dsimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda.

Model regresi linear berganda dapat dikatakan sebagai model yang baik apabila memenuhi kriteria Best Linier Unbiassed Estimator (BLUE). BLUE dapat tercapai apabila memenuhi asumsi klasik. Ada 5 (lima) uji asumsi yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi tersebut yaitu uji normalitas, uji

autokorelasi, uji linearitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. (Setyadharma, 2010). Hal ini sesuai dengan pendapat Olabatuyi tentang syarat penggunaan analisa jalur yang menyatakan "the assumptions for path analysis included linearity, interval level of measurement, normality and autocorrelatin". (Olabatuyi, 2006). Namun autokorelasi bisa diabaikan apabila data yang dipakai adalah data cross section bukan time series (Stokes, 1997; Amstrong, 2001; Doane, Seward, 2008; Verbeek, 2008 dan Abrams, 2010).

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas maka uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, ,Uji Heteroskedastisitas dan Homokedastisitas serta Uji Linearitas . Adapun uji asumsi klasik akan dilakukan dengan menggunakan teknik statistik dengan bantuan progam aplikasi komputer *SPSS 16.0*.

## 4.7.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual terstandarisasi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Ketidaknormalan disebabkan adanya nilai ekstrim dalam data yang diambil. Model regresi yang baik diantaranya adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Cara mendeteksi apakah distribusi datanya normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan gambar atau menggunakan angka.

Uji normalitas dengan menggunakan angka dapat dilakukan dengan dengan beberapa cara antara lain dengan menggunakan uji *Kolmogrorov-Sminov*. Uji ini merupakan pengujian normalitas yang banyak digunakan dalam uji statistik. Kelebihan uji *Kolmogrorov-Sminov* adalah simpel dan tidak membuat penafsiran yang berbeda diantara peneliti yang sering terjadi pada uji dengan menggunakan grafik. Dasar pengambilan keputusan apabila nilai sig. > 0.05

maka tidak signifikan yang berarti data relatif sama dengan rata-rata sehingga disebut normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas dengan angka

Uji Statistik	Unstandardized Residual	Angka Kritik	Kesimpulan
Kolmogorov- SmirnovZ	1.045		Berdistribusi
Signifikansi	0.225		Normal

Sumber: Output SPSS 16.0, 2017

Uji normalitas menggunakan gambar yaitu menggunakan kurva regression residual dan normal p-plot regression. Jika kurva regression residual terstandarisasi maka akan membentuk gambar lonceng. Untuk mengetahui normal tidaknya distribusi datanya dapat diidentifikasi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik p-plot regression. "Dasar pengambilan keputusan dari grafik p-plot regression adalah:

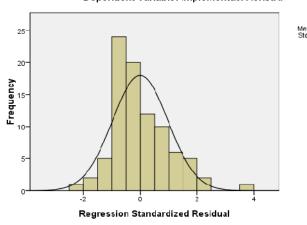
- Jika garis menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal maka model regresi dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas". (Ghozali, 2006).

Gambar 4.1 membentuk gambar lonceng yang menujukkan bahwa kurva regression residual terstandarisasi berdistribusi normal. Sedangkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal , sehingga model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1 Hasil uji Normalitas menggunakan kurva regression residual

#### Histogram

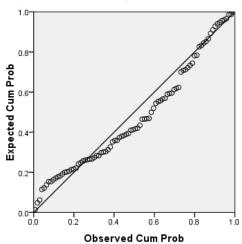
# Dependent Variable: Implementasi Renstra



Sumber: Output SPSS 16.0, 2017

Gambar 4.2 Hasil uji Normalitas dengan normal p-plot regression Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

#### Dependent Variable: Implementasi Renstra



Sumber: Output SPSS 16.0, 2017

#### 4.7.2 Uji Multikolinearitas

"Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi". (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel bebas / independen. Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan (a) melihat nilai *tolerian* dan *Varian Infloating Factor (VIF)*, (b) melihat *Eigenvalues* dan *Condition Index*, dan (c) melihat korelasi parsial.

Pengujian Multikolinearitas dengan melihat nilai tolerian dan Varian Infloating Factor (VIF) menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dasar pengambilan keputusan adalah bahwa dalam model regresi tidak terjadi Multikolinearitas adalah nilai toleran value lebih tinggi daripada 0.10 dan VIF lebih kecil daripada 10.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikoleniaritas

No	Variabel	Angka Toleran	Angka Kritik Tabel	Angka VIF	Angka Kritik Tabel	Kesimpulan
X1	Komunikasi Level I	0.918		1.089		
X2	Komunikasi Level II	0.97	0.01	1.031	10	Bebas
ХЗ	Komunikasi Level III	0.922		1.085		Multikolinieritas
Z	Sumber Daya	0.883		1.133		

Sumber: Output SPSS 16.0, 2017

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diuji memiliki nilai toleran value > 0.01 serta angka VIF < 10 sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi Multikolinearitas

# 4.7.3 Uji Heteroskedastisitas dan Homokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebas.

Dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan gambar dan angka. Syarat uji regresi adalah tidak ada heteroskedastisitas. Homokedastisitas berarti tidak terjadi hubungan antara nilai residu dengan variabel bebas sehingga variabel terikat hanya benar-benar dijelaskan oleh variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas yang menggunakan gambar dapat dilihat dari gambar *Scatter plot*. Jika gambar tersebut acak berarti bebas dari Heteroskedastisitas dan memenuhi Homokedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dengan angka dilakukan dengan beberapa cara antara lain: (a) Uji *Park*, yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai log-linier kuadrat; (b) Uji *Glejser*, yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai residual mutlaknya; (c) Uji Korelasi *Rank Spearman*, yaitu mengkorelasikan nilai residual dengan variabel bebas dengan menggunakan *Rank Spearman*.

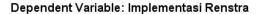
Tabel 4.6 **Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan** *Rank Spearman* 

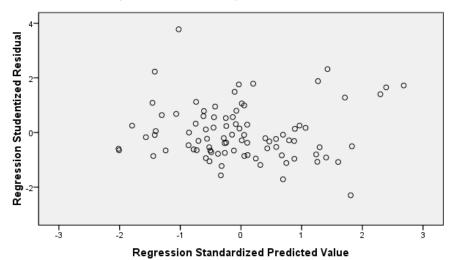
No	Variabel	Unstandardized Residual	Angka Kritik Tabel	Kesimpulan	
X1	Komunikasi Level I	0.479			
X2	Komunikasi Level II	0.799	0.05	Bebas	
Х3	Komunikasi Level III	0.526	0.05	Heteroskedastisitas	
Z	Sumber Daya	0.783			

Sumber: Output SPSS 16.0, 2017

Semua variabel yang diuji memiliki angka Unstandardized Residual > 0.05 sehingga artinya model regresi bebas dari heterokedastisitas dan memenuhi asumsi homokedastisitas.

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas yang menggunakan scatter plot
Scatterplot





Sumber: Output SPSS 16.0, 2017

Dari scatter plot diatas dapat kita gambarkan hal hal sebagai berikut :

- Titik titik data menyebar di seluruh diagram kartesius tidak hanya disekitar angka 0
- b. Titik titik tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja
- Penyebaran titik- titik data tidak membentuk pola tertentu seperti bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- d. Penyebaran titik titik data tidak berpola

Sehingga dapat disimpulkan gambar tersebut acak berarti bebas dari Heteroskedastisitas dan memenuhi Homokedastisitas hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi

## 4.7.4 Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk menguji apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Seperti pada penjelasan diatas, bahwa uji lineritas ini diperlukan sebagai syarat dalam analisa jalur

Tabel 4.7 Hasil Uji Linearitas

No	Hubungan	Nilai Sig. Deviation from Linearity	Nilai Sig. Linearity	Angka Kritik	Kesimpulan
					Ada Hubungan Linier
1	X1 dengan Z	0.274	0.015		kuat
					Ada Hubungan Linier
2	X2 dengan Z	0.303	0.338		tidak cukup kuat
					Ada Hubungan Linier
3	X3 dengan Z	0.191	0.046		kuat
4	X1 dengan Y	0.674	0.006	0.05	Ada Hubungan Linier kuat
					Ada Hubungan Linier
5	X2 dengan Y	0.516	0.019		kuat
					Ada Hubungan Linier
6	X3 dengan Y	0.513	0.168		tidak cukup kuat
					Ada Hubungan Linier
7	Z dengan Y	0.755	0.035		kuat

Sumber: Output SPSS 16.0, 2017

Dari tabel 4.7 hasil uji linearitas menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji memiliki nilai signifikansi Deviation from Linearity > 0.05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antar variabel yang diuji ada hubungan linier, sehingga telah memenuhi asumsi model regresi linier berganda dan analisa jalur. Informasi tambahan menunjukkan bahwa ada 2 hubungan variabel yaitu nomor 2 dan 6 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi Linearity > 0.05 sehingga hubungan antar vareabel tersebut dikatakan tidak cukup kuat.

#### 4.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bantul. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan metode *purposive*. Hal tersebut didukung dengan pendapat Antara dalam Eni Ndae yang menyatakan bahwa, "metode *purposive* 

adalah suatu teknik penentuan lokasi penelitian secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu". (Antara, 2009 dalam Eni Ndae, 2011). Adapun pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

- Luas wilayah yang belum dilakukan pendaftaran tanah sebanyak 40,52 % dari total wilayah di Kabupaten Bantul;
- (2) Adanya isu strategis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, dan di Kabupaten Bantul pada khususnya terkait keberadaan tanah milik kesultanan dan pakualam yang belum tersentuh pendaftaran tanah sehingga jumlah dan luas bidang tanah yang bersangkutan belum teridentifikasi dengan tepat;
- (3) Belum pernah dilakukan penelitian terkait faktor faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis bidang pendaftran tanah di Kabupaten Bantul.

## 4.9 Analisis Data

Menurut Singarimbun (2001), analisis data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Karena data yang digunakan adalah data kuantitatif maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia (Sugiyono, 2006). Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis dengan bantuan progam aplikasi komputer SPSS 16.0. Ada dua model pengolahan dan analisa data statistik untuk penelitian sosial yaitu dengan menggunakan analisa statistik deskriptif dan analisa statistik inferensial (Bungin, 2005). Pengolahan dan analisa data statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan sosial apa adanya tanpa melihat hubungan yang ada. Penyajian data dalam

analisa statistik deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, frekuensi, grafik, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, serta perhitungan persentase dan lain sebagainya (Bungin, 2005).

Didalam penelitian ini analisa kuantitatif deskriptif dilakukan untuk menggambarkan bagaimana implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah di kabupaten bantul serta bagaimana gambaran faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Adapun pengolahan dan analisa statistik inferensial digunakan untuk melihat hubungan antara 2 (dua) variabel atau lebih yang akan digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh faktor - faktor tersebut dalam proses implementasi rencana strategis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

"Statistik inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random". (Sugiyono,2012). Metode analisis statistik yang digunakan dalam statistik inferensial pada penelitian ini adalah dengan analisa jalur (Path Analysis). Menurut Robert D. Rutherford (1993) dalam Jonathan Sarwono (2007), analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel eksogennya mempengaruhi variabel endogen tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Analisis jalur merupakan perluasan dari regresi linier berganda, dan yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks (Streiner, 2005). Sedangkan menurut Jonathan Sarwono (2011), "analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan

menggunakan koefesien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen exogenous terhadap variabel dependen endogenous". Kekuatan analisis jalur terletak pada kemampuannya untuk menguraikan hubungan antar variabel dan untuk menguji kredibilitas teoritis (atau model), yang menggunakan teknik statistik didasarkan pada sejumlah asumsi yang sangat ketat. (Pedhazur, 1982). Karena Hipotesa yang akan diuji dalam penelitian yang akan dilakukan ini untuk menganalisa hubungan sebab akibat antar variabel, kemudian adanya variabel perantara yang mengakibatkan ada pengaruh baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis berpendapat analisa jalur cocok digunakan untuk analisa data penelitian.

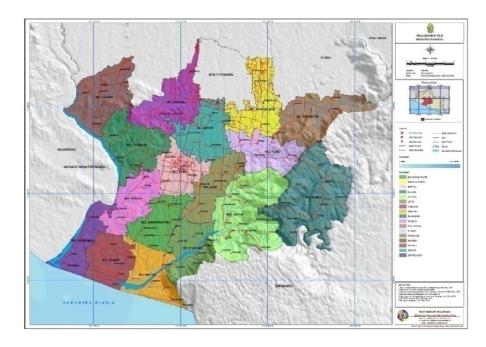
#### BAB V

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# 5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 5.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten dibagian selatan dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas administrasi Sebelah utara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah Selatan Samudera Indonesia, sebelah timur Kabupaten Gunungkidul, sebelah barat Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan,75 Desa, 935 Dusun, 2.211 RW, 5.483 RT.



Gambar 5.1 Peta administrasi Kabupaten Bantul

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017

Kabupaten Bantul terletak pada posisi 110°12′34″ - 1100 31′08″ BT dan 7° 44′04″ - 8°00′27″ LS seluas 50.685 Ha atau 506,85 Km². Dari 17 wilayah kecamatan, wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Dlingo seluas 5.587 Ha atau 11,02 % dan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan seluas 1.832 Ha atau 3,61 % dari luas seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Selanjutnya untuk lebih jelas mengenai luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Luas Wilayah Dan Bidang Tanah Di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	Jumi	lah	Jumlah	
		Bidang	%	M <sup>2</sup>	%
1.	Kabupaten Bantul	566.541	100	506.850.000	100
2.	Tanah Terdaftar				
	<ul><li>Hak Milik</li></ul>	475.002	83,84	291.754.101	57,45
	<ul> <li>Hak Guna Bangunan</li> </ul>	18.281	3,23	7.058.492	1,39
	<ul><li>Hak Pakai</li></ul>	3.192	0,56	8.722.607	1,72
	<ul><li>Hak Lainnya</li><li>(HPL, Sarusun)</li></ul>	11	0,002	2.433.413	0,48
	<ul><li>Wakaf</li></ul>	1.461	0,26	355.459	0,07
Jumlah		497.947	87,89	310.324.072	61,23
3.	Tanah Belum Terdaftar	68.594	12,11	196.525.928	38,77

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul dan Kantor Pertanahan Kab. Bantul Tahun 2016

Berdasarkan data Buku Dalam Angka Kabupaten Bantul Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2015 tercatat 971.511 jiwa dengan presentase jumlah penduduk laki-laki 49,56 % dan penduduk perempuan 50,44 % dengan kepadatan penduduk 1.917 jiwa per Km². Dengan penyebaran jumlah tertinggi di Kecamatan Banguntapan sejumlah 4.771 jiwa per Km² dan jumlah

terendah di Kecamatan Dlingo sejumlah 653 jiwa per Km². Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Bantul

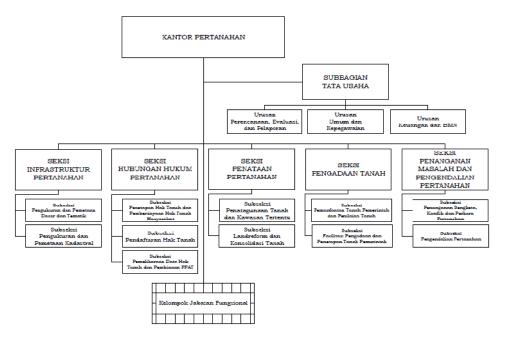
No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.422	14.708	29.130
2.	Sanden	14.766	15.348	30.114
3.	Kretek	14.476	15.635	30.111
4.	Pundong	15.768	16.553	32.321
5.	Bambanglipuro	18.817	19.389	38.206
6.	Pandak	24.384	24.566	48.950
7.	Bantul	30.726	31.402	62.128
8.	Jetis	26.724	27.509	54.233
9.	Imogiri	28.672	29.410	58.082
10.	Dlingo	17.941	18.524	36.465
11.	Pleret	22.946	23.112	46.058
12.	Piyungan	26.350	27.072	53.422
13.	Banguntapan	68.068	67.820	135.888
14.	Sewon	56.506	55.998	112.504
15.	Kasihan	60.713	61.610	122.323
16.	Pajangan	17.291	17.762	35.053
17.	Sedayu	22.940	23.583	46.523
Jum	lah	481.510	490.001	971.511

Sumber: Buku Bantul Dalam Angka Tahun 2016

# 5.1.2 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bantul yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Sesuai Peraturan Presiden RI No 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, jo Peraturan Presiden RI No 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang dalam Pasal 7 antara lain dinyatakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kota, jo Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 167/KEP-7.1/VI/2015 tentang Hubungan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pusat dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional diwilayah kerja Kabupaten Bantul. Untuk lebih jelas mengenai susunan struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 5.2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2017

Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- (b) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- (c) Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- (d) Pelaksanaan penataan pertanahan;
- (e) Pelaksanaan pengadaan tanah;
- (f) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- (g) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia per Juni 2017 sebanyak 113 orang, terdiri dari 87 Pegawai Negeri Sipil dan 26 Pegawai Tidak Tetap. Rincian sumber daya kantor pertanahan Kabupaten Bantul berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3 SDM Kantor Pertanahan Kab. Bantul Berdasarkan Jenis Jabatan

		J	Jenis Jabatan PNS						
No.	Unit	Struktural	JFT	JFU	Jumlah	PTT			
		(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)			
1.	Tata Usaha	4	-	12	16	2			
2.	SPP	3	4	19	26	10			
3.	HT&PT	5	-	23	28	10			
4.	PPP	3	1	4	8	4			
5.	PPM	3	-	2	5				
6.	SKP	3	-	1	4				
Jumlah		21	5	61	87	26			

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah tersebut dapat dirinci dalam tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.4 SDM Kantor Pertanahan Kab. Bantul Berdasarkan Jenjang Pendidikan

			Jenjang Pendidikan						
No.	Unit	S2	S1/DIV	DIII	DI	SLTA	SLTP	SD	(orang)
1	Tata Usaha	1	7	2	1	7	-	-	18
2	SPP	2	16	5	3	6	3	1	36
3	HT&PT	-	24	3	-	7	3	-	37
4	PPP	-	8	-	-	5	-	-	13
5	PPM	1	4	-	-	-	-	-	5
6	SKP	2	1	-	-	1	-	-	4
Jum	lah	6	60	10	4	26	6	1	113

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui bahwa dari segi pendidikan, Kantor pertanahan Kabupaten Bantul memiliki SDM yang mumpuni, hal ini dapat dilihat bahwa 80 orang dari 113 ( 70.8 %) berpendidikan lulusan perguruan tinggi, 26 orang (23%) berpendidikan SMA dan hanya 7 orang (6,2%) yang berpendidikan SLTP dan SD.

Dari jumlah SDM khusus Pegawai Negeri Sipil dapat dirinci berdasarkan golongan sebagaimana digambarkan dalam tabel 5.5 berikut ini :

Tabel 5.5 SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Berdasarkan Golongan PNS

No.	Unit	Golongan					
		IV	III	II	I	(orang)	
1.	Tata Usaha	1	11	4	-	16	
2.	SPP	1	22	3	-	26	
3.	HT&PT	-	25	3	-	28	
4.	PPP	-	8	-	-	8	
5.	PPM	1	4	-	-	5	
6.	SKP	1	3	-	-	4	
Jumlah		4	73	10	0	87	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Jumlah Sumber daya manusia dari seluruh pegawai yang ada berdasarkan usia, dapat dirinci dalam tabel 5.6 sebagai berikut :

Tabel 5.6 SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Berdasarkan Usia

No.	Unit	Usia (tahun)					
		< 25	25-34	35-45	45-56	> 56	
1.	Tata Usaha	-	6	4	7	1	
2.	SPP	1	10	10 7		9	
3.	HT&PT	-	9	7	21	1	
4.	PPP	-	3	3	4	2	
5.	PPM	-	2	-	3	-	
6.	SKP	-	-	-	4	-	
Jumlah		1	30	21	48	13	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Jumlah pegawai dengan kategori usia lanjut (>56 tahun), sesuai Undang-Undang No.4 tahun 1965 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berjumlah 13 orang (11,5 %). Saparinah (1983) berpendapat bahwa pada usia 55 sampai 65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap praenisium pada tahap ini akan mengalami berbagai penurunan daya tahan tubuh/kesehatan dan berbagai tekanan psikologis. Walaupun ada perbedaan 1 tahun dalam pengelompokan usia antara Undang-Undang No.4 tahun 1965 dengan Saparinah (1983), dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan usia > 56 tahun secara teori sudah tidak produktif untuk bekerja. Kondisi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul ada 100 orang (85,5 %) pegawai dengan usia dibawah 56 tahun sehingga secara teori dapat dikatakan produktif dalam melaksanakan pekerjaannya.

Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin, dari jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.7 SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit	Jenis Kelamin					
	Oint	Laki-laki	Perempuan				
1.	Tata Usaha	10	8				
2.	SPP	24	10				
3.	HT&PT	18	22				
4.	PPP	6	6				
5.	PPM	2	3				
6.	SKP	4	-				
Jumlah		64	49				

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Penelitian juga menggungkapkan proyeksi beberapa tahun ke depan terkait kondisi petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten bantul sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.8 berikut :

Tabel 5.8 Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, kondisi s/d
Tahun 2020

-							
	No.	Tahun	Jumlah Petugas Ukur	Purna Tugas	Jumlah		
	1.	2015	20	-	20		
	2.	2016	20	4	16		
	3.	2017	16	4	12		
	4.	2018	12	3	9		
	5.	2019	9	1	8		
	6.	2020	8	0	8		

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Kondisi ini terjadi dengan catatan apabila belum ada penambahan penerimaan pegawai sampai dengan tahun 2020 (tahun prediksi).

## 5.2. Karakteristik Responden

Responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 88 responden yang dipilih secara acak. Setiap pegawai di Kantor

Pertanahan Kabupaten Bantul memiliki peluang yang sama untuk dijadikan responden. Hal ini dikarenakan karena berdasarkan fakta empris di lapangan, semua pegawai terlibat dalam pelaksanaan rencana strategis bidang pendaftaran tanah.

# 5.2.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

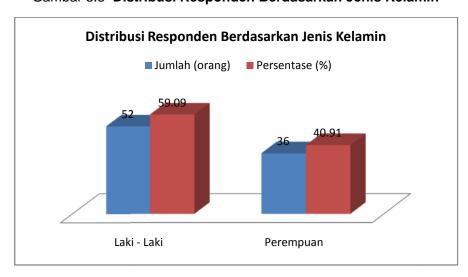
Berikut ini penulis sajikan kompilasi hasil pengolahan data primer penelitian terkait dengan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Hasil disajikan dalam bentuk tabel dan grafik agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Tabel 5.9 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki - Laki	52	59.09
2	Perempuan	36	40.91
Jumlah		88	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Gambar 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan di atas diketahui jumlah responden berjenis kelamin laki laki lebih banyak dari pada responden berjenis kelamin perempuan, yaitu 59.09 % berbanding 40.91 %. Hasil ini dapat diterima dikarenakan dengan teknik pengambilan sampel probability sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi, maka dengan mengadopsi teori matematika diketahui bahwa jumlah populasi yang lebih banyak akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih menjadi sampel. Jumlah pegawai berjenis kelamin laki - laki di kantor pertanahan Kabupaten Bantul lebih banyak dari pada jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan, sehingga pegawai berjenis kelamin laki-laki memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih menjadi sampel dari pada pegawai berjenis kelamin perempuan.

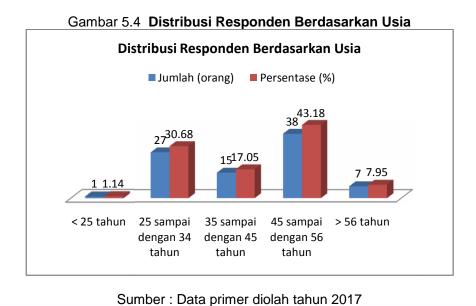
# 5.2.2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Selanjutnya distribusi responden berdasarkan usia disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.10 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Nomor	Usia Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	< 25 tahun	1	1.14
2	25 sampai dengan 34 tahun	27	30.68
3	35 sampai dengan 45 tahun	15	17.05
4	45 sampai dengan 56 tahun	38	43.18
5	> 56 tahun	7	7.95
Jumlah		88	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2017



Persentase tertinggi dari distribusi responden berdasarkan usia berada pada umur 45 -56 tahun, lalu pada umur 25 – 34 tahun dan 35 - 45 tahun. Fakta ini berbanding lurus dengan data kepegawaian di kantor pertanahan Kabupaten Bantul yaitu bahwa jumlah terbanyak sumber daya manusia di kabupaten bantul berdasarkan penggolongan usia berada pada angka tersebut. Sebagian besar responden berada pada usia produktif yaitu 81 orang ( 92 %).

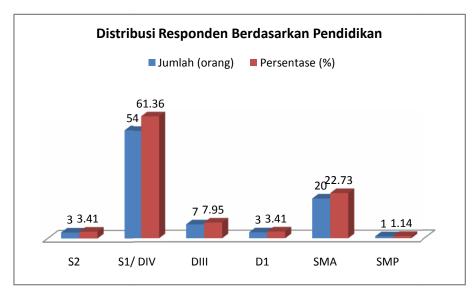
# 5.2.3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.11 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

	1 abot of the Distriction and the Distriction					
Nomor	Pendidikan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)			
1	S2	3	3.41			
2	S1/ DIV	54	61.36			
3	DIII	7	7.95			
4	D1	3	3.41			
5	SMA	20	22.73			
6	SMP	1	1.14			
Jumlah		88	100			

Sumber: Data primer diolah tahun 2017



Gambar 5.5 **Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan** 

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Apabila melihat tabel dan grafik di atas penulis berkeyakinan dengan apa yang responden isikan pada kuesioner akan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam kuesioner. Dengan jumlah persentase sebesar 61.36 % berpendidikan sarjana, 3.41 % berpendididkan S2, 3,41 berpendidikan Diploma 1 serta 22,73 % berpendidikan SMA maka dapat dikatakan mayoritas (98,86 %) responden memiliki kemampuan akademis yang tinggi. Sedangkan ada sebanyak 1.14 % atau sejumlah 1 orang responden yang berpendidikan SMP penulis berpendapat tidak akan menjadi kendala, karena fakta yang ada menunjukkan pegawai dengan pendidikan SMP tersebut memiliki umur di atas 56 tahun, sehingga telah kenyang pengalaman yang sangat membantu dalam pengisian kuesioner yang dibagikan.

# 5.2.4. Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

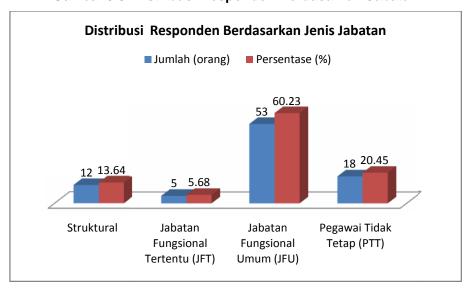
Distribusi responden yang diteliti apabila dilihat berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 5.12 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

Nomor	Jenis Jabatan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Struktural	12	13.64
2	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	5	5.68
3	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	53	60.23
4	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	18	20.45
Jumlah		88	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Gambar 5.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan



Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa sebanyak 53 orang atau 60.23 % responden berasal dari jabatan fungsional umum, 18 orang atau 20.45 % pegawai tidak tetap, 12 orang atau 13.64 % dari pejabat struktural dan 5 orang atau 5.68 persen dari jabatan fungsional umum. Sehingga dapat disimpulkan responden yang ada sudah tersebar merata untuk seluruh jabatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

#### 5.3. Gambaran Faktor Komunikasi dan Sumber Daya

Pada sub bab 5.3 ini akan disajikan bagaimana gambaran faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional bidang pendaftaran tanah berdasarkan persepsi dari responden yang dituangkan dalam kuesioner yang telah dibagikan dan diterima kembali oleh peneliti. Faktor yang dimaksud terdiri dari variabel komunikasi dan sumberdaya. Selanjutnya variabel komunikasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) komunikasi level yaitu komunikasi antara atasan dan bawahan); (2) komunikasi level II yaitu komunikasi antara Kantor Pertanahan dengan kelompok sasaran dan (3) komunikasi level III yaitu komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait. Sehingga ada 4 (empat) variabel yang akan dipersepsikan oleh responden yang selanjutnya akan disajikan oleh peneliti sebagai gambaran faktor yang mempengaruhi implementasi renstra.

#### 5.3.1 Komunikasi Level I (Komunikasi antara atasan dan bawahan)

Variabel komunikasi level I diukur dengan 4 (empat) item pertanyaan yaitu : (1) Keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dengan bawahan; (2) Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah pegawai yang tersosialisasikan) antara atasan dengan bawahan; (3) Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara atasan dengan bawahan serta (4) Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan.

Rekapitulasi hasil kuesioner yang telah dibagikan dan yang diterima kembali oleh peneliti disajikan dalam tabel 5.13

Tabel 5.13 Distribusi Frekuensi Responden terhadap Variabel Komunikasi Level I

	ltem		Jawaban Responden				Rata -	
No			STS	TS	cs	s	SS	Rata Item
V4.4	Keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dengan bawahan	Freq	0	6	21	27	34	4.04
X1.1		%	0	6.8	23.9	30.7	38.6	4.01
	Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah pegawai yang tersosialisasikan)	Freq	0	4	9	41	34	
X1.2								4.19
	antara atasan dengan bawahan	%	0	4.5	10.2	46.6	38.6	
	Ketetapan informasi	Freq	0	7	17	27	37	4.07
X1.3	(konsistennya informasi) antara atasan dengan bawahan	%	0	8	19.3	30.7	42	4.07
	Kejelasan informasi dan	Freq	0	0	3	31	54	
X1.4	penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara							4.58
	atasan dengan bawahan	%	0	0	3.4	35.2	61.4	
				a- Ra	ta Varia	abel		4.21

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Hasil persepsi responden terhadap variabel komunikasi level I selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

- (1) Jawaban responden untuk item keragaman dan kelancaran komunikasi terdiri dari :
  - a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 6 orang (6.8 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik. Persentase ini menempati urutan terendah dari total keseluruhan prosentase jawaban untuk item keragaman dan kelancaran komunikasi. Karena hanya sebagian kecil saja responden yang tidak setuju, kemungkinan hal ini disebabkan karena responden yang bersangkutan tidak mempunyai cukup perangkat berkomunikasi atau tidak aktif dalam berkomunikasi karena berbagai alasan, sehingga

- merasa keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan tidak terpenuhi dengan baik
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 21 orang (23.9%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 27 orang (30.7%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 34 orang (38.6%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik. Persentase ini menempati urutan tertinggi dari total keseluruhan prosentase jawaban untuk item keragaman dan kelancaran komunikasi.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik (rata-rata 4.01).Hal ini berarti secara keseluruhan responden secara aktif melakukan komunikasi antara atasan dan bawahan dengan berbagai ragam saluran yang ada dalam implementasi rensta
- (2) Jawaban responden untuk item Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dengan bawahan terdiri dari :

- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 4 orang (4.5 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 9 orang (10.2%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 41 orang (46.6%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik..
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 34 orang (38.6%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dan bawahan telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 4.19). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai jumlah pelaksanaan sosialisasi dan jumlah pegawai yang tersosialisasikan telah memadahi
- (3) Jawaban responden untuk item Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara atasan dengan bawahan terdiri dari :

- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 7 orang (8 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 17 orang (19.3%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 27 orang (30.7%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik..
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 37 orang (42%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara atasan dengan bawahan telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 4.07). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan antara atasan dan bawahan adalah konsisten dari waktu ke waktu.
- (4) Jawaban responden untuk item Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan terdiri dari:
  - a. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 3 orang (3.4%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra

- Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik
- b. Jawaban S (skor 4) sebanyak 31 orang (35.2%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 54 orang (61.4%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
- d. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan telah dilaksanakan dengan sangat baik. (rata-rata 4.58). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan antara atasan dan bawahan sangat jelas dipahami dan penggunaan bahasa juga tidak menjadi kendala sama sekali dalam komunikasi.
- (5) Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel komunikasi level I dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik dan menuju ke arah yang sangat baik (rata-rata 4.21).

Pola komunikasi level I di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada prakteknya dilaksanakan setiap hari dan intensif. Salah satu bentuk dari komunikasi tersebut berupa apel pagi yang dilaksanakan setiap hari. Apel pagi diisi dengan motivasi, arahan pelaksanaan tugas, perkembangan kebijakan dan peraturan serta evaluasi terhadap kinerja organisasi. Apa yang telah

dilaksanakan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sesuai dengan teori dan pendapat *Katz* dan *Kahn* (1966) yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan ke bawahan yaitu berupa :

- (1) Perintah mengenai apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya.
- (2) Penjelasan atau penjabaran bagaimana satu tugas berkaitan dengan tugas lainnya.
- (3) Informasi mengenai peraturan, regulasi, kebijakan, dan keuntungan.
- (4) Informasi mengenai seberapa efektif kinerja seseorang
- (5) Informasi yang bertujuan untuk memotivasi para karyawan dengan memberikan kesan tentang misi organisasi dan secara khusus bagaimana mereka terhubung dengan misi organisasi

Gambar 5.7 Bentuk Komunikasi level I berupa Apel Pagi



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2017

Bentuk komunikasi lainya berupa penyampaian informasi dalam bentuk tertulis berupa arahan dan disposisi serta melalui saluran elektronik seperti grup whattsapp. Di dalam saluran elektronik tersebut komunikasi juga terjadi antara bawahan yang melaporkan perkembangan pekerjaan dan hambatan hambatan yang ada dari bawahan ke atasanya. Bawahan juga membuat laporan tertulis secara berkala terhadap perkembangan pekerjaan dan juga untuk menjawab apa

yang menjadi arahan dalam disposisi atasan. Komunikasi dari bawahan ke atasan ini menjadi penting karena alasan sebagaimana dikemukanan *Pace* dan *Faules* (2001) sebagai berikut :

- (1) Aliran informasi ke atas memberi informasi berharga untuk pembuatan keputusan oleh mereka yang mengarahkan organisasi dan mengawasi kegiatan – kegiatan lainnya (Sharma, 1997)
- (2) Komunikasi ke atas memberitahukan kepada penyelia kapan bawahan mereka siap menerima informasi dan seberapa baik bawahan menerima apa yang dikatakan kepada mereka (*Planty dan Machaver, 1953*)
- (3) Memungkinkan dan bahkan mendorong omelan dan keluh kesah muncul kepermukaan sehingga penyelia tahu apa yang mengganggu mereka, yang paling dekat dengan operasi yang sebenarnya (*Conboy, 1976*)
- (4) Komunikasi ke atas mengizinkan penyelia untuk menentukan apakah bawahan memahami apa yang diharapkan dari aliran informasi ke bawah (*Planty dan Machaver, 1952*)
- (5) Membantu pegawai mengatasi masalah pekerjaan dan memperkuat keterlibatan mereka dengan pekerjaaan dan organisasinya (*Harriman, 1974*)

Berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan pada prakteknya keragaman, kelancaran, intensitas sosialisasi dalam komunikasi level I di Kantor Pertanahan Kabupaten telah terpenuhi dengan baik sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh para responden.



Gambar 5.8 Bentuk Komunikasi level I via Saluran Elektronik

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2017

## 5.3.2 Komunikasi Level II (Komunikasi antara Kantor Pertanahan dan Kelompok sasaran)

Variabel komunikasi level II diukur dengan 4 (empat) item pertanyaan yaitu : (1) Keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran; (2) Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah masyarakat yang tersosialisasikan); (3) Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran serta (4) Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran .

Rekapitulasi hasil kuesioner yang telah dibagikan dan yang diterima kembali oleh peneliti disajikan dalam tabel 5.14

Tabel 5.14 Distribusi Frekuensi Responden terhadap Variabel Komunikasi Level II

	ltem		Jawaban Responden					Rata
No			STS	TS	cs	s	ss	- Rata Item
	Keragaman dan kelancaran	Freq	0	3	26	58	1	
X2.1	komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok							3.65
	sasaran	%	0	3.4	29.5	65.9	1.1	
	Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah masyarakat yang tersosialisasikan) antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran	Freq	0	6	34	46	2	
X2.2		%	0	6.8	38.6	52.3	2.3	3.5
X2.3	Ketetapan informasi	Freq	0	13	36	38	1	
	(konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan	1104	0	10	30	30	'	3.31
	kelompok sasaran	%	0	14.8	40.9	43.2	1.1	
X2.4	Kejelasan informasi dan	Freq	0	12	44	30	2	
	penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan							3.25
	kelompok sasaran	%	0	13.6	50	34.1	2.3	
			Rata- Rata Variabel					

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Hasil persepsi responden terhadap variabel komunikasi level II selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

- (1) Jawaban responden untuk item keragaman dan kelancaran komunikasi terdiri dari :
  - a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 3 orang (3.4 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
  - Jawaban CS (skor 3) sebanyak 26 orang (29.5%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra

- keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 58 orang (65.9%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 1 orang (1.1%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan cukup baik dan mendekati baik (rata-rata 3.65). Hal ini berarti secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh kantor pertanahan dalam sosialisasi telah menggunakan berbagai saluran komunikasi dan dilaksanakan secara lancar tidak ada kendala yang cukup berarti.
- (2) Jawaban responden untuk item Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi kantor pertanahan dengan kelompok sasaran terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 6 orang (6.8 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.

- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 34 orang (38.6%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 46 orang (52.3%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik..
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 2 orang (2.3%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah dilaksanakan dengan cukup baik dan menuju ke arah yang baik. (rata-rata 3.5). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai jumlah pelaksanaan sosialisasi dan jumlah kelompok sasaran yang tersosialisasikan telah dirasa cukup oleh para responden
- (3) Jawaban responden untuk item Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 13 orang (14.8 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra

- ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 36 orang (40.9%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 38 orang (43.2%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik..
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 1 orang (1.1%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah dilaksanakan dengan cukup. (rata-rata 3.31). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran cukup konsisten dari waktu ke waktu.
- (4) Jawaban responden untuk item Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 12 orang (13.6 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian

- informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 44 orang (50%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 30 orang (34.1%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 2 orang (2.3%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan sangat baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah dilaksanakan dengan cukup. (rata-rata 3.25). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran ada yang jelas dipahami dan ada yang tidak jelas dipahami oleh kelompok sasaran penggunaan bahasa juga terkadang menjadi kendala dalam komunikasi. Hal ini bisa dikarenakan karena dalam kelompok sasaran, pendidikan,

pengalaman, pengetahuan akan sangat menentukan dalam menangkap kejelasan informasi dan penggunaan bahasa yang disampaikan

(5) Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel komunikasi level II dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan cukup, namun belum belum menuju ke arah yang baik (rata-rata 3.43).

Komunikasi level II ini menurut teori termasuk dalam kategori komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Hasan, 2005). Berbagai fungsi komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan informasi kepada publik.
- (2) Menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan.
- (3) Mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab.
- (4) Memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara.

Pelaksanaan komunikasi level II ini yang utama dilakukan adalah melalui sosialisasi kepada warga masyarakat terkena dampak program.



Gambar 5.9 Bentuk Komunikasi level II Berupa Sosialisasi

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2017

Kegiatan yang lain adalah melalui pemasangan poster, baliho dan menyebarkan pamflet di kelurahan dan di tempat – tempat strategis. Komunikasi pemerintahan tidak luput dari berbagai hambatan. Menurut Simon, Smithburg dan Thomson (1997) dalam bukunya yaitu Handbook of Administrative Communication hambatan - hambatan komunikasi pemerintahan yag biasanya terjadi yaitu hambatan bahasa, kerangka referensi, jarak status, jarak geografis, perlindungan diri dari inisiator, tekanan pekerjaan lainnya, dan pembatasan yang disengaja pada komunikasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan oleh penulis hambatan dalam komunikasi pemerintahan seperti yang diutarakan Simon, Smithburg, Thomson dalam Handbook Administrative dan Communication tidak cukup menggangu dalam pelaksanaan komunikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Namun dari penilaian responden yang menyatakan cukup (rata-rata 3.43) mengindikasikan bahwa pelaksanaan komunikasi bisa dikatakan tidak benar benar bebas dari hambatan - hambatan yang disebutkan tersebut.

## 5.3.3 Komunikasi Level III (Komunikasi antara Kantor Pertanahan dan Instansi terkait)

Variabel komunikasi level III diukur dengan 4 (empat) item pertanyaan yaitu : (1) Keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait; (2) Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah instansi yang tersosialisasikan); (3) Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan instansi terkait serta (4) Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait.

Rekapitulasi hasil kuesioner yang telah dibagikan dan yang diterima kembali oleh peneliti disajikan dalam tabel 5.15

Tabel 5.15 Distribusi Frekuensi Responden terhadap Variabel Komunikasi Level III

			Jawaban Responden					
No	ltem		STS	TS	cs	s	ss	- Rata Item
	Keragaman dan kelancaran	Freq	0	5	26	37	20	
X3.1	komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait		_					3.82
		%	0	5.7	29.5	42	22.7	
	Intensitas sosialisasi (jumlah	Freq	0	3	18	48	19	
X3.2	pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah instansiyang tersosialisasikan) antara kantor pertanahan dengan instansi terkait	%	0	3.4	20.5	54.5	21.6	3.94
X3.3	Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan instansi terkait	Freq	0	3	19	60	6	
		1 leq	0	3	19	00	0	3.78
		%	0	3.4	21.6	68.2	6.8	
X3.4	Kejelasan informasi dan	Freq	0	2	27	40	19	
	penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan							3.86
	instansi terkait	%	0	2.3	30.7	45.5	21.6	
		Ra	ta- Ra	ta Varia	bel		3.85	

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Hasil persepsi responden terhadap variabel komunikasi level III selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

- (1) Jawaban responden untuk item keragaman dan kelancaran komunikasi terdiri dari :
  - a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 5 orang (5.7 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
  - b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 26 orang (29.5%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
  - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 37 orang (42%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
  - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 20 orang (22.7%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
  - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik (rata-rata 3.82). Hal ini berarti secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh kantor

- pertanahan dalam komunikasi dan sosialisasi dengan instansi terkait telah dilaksanakan secara lancar tidak ada kendala yang cukup berarti.
- (2) Jawaban responden untuk item Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi kantor pertanahan dengan instansi terkait terdiri dari:
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 3 orang (3.4 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 18 orang (20.5%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 48 orang (54.5%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik..
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 19 orang (21.6%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.94). Hal ini berarti secara keseluruhan responden

- menilai jumlah pelaksanaan sosialisasi dan jumlah instandi yang tersosialisasikan telah dirasa memenuhi oleh para responden
- (3) Jawaban responden untuk item Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan instansi terkait terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 3 orang (3.4 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 19 orang (21.6%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 60 orang (68.2%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik..
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 6 orang (6.8%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.78). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan kantor pertanahan kepada instansi terkait adalah konsisten dari waktu ke waktu.

- (4) Jawaban responden untuk item Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 2 orang (2.3 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 27 orang (30.7%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 40 orang (45.5%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 19 orang (21.6%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan sangat baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.86). Hal ini berarti secara

keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan antara kantor pertanahan dengan instansi terkait jelas dipahami dan penggunaan bahasa juga tidak menjadi kendala dalam komunikasi. Hal ini dikarenakan karena dalam berkomunikasi dengan instansi terkait menggunakan bahasa yang formal, bahasa standar yang biasa dipakai dalam birokrasi.

(5) Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel komunikasi level III dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan lebih dari sekedar cukup dan hampir baik (rata-rata 3.85).

Komunikasi level III yaitu komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten bantul dengan instansi terkait meliputi Pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Ikatan Surveyor Indonesia, Surveyor Berlisensi, Badan Informasi Geospasial dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Komunikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dengan instansi terkait. Sosialisasi dilakukan dengan tatap muka, berkirim surat serta penyebaran pamflet.

SOSIALISASI JELIAKSANAAN
BENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(P.T.S.I.)
APBN PERUBAHAN TAHUN 2017
KABUPATEN BANTUL

Fantal UI 2017

Gambar 5.10 Bentuk Komunikasi level III Berupa Sosialisasi

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2017

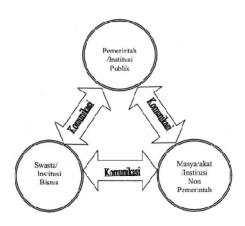
Komunikasi juga dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi seperti whattsapp atau telepon, hal ini dilakukan sebagai komunikasi tambahan untuk memperjelas dan memperlancar komunikasi. Kantor Pertanahan juga melakukan komunikasi dengan instansi terkait melalui website pertanahan. Namun komunikasi yang utama adalah melalui surat menyurat karena telah ada aturan, norma, dan prosedur untuk mengatur masing – masing organisasi. Komunikasi level III yang dilakukan menggunakan model birokrasi karena pihak pihak yang terkait dalam komunikasi level III adalah organisasi pemerintah yang memenuhi 8 (delapan) karakteristik birokrasi menurut teori birokrasi Max Weber. Max Weber (1948), mengungkapkan bahwa model birokrasi sering kali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Dalam model teori birokrasi Max Weber, ditekankan mengenai pentingnya peraturan. Menurut Weber peraturan seharusnya diterapkan secara rasional dan harusnya ada peraturan untuk segala hal dalam organisasi. Tentunya, peraturan-peraturan itu tertulis. Dengan demikian, organisasi akan mempunyai pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya. Para responden menilai bahwa pelaksanaan komunikasi level III ini telah dilaksanakan dengan cukup baik dan mendekati baik, sehingga menurut penulis masing - masing organisasi yang melaksanakan komunikasi ini telah melaksanakan model birokrasi organisasi dengan baik sehingga tercapai komunikasi organisasi yang efektif.

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn (1978) yang dikutip oleh Wahab (2004) bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi

yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan teori tersebut maka semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Secara keseluruhan untuk variabel komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul mendapatkan persepsi lebih dari cukup dan menuju ke penilaian yang baik. Hal ini menandakan bahwa model komunikasi yang dilakukan telah sesuai dan memenuhi salah satu teori administrasi publik yaitu *Good Governance* (kepemerintahan yang baik).

Gambar 5.11 Model Komunikasi dalam perspektif Good Governance



Sumber: Ulber Silalahi, 2004

## 5.3.4 Sumber Daya

Variabel sumber daya diukur dengan 8 (delapan) item pertanyaan yaitu :

(1) Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana renstra ; (2) Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan dalam implementasi renstra; (3) Tahapan-tahapan dalam

proses pensertipikatan tanah (4) Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra; (5) Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana;(6) Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana;(7) Jumlah anggaran dalam implementasi renstra serta (8) Waktu yang tersedia

Rekapitulasi hasil kuesioner yang telah dibagikan dan yang diterima kembali oleh peneliti disajikan dalam tabel 5.16

Tabel 5.16 **Distribusi Frekuensi Responden terhadap Variabel Sumber Daya** 

	Jawaban Responden					Rata		
No	Item		STS	тѕ	cs	s	ss	- Rata Item
	Jumlah, tingkat pengetahuan,	Freq	3	15	32	30	8	
Z.1	keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana renstra	%	3.4	17	36.4	34.1	9.1	3.28
Z.2	Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan dalam	Freq	0	4	23	46	15	3.82
2.2	implementasi renstra	%	0	4.5	26.1	52.3	17	3.02
Z.3	Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah	Freq	0	5	25	43	15	3.77
2.3	репвенирікатан тапан	%	0	5.7	28.4	48.9	17	3.11
Z.4	Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra	Freq	0	6	25	49	8	3.67
2.4		%	0	6.8	28.4	55.7	9.1	3.07
Z.5	Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana	Freq	0	7	38	40	3	3.44
2.5	Rewellangan antai pelaksana	%	0	8	43.2	45.5	3.4	5.44
Z.6	Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana	Freq	8	20	38	20	2	2.86
2.0	sarana dan prasarana	%	9.1	22.7	43.2	22.7	2.3	2.00
Z.7	Jumlah anggaran dalam implementasi renstra	Freq	14	23	29	22	0	2.67
۷.1	implementasi renstra	%	15.9	26.1	33	25	0	2.07
Z.8	Waktu yang tersedia	Freq	18	26	24	19	1	2.53
2.0		%	20.5	29.5	27.3	21.6	1.1	2.00
		Rata- Rata Variabel					3.26	

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Hasil persepsi responden terhadap variabel sumber daya selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

- (1) Jawaban responden untuk item Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana renstra terdiri dari :
  - a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 3 orang (3.4 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
  - b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 15 orang (17 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
  - c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 32 orang (36.4%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
  - d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 30 orang (34.1%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
  - e. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 8 orang (9.1%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat,

- pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
- Secara keseluruhan responden menilai bahwa item Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana dalam implementasi renstra telah tersedia dengan penilaian cukup (rata-rata 3.28). Hal ini berarti secara keseluruhan apa yang dipunyai oleh kantor pertanahan dalam hal Jumlah. tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana cukup untuk melaksanakan apa yang telah ditargetkan dalam renstra. Namun ada sekitar 20,4 % yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, hal ini kemungkinan terkait dengan jumlah para pelaksana yang kurang,karena dari data yang ada tingkat pengetahuan,keterampilan dan pendidikan para pelaksana telah terverifikasi dengan baik.
- (2) Jawaban responden untuk item Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan dalam implementasi renstra terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 4 orang (4.5 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 23 orang (26.1%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan telah terpenuhi dengan baik

- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 46 orang (52.3%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan telah terpenuhi dengan baik..
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 15 orang (17%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju dalam implementasi renstra Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.82). Hal ini dikarenakan adanya kesadaran dari para pelaksanan bahwa ada konsekuensi hukum dari penerbitan sertipikat serta pengalaman dari adanya kasus kasus hukum khususnya terkait dengan produk rencana strategis bidang pendaftaran tanah (sertipikat).
- (3) Jawaban responden untuk item Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 5 orang (5.7 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 25 orang (28.4%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 43 orang (48.9%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Tahapan-

- tahapan dalam proses pensertipikatan tanah telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 15 orang (17 %) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah telah terpenuhi dengan sangat baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah telah dilaksanakan dengan baik (rata-rata 3.77). Item ini terkait dengan kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga benar adanya bahwa hasil penilaian item tahapan dalam proses sertipikasi ini berbanding lurus dengan item kepatuhan petugas terhadap peraturan.
- (4) Jawaban responden untuk item Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra terkait terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 6 orang (6.8 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 25 orang (28.4 %) yang berarti bahwa Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 49 orang (55.7%) yang berarti bahwa Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik..

- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 8 orang (9.1%) yang berarti bahwa Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.67).
- (5) Jawaban responden untuk item Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana terdiri dari :
  - a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 7 orang (8%) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
  - b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 38 orang (43.2%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
  - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 40 orang (45.5%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
  - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 3 orang (3.4%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana telah terpenuhi dengan baik.

- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan penilaian cukup (rata-rata 3.44).
- (7) Jawaban responden untuk item Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana dalam implementasi renstra terdiri dari :
  - a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 8 orang (9.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik.
  - b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 20 orang (22.7 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik.
  - c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 38 orang (43.2%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik
  - d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 20 orang (22.7%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik..
  - e. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 2 orang (2,3%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju dalam implementasi renstra Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik.

- f. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana tidak tersedia dengan baik / kurang (rata-rata 2.86). Penilaian ini berbanding lurus dengan data kondisi dan jumlah peralatan yang ada di kantor pertanahan. ( lampiran data kondisi peralatan sarana dan prasarana). Hal ini ditambah tidak adanya penambahan jumlah alat dalam beberapa tahun terakhir)
- (8) Jawaban responden untuk item Jumlah anggaran terdiri dari :
  - a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 14 orang (15.9 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah anggaran telah terpenuhi dengan baik
  - b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 23 orang (26.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah anggaran telah terpenuhi dengan baik.
  - c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 29 orang (33%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah anggaran telah terpenuhi dengan baik
  - d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 22 orang (25%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah anggaran telah terpenuhi dengan baik.
  - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Jumlah anggaran tidak tersedia dengan baik / kurang. (rata-rata 2.67). Fakta dilapangan menggambarkan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk para skateholder khususnya bagi pegawai desa / kelurahan yang terkait langsung dengan implementasi. Perkembangan

terkhir ada beberapa desa / kelurahan yang menganggarkan dana tersebut dari dana desa.

- (9) Jawaban responden untuk item Waktu yang tersedia terdiri dari :
  - a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 18 orang (20.5 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah waktu tersedia dengan baik
  - b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 66 orang (29.5%) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa Waktu yang tersedia telah terpenuhi dengan baik.
  - c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 24 orang (27.3 %) yang berarti bahwa
     Waktu yang tersedia telah terpenuhi dengan baik
  - d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 19 orang (21.6%) yang berarti bahwa
     Waktu yang tersedia telah terpenuhi dengan baik.
  - e. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 1 orang (1.1%) yang berarti bahwa Waktu yang tersedia telah terpenuhi dengan baik.
  - f. Secara keseluruhan responden menilai bahwa Waktu yang tersedia dalam implementasi rensta dinilai kurang. (rata-rata 2.53). data yang ada di kantor menunjukkan bahwa akhir juli 2017 dari 5900 bidang tanah yang ditargetkan baru ada realisasi 3350, sedangkan untuk tahap 2 baru mulai sosialisasi dengan target 20.000 bidang tanah.
- (10) Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel sumber daya dalam implementasi renstra hanya tersedia dengan cukup (rata-rata 3.26), namun ada beberapa item sumber daya yang dipersepsikan tidak baik atau kurang oleh responden yaitu jumlah, kondisi peralatan sarana dan pra sarana (2,86),

jumlah anggaran (2,67) dan waktu yang tersedia (2,53). Walaupun secara keseluruhan item sumber daya tersedia dengan penilaian cukup, namun ada 3 (tiga) item dengan kondisi yang kurang, sehingga akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi renstra

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (1980) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu diantaranya sejumlah 8 (delapan) seperti yang penulis sebutkan dalam tabel 5.16 di atas.

Berdasarkan persepsi responden ada 3 (tiga) item variabel sumberdaya yang dinilai kurang yaitu: jumlah, kondisi peralatan sarana dan pra sarana, jumlah anggaran dan waktu yang tersedia. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi. Bagaimana keterkaitan kondisi peralatan sarana dan pra sarana dengan keberhasilan implementasi seperti yang dijelaskan oleh Edward III sebagai berikut: "Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do,may have authority to exercise his task, but without the necessary buildings equipment, suppiles and even green space implementation won't succed". Anggaran juga menjadi faktor yang krusial dalam keberhasilan

suatu kebijakan. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa ada beberapa fungsi anggaran pada sektor publik yaitu :

- (1) Anggaran sebagai alat perencanaan yang digunakan antara lain untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan, merencanakan program kebijakan itu sendiri, serta mengalokasikannya serta menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Tanpa adanya perencanaan yang baik tidak akan mungkin suatu program kebijakan akan diimplementasikan dengan baik pula. Suhandak (2007) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di lapangan harus dilakukan perencanaan yang baik terlebih dahulu, karena kekhawatiran akan ketersediaan dana yang ada kurang cukup dalam proses pelaksanaan karena adanya keterbatasan dan ketersediaan dalam proses implementasi
- (2) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, sehingga anggaran yang tidak cukup akan membuat koordinasi dan komunikasi antar pelaksana dan stakelolder terkait menjadi tidak efektif
- (3) Anggaran sebagai alat motivasi, agar para pelaksana dapat bekerja dengan efektif dan efisien dalam memenuhi target dan tujuan yang telah ditetapkan Menurut Van Metter dan Van Horn keberhasilan proses implementasi kebijakan dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn, 1975 dalam Agustino, 2006). Oleh karena itu waktu menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hogwood dan Gunn (1986) dalam Abdul Wahab (1991), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu diantaranya tersedianya waktu dan sumbersumber yang cukup memadai. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan

dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006). Namun kualitas atau ciri para aktor ini mendapat penilaian yang cukup baik dari para responden

## 5.3.5 Implementasi Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Dalam Bidang Pendaftaran Tanah

Variabel implementasi renstra diukur dengan 9 (sembilan) item pertanyaan yaitu : (1) Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan ; (2) Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran; (3) Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah (4) Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan; (5) Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan; (6) Jumlah Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran; (7) Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun ; (8) Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan; serta (9) Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal

Rekapitulasi hasil kuesioner yang telah dibagikan dan yang diterima kembali oleh peneliti disajikan dalam tabel 5.17

Tabel 5.17 **Distribusi Frekuensi Responden terhadap Variabel Implementasi Renstra** 

	ltem		J	Rata -				
No			STS	TS	cs	S	SS	Rata Item
Y.1	Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang	Freq	2	23	37	0	26	3.28
	disertipikatkan sesuai target	%	2.3	26.1	42	0	29.5	
Y.2	Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran sesuai	Freq	9	38	32	9	0	2.47
1.2	target	%	10.2	43.2	36.4	10.2	0	2.41
	Peningkatan pelayanan	Freq	8	33	28	19	0	
Y.3	masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data							2.66
	pendaftaran tanah	%	9.1	37.5	31.8	21.6	0	
Y.4	Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di	Freq	1	0	27	34	26	3.95
1.4	pedesaan	%	1.1	0	30.7	38.6	29.5	
	Peningkatan kualitas	Freq	8	33	41	0	6	2.58
Y.5	pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang							
	dan perairan	%	9.1	37.5	46.6	0	6.8	
Y.6	Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran sesuai	Freq	7	45	0	36	0	2.74
1.0	target	%	8	51.1	0	40.9	0	
Y.7	Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun	Freq	21	34	27	5	1	2.22
1.7		%	23.9	38.6	30.7	5.7	1.1	۷.۷۷
Y.8	Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus	Freq	17	45	0	26	0	2.4
1.0	pertanahan	%	19.3	51.1	0	29.5	0	<b>2.4</b>
V C	Implementasi renstra telah	Freq	23	33	27	5	0	0.40
Y.9	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal	%	26.1	37.5	30.7	5.7	0	2.16
					a Varia	bel	•	2.72

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Hasil persepsi responden terhadap variabel implementasi renstra selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

- (1) Jawaban responden untuk item Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 2 orang (2.3 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra

- Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 23 orang (26.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 37 orang (42%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 26 orang (29.5%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan penilaian cukup baik (rata-rata 3.28).
- (2) Jawaban responden untuk item Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran dalam implementasi renstra terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 9 orang (10.2 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 38 orang (43.2 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik.

- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 32 orang (36.4 %) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik
- d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 9 orang (10.2%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik..
- Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra
   Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran belum dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 2.47).
- (3) Jawaban responden untuk item Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 8 orang 9.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 33 orang (37.5 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 28 orang (31.8%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah telah terpenuhi dengan baik
- d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 19 orang (21.6%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan

- pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah telah terpenuhi dengan baik.
- (4) Jawaban responden untuk item Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan dalam implementasi renstra terkait terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 8 orang 9.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan telah terpenuhi dengan baik
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 27 orang (30.7 %) yang berarti bahwa Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 34 orang (38.6%) yang berarti bahwa Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik..
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 26 orang (29.5%) yang berarti bahwa Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan implementasi renstra telah terpenuhi dengan sangat baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.95).

- (5) Jawaban responden untuk Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 8 orang (9.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan telah terpenuhi dengan baik
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 33 orang (37.5%) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 41 orang (46.6%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 6 orang (6.8%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan dalam implementasi renstra belum dilaksanakan dengan baik / dibawah rata rata(rata-rata 2.58).
- (7) Jawaban responden untuk item Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran dalam implementasi renstra terdiri dari :

- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 7 orang (8 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 45 orang (51.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 36 orang (40.9%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik..
- d. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran tidak terlaksana dengan baik / kurang. (rata-rata 2.74).
- (8) Jawaban responden untuk item Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 21 orang (23.9 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun telah terpenuhi dengan baik
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 34 orang (38.6 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun telah terpenuhi dengan baik.

- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 27 orang (30.7%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun telah terpenuhi dengan baik
- d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 5 orang (5.7%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun telah terpenuhi dengan baik.
- e. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 1 orang (1.1%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun telah terpenuhi dengan baik.
- f. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun tidak tersedia dengan baik / kurang. (rata-rata 2.22). Hasil penilaian responden sesuai dengan data tunggakan pekerjaan sertipikasi tanah yang ada di kantor pertanahan kabupaten Bantul
- (9)Jawaban responden untuk item Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 17orang (19.3 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan tersedia dengan baik
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 45 orang (51.51%) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra

- Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 26 orang (29.5%) yang berarti bahwa Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan telah terpenuhi dengan baik.
- d. Secara keseluruhan responden menilai bahwa Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan dalam implementasi rensta dinilai kurang. (rata-rata 2.4).
- (10)Jawaban responden untuk item Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 23 orang (26.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 33 orang (37.5%) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 27 orang (30.7%) yang berarti bahwa Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal telah terpenuhi dengan baik
- d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 5 orang (5.7%) yang berarti bahwa Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awaltelah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa Implementasi renstra tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal. (rata-rata 2.16).

(11) Secara keseluruhan responden menilai bahwa implementasi renstra belum dilaksanakan dengan baik (rata-rata 2.72). Diantara 9 (sembilan) item yang dinilai ada 2 (dua) item dengan penilaian lebih dari rata rata dan baik, yaitu terkait peningkatan jumlah cakupan bidang tanah tersertipikatkan (3.28) dan peningkatan kecepatan legalisasi aset di pedesaaan (3.95). Sedangkan sisanya 7 (tujuh) item kesemuanya dibawah rata – rata. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan juga bahwa menurut para responden secara kuantitas pelaksanaan renstra pendaftaran tanah sudah baik, namun secara kualitas masih dibawah rata – rata. Urutan penilaian terendah terletak pada item 9 (sembilan), yaitu implementasi renstra dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal (pendaftaran satu desa lengkap) (2,16). Secara empiris ini dimungkinkan karena dengan kondisi waktu, peralatan, anggaran dan sumber daya yang kurang maka kantor pertanahan membuat kebijakan agar memudahkan dalam pelaksanaan dan target besar yang dicanangkan dapat tercapai.

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003) bahwa kuantitas adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Sedangkan menurut Wilson dan Heyyel (1987) mengatakan bahwa kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam

menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Kadir (2001) Menyatakan bahwa kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir (meningkatkan kualitas kontinuitas). Mangkunegara (2009) membedakan kualitas dan kuantitas kerja sebagai berikut. Kualitas kerja adalah ukuran seberapa baik seorang karyawan dalam mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Sedangkan kuantitas kerja adalah ukuran seberapa lama karyawan dapat bekerja dalam satu hari.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas sekiranya dapat penulis tarik kesimpulan bahwa kuantitas kerja lebih mudah untuk dipenuhi dari pada kualitas kerja. Kuantitas kerja jelas ukurannya, sedangkan kualitas kerja masih ada ruang untuk diperdebatkan. Sehingga secara umum hasil persepsi para responden terhadap implementasi rensta yang memberikan penilaian baik untuk kuantitas serta kurang baik terhadap kualitas bisa diterima.

Item implementasi penyelesaian tunggakan sertipikasi tanah di akhir tahun dinilai kurang baik oleh para responden. Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menunjukkan pada akhir tahun 2015 terdapat tunggakan pembuatan sertipikat pertama kali sebanyak 266 berkas dan pada akhir tahun 2016 sebanyak 294 berkas. Sedangkan untuk item peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah data yang ada menunjukkan ada tunggakan pada akhir tahun 2015 sebanyak 32 berkas dan pada akhir tahun 2016 sebanyak 251 berkas. Kemudian terdapat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah juga tidak tercapai dengan baik, seperti Larasita pada tahun 2015 ketercapaian 10 % dan pada tahun 2016 ketercapaian 24,4 %. Adapun dari sisi penyelesaian kasus pertanahan, data yang ada di akhir tahun 2016 khusus pelayanan perkara hanya tercapai 33,33 %. Namun secara kuantitas data yang ada menunjukkan bahwa implementasi renstra dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa kendala mengapa secara kualitas hasil implementasi renstra kurang menggembirakan menurut persepsi responden. Diantaranya yaitu :

- Bidang tanah terdaftar belum semuanya di plotting di peta dasar (flying parcel);
- 2) GeoKKP baru ± 50%;
- 3) Arsip SU dan GU belum semuanya digitalisasi.

Sehingga saat ini jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul masih dan terus bekerja keras dalam mengatasi kendala tersebut. Penulis berpendapat apabila kendala tersebut dapat diselesaikan secara baik maka kualitas pekerjaan bukanlah hal yang sulit untuk dijangkau.

# 5.4 Hubungan antara Faktor Komunikasi dan Sumberdaya terhadap implementasi Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Dalam Bidang Pendaftaran Tanah

Untuk menjawab hipotesis penelitian seperti disebutkan dalam bab III di depan, maka penelitian ini menggunakan teknik analisa jalur yaitu suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel eksogennya mempengaruhi variabel endogen tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung Robert D. Rutherford (dalam Jonathan Sarwono, 2007). Pada analisis jalur terdapat diagram jalur yang

merupakan suatu diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel eksogen dan endogen. Untuk menunjukkan pengaruh langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogennya diperlukan koefisien jalur yang merupakan koefisien regresi yang distandartkan atau disebut 'beta' yang disimbolkan dengan . Sedangkan untuk menunjukkan besar pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogennya secara bersamasama disebut koefisien determinasi (R2) yang dirumuskan (Riduwan dan Kuncoro, 2011).

Riduwan dan Kuncoro (2011) juga menyatakan bahwa secara sistematik analisis jalur mengikuti pola model struktural, sehingga langkah awal untuk mengerjakan analisis jalur yaitu merumuskan persamaan struktural dan diagram jalur yang berdasarkan kajian teori tertentu. Berikut ini rumusan diagram jalur dan persamaan struktural berdasarkan hipotesis penelitian.

ρΥΧ1 Komunikasi Level I (X1)٤2 ٤1 ρZX1 ρΥΖ ρZX2 Komunikasi Level II Sumber Daya Implementasi Renstra (X2)(Z) (Y) ρZX3 ρΥΧ3 Komunikasi Level III (X3)ρΥΧ2

Gambar 5.12 Rumusan Diagram jalur model struktural

Sumber : Kajian teoritis Implementasi renstra Edward III

Sehingga berdasarkan diagram jalur di atas, dapat disusun persamaan struktural berikut ini :

$$Z = ZX_1 + ZX_2 + ZX_3 + + 1$$
 ..... persamaan struktural 1

$$Y = YX_1 + YX_2 + YX_3 + YZ + 2 \dots$$
 persamaan struktural 2

koefisien jalur diperoleh dari perhitungan regresi linier berganda. Karena ada 2 (dua) persamaan struktural maka dilakukan 2 (dua) kali perhitungan regresi linier berganda. Dari koefisien jalur yang diperoleh selanjutnya diuji secara keseluruhan dan parsial dengan hipotesisnya seperti dijelaskan pada bab III sebagai berikut:

H0: variabel X1, X2, X3, Z tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap variabel Y

H1: variabel X1, X2, X3, Z berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap variabel Y.

Persamaan struktural 1 menggambarkan pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Z.Koefisien jalur diperoleh dari analisis regeresi linier sebagai mana dijelaskan dalam tabel 5.18.

Tabel 5.18 Analisis regresi antara Komunikasi level I, Komunikasi Level II dan Komunikasi level III dengan Sumber Daya

Variabel	r	R²	.sig (p- value)	Koefisie n e	Koefisien B (Koef Jalur)	.sig (p- value)
Komunikasi						
level I					0.268	0.011
Komunikasi	0.34	0.11	0.015	0.94		
level II	2	7	0.015	0.94	0.062	0.551
Komunikasi						
level III					0.214	0.043

Berdasarkan tabel 5.18 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (p-value) variabel komunikasi level II sebesar 0.551, lebih besar dari 0.05 (level of significance) yang artinya variabel komunikasi level II tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel sumber daya ( koefisien jalur variabel X2 tidak signifikan). Selanjutnya model persamaan struktural I diperbaiki dengan menghilangkan variabel komunikasi level II dan dilakukan perhitungan ulang regresi linier. Adapun hasil regeresi ulang ditunjukkan pada tabel 5.19 berikut,

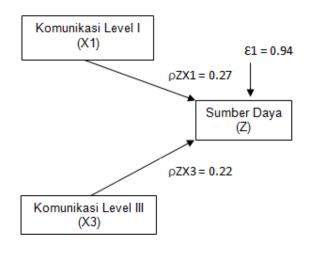
Tabel 5.19 Analisis regresi antara Komunikasi level Ildan Komunikasi level III dengan Sumber Daya setelah variabel komunikasi level II dihilangkan

Variabel	r	R²	.sig (p- value)	Koefis ien e	Koefisien B (Koef Jalur)	.sig (p- value)	Persamaan struktural 1
Komunikas							
i level I	0.3	0.1	0.006	0.94	0.27	0.01	Z= 0.27 X1 +
Komunikas	37	13	0.000	0.94			0.22 X3 + 0.94
i level III					0.224	0.032	

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Sehingga diagram jalur untuk persamaan 1 menjadi seperti dibawah ini :

Gambar 5.13 Diagram jalur persamaan struktural 1



Berdasarkan hasil perhitungan statistik didapatkan bahwa komunikasi level II tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sumber daya. Berdasarkan pengamatan dari penulis dan informasi dari Kantor Pertanahan, bahwa pada awalnya komunikasi level I dilaksanaan dengan harapan warga masyarakat dan pihak desa untuk ikut aktif berpartisipasi dalam impelementasi renstra bidang pendaftaran tanah ini. Namun pada faktanya warga masyarakat kurang aktif turut serta dalam proses sertipikasi tanah. Sedangkan keaktifan dari pihak desa tidak menggambarkan hasil yang menggembirakan karena disamping sibuk dengan pembangunan desa masing masing (terkait dengan serapan dana desa), jumlah personil yang ada dirasa kurang. Tidak adanya anggaran di DIPA untuk menunjang keaktifan masyarakat dan pihak desa juga turut memberikan pengaruh mengapa komunikasi level I ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sumber daya.

Selanjutnya persamaan struktural 2 menggambarkan pengaruh variabel X1, X2, X3, Z terhadap variabel Y.Koefisien jalur diperoleh dari analisis regeresi linier sebagai mana dijelaskan dalam tabel 5.20.

Tabel 5.20 Analisis regresi antara Komunikasi level I, Komunikasi Level II, Komunikasi level III dan Sumber Daya dengan Implementasi Renstra

Variabel	r	R²	.sig (p- value)	Koefisie n e	Koefisien B (Koef Jalur)	.sig (p- value)
Komunikasi						
level I					0.248	0.016
Komunikasi	0.47	0.22				
level II	0.47	0.22	0	0.88	0.212	0.034
Komunikasi	<b>'</b>	_				
level III					0.088	0.384
Sumber Daya					0.236	0.025

Berdasarkan tabel 5.20 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (p-value) variabel komunikasi level III sebesar 0.384, lebih besar dari 0.05 (level of significance) yang artinya variabel komunikasi level III tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel implementasi renstra ( koefisien jalur variabel X3 tidak signifikan). Selanjutnya model persamaan struktural 2 diperbaiki dengan menghilangkan variabel komunikasi level III dan dilakukan perhitungan ulang regresi linier. Adapun hasil regeresi ulang ditunjukkan pada tabel 5.21 berikut,

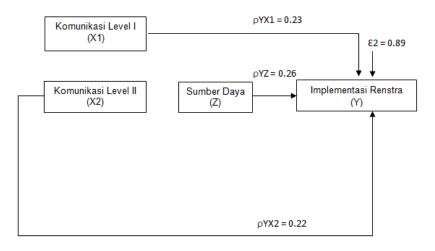
Tabel 5.21 Analisis regresi antara Komunikasi level I, Komunikasi Level II dan Sumber Daya dengan Implementasi Renstra setelah variabel komunikasi level III dihilangkan

Variabel	r	R²	.sig (p- value)	Koefi sien e	Koefisien B (Koef Jalur)	.sig (p- value)	Persamaan Struktural 2
Komunika							
si level I	0.	0.			0.235	0.021	
Komunika	46	0. 21	0	0.89			Y= 0.23 X1 + 0.22
si level II	3	5		0.09	0.225	0.023	X2 + 0.26 Z + 0.89
Sumber	٦	٦					
Daya					0.256	0.013	

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

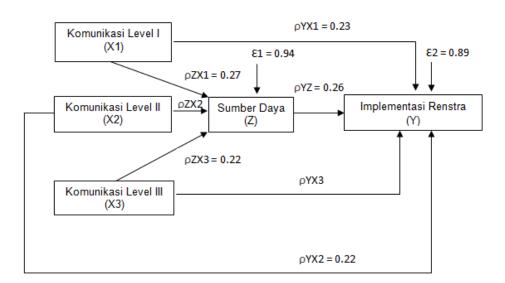
Sehingga diagram jalur untuk persamaan 2 menjadi seperti dibawah ini :

Gambar 5.14 Diagram jalur persamaan struktural 2



Berdasarkan hasil perhitungan statistik didapatkan bahwa komunikasi level III tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap implementasi renstra. Namun komunikasi level III berpengaruh tidak langsung terhadap implementasi renstra yaitu melalui sumber daya. Hal ini bisa dijelaskan bahwa tujuan utama komunikasi kantor pertanahan kabupaten Bantul dengan Instansi terkait adalah bukan sekedar untuk tukar menukar informasi, namun juga data pendukung, penambahan anggaran dan perbantuan terkait jumlah staf pelaksana dan praktek praktek pelaksanaan kebijakan. Kesemuanya itu terkait dengan sumber daya sehingga menjadi wajar apabila komunikasi level III berpengaruh secara signifikan terhadap sumber daya, namun tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap implementasi renstra.

Berdasarkan koefisien jalur dan persamaan struktural diatas,maka konstruksi diagram jalur model struktural secara keseluruhan digambarkan dalam gambar 5.15 sebagaimana berikut.



Gambar 5.15 **Diagram jalur model struktural** 

Berdasarkan gambar 5.15 ini selanjutnya dapat penulis sajikan pengaruh dari variabel X1, X2, X3, Z terhadap variabel Y, baik pengaruh langsung ataupun tidak langsung yang sekaligus untuk menguji hipotesis yang telah kita bangun.

Tabel 5.22 Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, dan pengaruh bersama variabel X1, X2, X3,Z terhadap Y

	-	<del>-</del>			Pengaruh						
No	Pengaru	h Variabel		Langsung	Tidak Langsung (melalui Z)	Total	Pengaruh Bersama				
1	X1	terhadap	Z	0.27	-	0.27					
2	X2	terhadap	Z	-	-	-					
3	Х3	terhadap	Z	0.22	0.22 - 0.22						
4	X1	terhadap	Υ	0.23	0.07	0.3					
5	X2	terhadap	Υ	0.22	-	0.22					
6	Х3	terhadap	Υ	-	0.06	0.06					
7	Z	terhadap	Υ	0.26		0.26					
8	X1,X2,X3	terhadap	Z	-	-	-	0.113				
9	X1,X2,X3,Z	terhadap	Υ	-	-	-	0.215				
10	1			-	-	-	0.94				
11	2			-	-	-	0.87				

Sumber: Data primer diolah tahun 2017

Tabel 5.22 dapat menjawab hipotesa awal sebagaimana diuraikan sebagaimana berikut ini:

(a) H<sub>o</sub>: Tidak ada pengaruh antara variabel komunikasi level I (X1), komunikasi level II (X2), komunikasi level III (X3) dan sumber daya (Z) secara parsial terhadap implementasi renstra (Y).

Dari tabel 5.22 nomor 4, 5, 6 dan 7 diketahui ada pengaruh variabel X1, X2, X3 dan Z terhadap variabel Y sebesar masing masing 30%,22 %,6% dan 26% sehingga H<sub>o</sub> ditolak. Artinya bahwa :

H<sub>1</sub>: variabel komunikasi level I secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra sebesar 30%,

- H<sub>2</sub>: variabel komunikasi level II secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra sebesar 22 %
- H<sub>3</sub>: variabel komunikasi level III secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra sebesar 6%
- H<sub>4</sub>: variabel sumber daya secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra sebesar 22 %
- (b) H<sub>o</sub>: Tidak ada pengaruh antara variabel komunikasi level I (X1), komunikasi level II (X2), komunikasi level III (X3) dan sumber daya (Z) secara bersama-sama terhadap implementasi renstra (Y).

Dari tabel 5.22 nomor 9 diketahui ada pengaruh variabel X1, X2, X3 dan Z secara bersama sama terhadap variabel Y sebesar 21.5 %, sehingga  $H_{\circ}$  ditolak.Artinya bahwa :

H<sub>5</sub>: variabel komunikasi level I, komunikasi level II, komunikasi level III, dan variabel sumberdaya, secara simultan / bersama-sama mempengaruhi proses implementasi renstra sebesar 21.5 %

#### 5.5. Model struktural analisa jalur

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda didapatkan 2 (dua) persamaan struktural yaitu:

Z= 0.27 X1 + 0.22 X3 + 0.94 .....persamaan struktural 1

Y= 0.23 X1 + 0.22 X2 + 0.26 Z + 0.89 .....persamaan struktural 2

Dan juga tabel 5.22 yaitu Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, dan pengaruh bersama variabel X1, X2, X3,Z terhadap Y. Sehingga penejelasan untuk setiap persamaan struktural akan dikombinasikan dengan tabel 5.22. Penjelasan untuk persamaan struktural 1 adalah:

- Konstanta sebesar 0.94 mengindikasikan bahwa apabila variabel komunikasi level I dan komunikasi level III bernilai konstan (tidak berubah) maka besarnya perubahan sumberdaya adalah sebesar 0.94
- 2. Koefisien variabel komunikasi level I sebesar 0.27 mengindikasikan bahwa variabel komunikasi level I berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap variabel sumber daya. Semakin baik komunikasi antara atasan dan bawahan maka akan berpengaruh semakin baik juga terhadap sumber daya yang ada
- 3. Koefisien variabel komunikasi level III sebesar 0.22 mengindikasikan bahwa variabel komunikasi level III berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap variabel sumber daya. Semakin baik komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkai maka akan berpengaruh semakin baik juga terhadap sumber daya yang ada
- 4. Dalam persamaan struktural I tidak ada variabel komunikasi level II, artinya bahwa variabel komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran tidak berpengaruh secara langsung terhadap variabel sumberdaya

Sedangkan penjelasan untuk persamaan struktural 2 adalah :

- Konstanta sebesar 0.89 mengindikasikan bahwa apabila variabel komunikasi level I ,komunikasi level II dan sumberdaya bernilai konstan (tidak berubah) maka besarnya perubahan implementasi rensta adalah sebesar 0.89
- 2. Koefisien variabel komunikasi level I sebesar 0.23 mengindikasikan bahwa variabel komunikasi level I berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap variabel implementasi rensta. Semakin baik komunikasi antara atasan dan bawahan maka akan berpengaruh semakin baik terhadap implementasi renstra

- 3. Koefisien variabel komunikasi level II sebesar 0.22 mengindikasikan bahwa variabel komunikasi level II berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap variabel implementasi renstra. Semakin baik komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran maka akan berpengaruh semakin baik juga terhadap implementasi renstra
- 4. Koefisien variabel sumberdaya sebesar 0.26 mengindikasikan bahwa variabel sumberdaya berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap variabel implementasi renstra. Semakin baik kondisi sumberdaya di kantor pertanahan Kabupaten Bantul maka akan semakin baik pula pelaksanaan renstra tersebut
- 5. Dalam persamaan struktural 2 tidak ada variabel komunikasi level III, artinya bahwa variabel komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait tidak berpengaruh secara langsung terhadap variabel sumberdaya, namun dari tabel 5.22 diketahui variabel kantor pertanahan dengan instansi terkait berpengaruh secara tidak langsung terhadap implementasi renstra

#### 5.6 Pengaruh Dominan

Pengaruh dominan dapat diketahui dari nilai koefisien jalur hasil regresi linier berganda. Tabel 5.22 di atas telah menjelaskan besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, dan pengaruh bersama variabel X1, X2, X3, Z terhadap Y. Dari tabel tersebut dapat diketahui urutan pengaruh total variabel X1, X2, X3, Z terhadap Y sebagai berikut:

 Pengaruh total variabel Komunikasi level I terhadap Implementasi renstra sebesar 30 %.

Variabel komunikasi level I memiliki pengaruh paling dominan. Hal ini berbanding lurus dengan persepsi dari para responden. Para responden

menilai komunikasi level I dilaksananan dengan baik yaitu rata rata skor 4.21 dari skala 5 yang dinilai. Penilaian ini menempati peringkat tertinggi dibandingkan dengan penilaian terhadap variabel yang lain. Fakta di lapangan juga didapatkan bahwa pelaksanaan komunikasi level I telah dilaksanakan dengan baik. Keseluruhan item seperti keragaman dan kelancaran komunikasi, intensitas sosialisasi, ketetapan dan kejelasan informasi telah terpenuhi dengan baik. Bentuk bentuk komunikasi level I seperti apel pagi dan penggunaan sarana elektronik seperti penggunaan aplikasi whattsapp group, telah menterjemahkan teori dari Katz dan Kahn (1966) terkait jenis informasi yang biasa dilakukan dari atasan dan bawahan serta teori dari Pace dan Faules (2001) terkait pentingnya komunikasi dari bawahan ke atasan.

Pengaruh total variabel sumber daya terhadap Implementasi renstra sebesar
 26 %.

Sumber daya memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi renstra. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Edward III (1980) dalam Widodo (2011) yang menyatakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Khusus sumber daya manusia Agus Sunyoto (2008) memberi penjelasan bahwa manusia memegang peran yang sangat penting dalam

keberhasilan suatu usaha. Dalam organisasi usaha yang besar, modal yang besar, teknologi yang canggih, sumber daya alam yang berlimpah tidak mungkin dapat dieksploitasi tanpa sumber daya yang diperlukan, yang memadai, yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan.

 Pengaruh total variabel Komunikasi level II terhadap Implementasi renstra sebesar 22 %.

Komunikasi level II memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi renstra. Keberhasilan kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran, keberhasilan dalam sosialisasi, bagaimana menarik simpati dari warga untuk memiliki kesadaran dalam mensertipikatkan tanahnya merupakan kunci dari keberhasilan implementasi renstra. Semakin baik komunikasi level II yang dilakukan semakin baik pula keberhasilan implementasi renstra. Disamping hambatan-hambatan Komunikasi level II berdasarkan teori dari Simon, Smithburg dan Thompson (1997) dalam bukunya yaitu Hanbook of Administrative Communication tidak terjadi di Kantor Pertanahan Kabupatren Bantul, komunikasi level II ini mendapat penilaian lebih dari cukup dari para responden. Sehingga apabila variabel komunikasi level II ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap implementasi renstra, hal ini menurut pendapat penulis dapat diterima.

 Pengaruh total variabel Komunikasi level III terhadap Implementasi renstra sebesar 6 %

Seperti pada penjelasan di muka bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut

Hogwood dan Gunn (1978) yang dikutip oleh Wahab (2004) bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan teori tersebut maka semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan tabel 5.22 diatas maka dalam penelitian ini variabel komunikasi antara atasan dan bawahan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi implementasi renstra.

### 5.7 Perbandingan hasil penelitian dengan teori dan penelitian yang lain

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi level I dan komunikasi level III mempengaruhi situasi dan kondisi sumberdaya yang ada, dengan pengaruh masing – masing sebesar 27 % dan 22 %. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Beach (1975) yang menyatakan bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi dan sumber daya secara parsial berpengaruh terhadap implementasi renstra. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian M Thoriq (2005) yang membenarkan dan membuktikan teori yang dikemukakan para ahli tentang pengaruh dari komunikasi, kemampuan pegawai dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan publik. Penelitian Widodo, A.S, (2002) menguatkan teori teori dari George C Edward

III(1980), David C Korten (1988), William N Dunn(1922) tentang hubungan antar sikap, sumberdaya dan pengawasan dengan implementasi kebijakan. Sehingga hasil penelitian widodo (khususnya terkait variabel sumberdaya) ini relevan dengan hasil penelitian penulis. Bahwa secara parsial sumber daya mempengaruhi implementasi renstra.

Harsono (2009) yang meneliti fenomena-fenomena Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional, melihat dari variabel-variabel implementasi dari Van Meter dan Van Horn (Gejala-gejala dari dasar hukum dan kualitas pelayanan Komunikasi, fenomena komunikasi dan sumber daya) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Diantara hasil penelitiannya sesuai dengan hasil penelitian penulis yaitu bahwa fenomena komunikasi dan sumberdaya secara parsial mempengaruhi implementasi kebijakan. Sebagian hasil penelitian harsono ini juga sesuai dengan penelitian Purnomo (2013) dan Adnan (2013). Purnomo mengatakan secara parsial yang berpengaruh secara signifikan adalah variabel sumberdaya dan control. Variabel komunikasi, lingkungan dan isi rencana berpengaruh lemah atau tidak signifikan. Sedangkan Adnan mengatakan secara parsial yang memberikan pengaruh signifikan adalah variabel sumberdaya, struktur birokrasi dan partisipasi masyarakat. Yang berarti hasilnya selaras dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa faktor komunikasi (level I) menjadi faktor paling dominan yang berpengaruh dalam implementasi rensta. Hal ini tepat sesuai dengan penelitian Nurcholish, (2017), yang menyebutkan bahwa komunikasi memiliki peran yang dominan dalam implementasi renstra Pengelolaan Taman Nasional (Studi pada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani

Provinsi NTB). Hal ini menguatkan teori yang dikemukakan Edward III dalam agustino 2006 yang menyatakan bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Hasil penelitan juga menguatkan pendapat Edward II terkait sumberdaya dapat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Ahli kebijakan publik yang lain seperti Grindle menyatakan ada 9 variabel bebas yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, dikelompokkan menjadi 2 kategori besar yaitu isi kebijakan yang didalamnya ada sumberdaya dan konteks kebijakan. Serta Van meter dan Van Horn (dalam wibawa dkk, 1994) yang mengatakan ada 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, didalamnya ada variabel komunikasi dan sumber daya. Sehingga penelitian ini membuktikan dan menguatkan teori para ahli tersebut di atas, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik

#### 5.8 Keterbatasan Penelitian

- (1) Penulis mengkhususkan sampel penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Sehingga keberhasilan implementasi hanya diukur dari persepsi pegawai Kantor Pertanahan dan data pendukung pada Kantor Pertanahan terkait
- (2) Tidak tertutup kemungkinan pada setiap variabel bebas dan variabel tengah yang telah digunakan ada indikator – indikator yang belum dimasukkan dan belum diteliti.
- (3) Hasil penelitian menunjukkan nilai 2 sebesar 0.87, artinya ada variabel variabel lain diluar model penelitian, namun belum dimasukkan dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh cukup besar. Diantaranya variabel

Disposisi dan variabel Struktur Birokrasi atau bisa jadi variabel – variabel yang lain.

#### **BAB VI**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 6.1 Kesimpulan

Berikut ini penulis simpulkan hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan dalam bab V di muka.

- (1) Gambaran implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah yaitu bahwa secara keseluruhan responden menilai implementasi renstra belum dilaksanakan dengan baik (rata-rata 2.72). Diantara 9 (sembilan) item yang dinilai ada 2 (dua) item dengan penilaian lebih dari rata rata dan baik, yaitu terkait peningkatan jumlah cakupan bidang tanah tersertipikatkan (3.28) dan peningkatan kecepatan legalisasi aset di pedesaaan (3.95). Sedangkan sisanya 7 (tujuh) item kesemuanya dibawah rata rata. Para responden menilai secara kuantitas pelaksanaan renstra pendaftaran tanah sudah baik, namun secara kualitas masih dibawah rata rata. Urutan penilaian terendah terletak pada item 9 (sembilan), yaitu implementasi renstra dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal (pendaftaran satu desa lengkap) (2,16).
- (2) Gambaran Faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul adalah :
  - a. Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel komunikasi antara atasan dan bawahan dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik dan menuju ke arah yang sangat baik (rata-rata 4.21).
  - b. Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel komunikasi antara
     Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan kelompok sasaran dalam

- implementasi renstra telah dilaksanakan dengan cukup, namun belum menuju ke arah yang baik (rata-rata 3.43).
- c. Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Instansi terkait dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan lebih dari sekedar cukup dan hampir baik (rata-rata 3.85).
- d. Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel sumber daya dalam implementasi renstra hanya tersedia dengan cukup (rata-rata 3.26), namun ada beberapa item sumber daya yang dipersepsikan tidak baik atau kurang oleh responden yaitu jumlah, kondisi peralatan sarana dan pra sarana (2,86), jumlah anggaran (2,67) dan waktu yang tersedia (2,53). Walaupun secara keseluruhan item sumber daya tersedia dengan penilaian cukup, namun ada 3 (tiga) item dengan kondisi yang kurang, sehingga akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi renstra
- (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi rencana strategis bidang pendaftaraan tanah di Kabupaten Bantul dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Ada pengaruh secara parsial antara komunikasi level I dan komunikasi level III terhadap situasi dan kondisi sumberdaya yang ada, dengan pengaruh masing – masing sebesar 27 % dan 22 %.
  - b. Ada pengaruh secara parsial antara variabel komunikasi antara atasan dan bawahan, variabel komunikasi antara Kantor Pertanahan dengan kelompok sasaran, variabel komunikasi antara Kantor Pertanahan dengan instansi terkait dan variabel sumber daya terhadap implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah sebesar berturut turut 30%, 22 %, 6% dan 26%

- c. Ada pengaruh secara bersama sama antara variabel komunikasi antara atasan dan bawahan, variabel komunikasi antara Kantor Pertanahan dengan kelompok sasaran, variabel komunikasi antara Kantor Pertanahan dengan instansi terkait dan variabel sumber daya terhadap variabel implementasi rencana strategis bidang pendaftaran tanah sebesar 21.5 %
- d. Variabel komunikasi secara langsung mempengaruhi implementasi renstra namun tidak pada semua level
- e. variabel komunikasi antara atasan dan bawahan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi implementasi renstra yaitu sebesar 30%.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan hal hal sebagai berikut :

- (1) Faktor Komunikasi antara Kantor Pertanahan dengan kelompok sasaran mendapat penilaian paling rendah dibandingkan dengan komunikasi dalam level yang lain, sehingga untuk meningkatkannya saran yang dapat penulis berikan adalah
  - a. Membentuk komunitas insan pertanahan di Desa Desa / kelurahan yang secara rutin melakukan kegiatan yang terkait dengan pendaftaran tanah seperti perayaan hari agraria nasional, pemetaan partisipasif dan lain sebagainya sehingga terjadi komunikasi yang lebih insentif antara Kantor Pertanahan dengan kelompok sasaran
  - b. Untuk mendapatkan umpan balik yang lebih dari masyarakat perlu dilakukan komunikasi dalam bentuk Focus Group Discussion ( diskusi kelompok terarah) atau Public Heraing (dengar pendapat publik) secara rutin dan terprogram

- c. Memperluas saluran saluran komunikasi di Desa atau kelurahan, misalnya dengan kotak saran, aplikasi - aplikasi pertanahan *mobile* atau dalam bentuk website pertanahan untuk Desa atau kelurahan yang memiliki infrastruktur yang telah siap
- (2) Komunikasi antara atasan dan bawahan di Kantor pertanahan Kabupaten Bantul telah baik, harus dipertahankan dan apabila memungkinkan lebih ditingkatkan agar tercapai hasil yang maksimal
- (3) Secara umum sumber daya di Kantor pertanahan Kabupaten Bantul perlu diperbaiki dan ditingkatkan, secara khusus yang harus menjadi perhatian yang lebih dari kantor pertanahan Kabupaten Bantul dalam perbaikan adalah terkait jumlah, kondisi peralatan sarana dan pra sarana,jumlah anggaran dan waktu.
- (4) Ada 2 (dua) item dengan penilaian lebih dari rata rata dan baik, yaitu terkait peningkatan jumlah cakupan bidang tanah tersertipikatkan dan peningkatan kecepatan legalisasi aset di pedesaaan. 2 (dua) item ini perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi karena masih ada ruang untuk peningkatan.
- (5) Ada 7 (tujuh) item yang perlu menjadi perhatian serius dan perlu diperbaiki dalam hal keberhasilan implementasi renstra bidang pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran, Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan, Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran, Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun, Penyelesaian keluhan masyarakat dan

- kasus kasus pertanahan dan Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal
- (6) Penelitian dapat dilanjutkan dengan memasukkan variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi yang belum diukur dalam penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan,L, 2017. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di kabupaten Padang Pariaman (Penelitian Survei pada SD dan SMP di Kabupaten Padang Pariaman). Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Ambar, 2017. Komunikasi Pemerintah-Pengertian, Prespektif, Prinsip dan Penjelasannya. Melalui http://pakarkomunikasi.com/komunikasi-pemerintahan. [18/06/2017].
- Agustino, Leo, 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD
- Akib, H., Tarigan, A., 2000. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,
- Anonimous, 1960. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. Jakarta
- A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, dan L.L. Berry ,1985. "A Conceptual Model of Service Quality and Its Implication for Future Research". In Journal of Marketing, vol. 49, Fall, 1985
- Arikunto, S,2003. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2016. Melalui http://www.bpn.go.id [12/10/2016].
- Bryson, J. M., 2004. Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement (Third Edition). San Francisco: Jossey- Bass Publishing Co.
- Caiden, Gerald E., 1982. *Public Administration (Second Edition*). California : Pasific Palisasdes, Palisasdes.
- Conyers, D dan Hill, P. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*.Diterjemahkan oleh Susetiawan .Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, George C., 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC, USA: Congressional Quarterly Press.
- Feldt, L. S. & Brennan, R. L., 1989. *Reliability*. Dalam Robert L. Linn (Eds.), Educational Measurement(3rd, pp 105-143). New York: American Council on Education.

- Fraenkel, Jack R. dan Norman E.Wallen, 1993. How to Design and Evalute Researche in Education. New York: Mc Graw-Hill Inc.
- Furqon, C., 2017. "Hakikat Komunikasi Organisasi". http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.\_MANAJEMEN\_FPEB/1972 07152003121-CHAIRUL\_FURQON/Artikel Organizational\_Communication.pdf [5/06/17].
- Gaspersz, Vincent, 2004. *Production Planning And Inventory Control*. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Umum.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.*Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grindle, M.S., 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*.

  Baltimore: Princetown University Town
- Harsono,D., 2009. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Tesis Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hartono, 2011. Metodologi Penelitian. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Kementerian Sekretariat Negara, 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta
- Kementerian Sekretariat Negara, 2004. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004* tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Jakarta
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jakarta
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Jakarta
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.Jakarta
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,2014. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Jakarta

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2015. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian agrarian dan tata Ruang / Badan Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019.Jakarta
- Kerlinger, 1990. Asas-asas Penelitian Behavioral. Diterjemahkan oleh Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Deutsche Stiftung Fur Internationale Entwicklung (DSE), 1999. yang dituangkan dalam Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah ,1999.
- Mamesah, Elko L., 2002. "Kegunaan Pendaftaran Tanah Bagi Pemilik Tanah".Dalam Karya Ilmiah.Universitas Sam Ratulangi .Manado
- Margono, S., 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier., 1986. "Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research". In Journal of Public Policy, Vol.6.
- Mirwan, 2016. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Hak Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah". Dalam Jurnal eJurnal Katalogis, Vol.4, No.12, Hal 84-95.2016
- Mustafa,Z., 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ndae, Alexia Yohana Da Eni. 2011. Evaluasi Farmer Managed Extension Activity (FMA) dalam Agribisnis Kakao di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. Denpasar
- Nurcholish, 2017. Implementasi Rencana Strategis Pengelolaan Taman Nasional (Studi pada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Provinsi NTB). Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Purnomo,B., 2017. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Program – Program Strategis Sanitasi Kota di Kota Batu. Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Purwanto, M Ngalim., 2002. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran.*Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, Jonathan, 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekretariat Negara, 2007. *Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Jakarta
- Silalahi, U, 2004." Komunikasi Pemerintah: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik". Dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol.17, No.2. 2004

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta

- Sugiyono, 2003. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta
- Sumarsono, 2010. Sosiolinguistik. Yogyakarta: Sabda
- Supriyanto dan Ernawati, 2010 .*Pemasaran industry dan kesehatan jasa*.Jakarta : CV andi offset.
- Suzetta, P., 2007. *Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Melalui www.bappenas.go.id. [25/10/2016].
- Thoriq ,M, 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Pada Prona Swadaya di Kabupaten Semarang. Tesis Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tiza,A.L.,Hakim,A.,Haryono,B.S., 2014." Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara)". Dalam Jurnal Wacana, Vol.17,N0.2,Hal 58-67.2014
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1994. *Perencanaan Pembangunan*.Jakarta : CV. Haji Masagung.

- United Nations, 1996. Land Administration Guidelines with Special Reference to Countries in Transition. New York and Geneva: United Nations Publication.
- Wibawa, Samodra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Gra findo Persada.
- Widodo, A.S., 2002. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera ( KUKESRA) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ( Studi Tentang Sikap, Sumberdaya dan Pengawasan Terhadap Implementasi). Tesis Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Willson and Heyyel, 1987. Hand Book Of Modern Office Management and Administration Service. New Jersey: Mc Graw Hill Inc
- Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik(Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Buku Seru
- Wrihatnolo, Randi R., dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Wungu dan Brotoharjo, 2003. *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda Dengan Merit Sistem.* Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Yamane, Taro, 1967. Statistics : An Introductory Analysis. (Third Edition). New York : Harper and Row.
- Yusana,R., 2013. *Implementasi Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sleman*. Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Zevenbergen, J., 2002. System of Land Registration, Aspects and Effects. Rotterdam: Optima Graphic Communication

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1

# REKAPITULASI DATA HASIL KUESIONER TERHADAP RESPONDEN

No. Responde n	X1 .1	X1 .2	X1 .3	X1 .4	X2 .1	X2 .2	X2 .3	X2 .4	X3 .1	X3 .2	X3 .3	X3 .4	Z. 1	Z. 2	Z. 3	Z. 4	Z. 5	Z. 6	Z. 7	Z. 8	Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	Y. 5	Y. 6	Y. 7	Y. 8	Y. 9
1	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	4	5	5	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3	4	1	2	2
2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	2	3	1	2	3	3	4	3	4	1	2	2
3	5	5	5	4	4	3	2	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	4	1	2	2
4	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	1	3	3	2	4	3	2	2	2	3
5	5	5	4	4	4	4	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	3	2	4	2	2	3
6	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	2	1	4	1	2	1	4	2
7	4	5	5	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	2	2	3	3	2	3	2	4	2	1	1
8	5	5	4	4	3	2	2	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	2	2	2	2	3	3	4	2	2	1	4	1
9	3	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	5	4	4	3	4	3	2	2	3	3	3	4	3	4	3	2	1
10	4	5	4	4	4	3	4	3	5	4	2	4	4	5	4	4	4	4	3	2	2	2	2	5	2	2	2	4	2
11	5	5	4	4	3	3	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	5	2	4	2	2	3
12	3	5	3	5	3	3	3	2	4	3	3	4	2	3	3	3	3	2	1	1	2	1	3	3	1	2	2	2	2
13	4	5	2	5	4	4	3	4	3	2	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	2	3	5	2	4	1	4	1
14	3	5	3	5	4	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	3	1	2	2	4	2
15	5	5	3	5	4	4	3	3	5	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	2	4	3	2	3
16	5	5	3	5	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	2	2	2	2	3	3	2	4	2	1	2
17	5	5	3	5	4	5	4	4	4	3	4	3	3	5	4	4	4	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2
18	3	5	5	5	4	3	4	2	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	4	3	1	2	1	2

No. Responde n	X1 .1	X1 .2	X1 .3	X1 .4	X2 .1	X2 .2	X2 .3	X2 .4	X3 .1	X3 .2	X3 .3	X3 .4	Z. 1	Z. 2	Z. 3	Z. 4	Z. 5	Z. 6	Z. 7	Z. 8	Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	Y. 5	Y. 6	Y. 7	Y. 8	Y. 9
19	5	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	2	2	1	2	2	3	3	2	4	1	2	3
20	5	2	2	5	5	4	3	3	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	3	2	1	1	3
21	5	3	3	5	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	2	2	2	2	2	4	3	2	4	2	2	1
22	5	3	5	4	3	4	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	3	4	4	3	2	2	3	5	3	2	2	2	3
23	5	4	5	4	4	3	2	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	2	2	2	5	3	4	2	4	2
24	4	5	4	5	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	3	5	1	2	2	2	3
25	5	5	5	5	3	4	2	4	2	4	3	4	4	2	4	3	3	3	2	1	2	3	4	4	3	4	3	2	3
26	5	5	5	5	3	4	3	2	3	4	3	4	4	4	5	3	5	5	3	2	3	3	3	4	3	2	3	4	2
27	5	5	5	5	4	4	2	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	4	3	2	2	1	1
28	5	5	5	5	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	5	4	4	5	3	2	4	4	4
29	4	4	5	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	2	1	3	4	2	2	3	2	2
30	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	1	1	3	3	3	4	5	3	4	2	4	3
31	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3	4	4	2	2	3	1	1
32	4	4	4	5	4	3	3	3	2	4	4	3	4	4	4	2	3	2	1	1	3	4	4	5	5	4	4	4	4
33	4	4	4	5	4	4	4	3	5	4	4	3	4	4	4	4	4	3	2	5	5	2	2	3	3	4	3	4	2
34	4	4	5	4	4	2	4	2	3	4	4	4	2	4	4	4	3	1	1	1	2	3	4	3	2	4	1	4	2
35	5	5	4	5	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	1	1	5	1	3	4	3	2	2	2	3
36	3	4	5	3	3	3	4	2	3	2	4	4	2	4	4	3	2	3	2	2	2	3	2	3	1	1	1	4	2
37	4	5	5	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	1	3	3	5	3	1	3	2	4	1	2	1
38	5	4	2	4	4	4	2	3	4	3	3	4	3	5	5	5	3	3	2	3	3	3	1	3	3	2	1	2	1
39	4	4	5	4	3	3	3	2	4	3	2	5	3	4	4	4	3	2	2	3	3	2	1	3	3	2	2	2	1
40	4	4	4	5	3	4	4	3	5	4	4	3	2	5	5	5	3	3	2	3	5	2	2	4	3	4	2	2	1

No. Responde n	X1 .1	X1 .2	X1 .3	X1 .4	X2 .1	X2 .2	X2 .3	X2 .4	X3 .1	X3 .2	X3 .3	X3 .4	Z. 1	Z. 2	Z. 3	Z. 4	Z. 5	Z. 6	Z. 7	Z. 8	Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	Y. 5	Y. 6	Y. 7	Y. 8	Y. 9
41	4	4	5	4	3	3	4	2	4	5	4	5	3	4	4	4	4	3	3	2	5	2	2	3	2	4	3	2	1
42	4	4	5	4	4	4	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	5	2	2	3	3	4	3	1	2
43	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	4	2	4	3	2	1
44	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	5	5	4	4	3	2	5	2	3	4	3	4	3	1	2
45	4	4	5	5	3	4	2	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	3	4	4	3	2	4	4	2	4	3	2	1
46	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	4	4	5	5	2	5	4	3
47	5	5	5	4	4	3	3	3	4	5	4	3	4	5	4	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	2	4	4	3
48	5	5	5	4	4	4	3	3	4	5	4	4	5	4	5	5	5	3	3	3	5	3	4	5	5	2	3	2	3
49	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	3	3	4	5	4	4	5	5	2	3	4	3
50	4	5	5	5	4	4	4	2	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	2	4	4	3
51	5	4	5	5	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	5	4	4	5	3	2	4	2	2
52	5	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3	3	4	2	2	2	4	3	2	4	3	1	2
53	5	5	4	5	4	3	4	4	4	5	3	4	3	3	4	2	4	3	4	1	3	3	3	5	2	2	2	2	2
54	4	5	5	4	4	4	3	4	3	5	3	3	4	4	5	3	3	3	4	2	3	2	2	4	3	4	1	4	3
55	5	3	4	5	4	4	2	4	3	3	4	4	3	3	4	4	2	3	3	1	3	4	4	4	3	2	2	2	2
56	4	5	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	2	3	3	2	4	5	2	3	4	3	4	3	1	3
57	4	4	4	5	2	4	3	4	3	4	3	5	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	5	2	2	3	2	2
58	4	4	5	5	3	3	3	4	3	4	3	3	3	5	3	4	3	3	2	4	5	2	4	4	3	4	2	4	3
59	4	5	5	5	4	2	3	4	3	5	4	5	3	4	2	3	3	3	1	3	3	1	3	4	2	2	1	4	2
60	4	4	4	5	3	3	3	3	4	4	4	5	3	4	2	4	3	4	1	2	5	2	2	5	3	2	1	2	2
61	4	4	5	5	3	4	4	3	5	5	4	4	2	4	3	3	4	3	1	3	3	3	3	4	2	2	1	1	2
62	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	3	2	4	4	3	2	1	2	5	2	2	5	3	1	2	2	2

No. Responde n	X1 .1	X1 .2	X1 .3	X1 .4	X2 .1	X2 .2	X2 .3	X2 .4	X3 .1	X3 .2	X3 .3	X3 .4	Z. 1	Z. 2	Z. 3	Z. 4	Z. 5	Z. 6	Z. 7	Z. 8	Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	Y. 5	Y. 6	Y. 7	Y. 8	Y. 9
63	3	4	4	5	4	4	3	2	5	4	4	5	2	2	3	4	4	3	1	1	3	1	2	4	3	1	3	1	3
64	2	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	4	4	3	4	2	2	5	1	1	5	3	1	2	2	4
65	3	4	4	5	4	3	3	3	4	4	4	5	2	4	3	4	2	4	2	3	3	2	2	4	2	2	3	2	3
66	3	4	4	5	4	2	4	2	5	4	5	4	2	3	5	4	3	4	3	4	3	3	2	3	2	1	2	2	4
67	3	4	4	5	3	3	4	3	5	4	5	4	1	4	4	4	3	3	4	4	3	2	1	4	2	2	3	4	3
68	2	4	5	5	3	4	4	4	3	3	3	3	1	5	3	4	3	2	4	4	3	3	1	1	3	4	2	2	3
69	3	4	4	5	4	3	4	3	4	5	5	4	1	4	4	3	3	3	4	4	5	2	1	3	2	2	3	1	3
70	3	4	4	5	3	4	3	3	4	4	4	5	4	3	3	2	4	1	4	3	3	3	2	4	3	4	2	2	2
71	3	4	4	5	3	4	4	3	5	4	4	5	3	4	4	3	3	1	3	2	3	2	2	3	2	2	3	1	1
72	5	4	4	5	3	3	3	3	2	4	4	2	2	5	5	4	3	1	3	1	3	1	3	4	1	4	2	2	1
73	5	4	4	5	4	3	2	3	3	3	3	3	3	5	4	3	4	2	3	2	5	3	2	3	1	2	1	4	1
74	3	3	2	5	4	3	3	4	5	4	4	3	4	5	3	4	3	3	2	3	3	1	2	4	3	2	2	2	1
75	2	3	3	5	2	5	2	3	4	4	4	4	5	4	4	3	2	3	3	2	2	1	4	3	2	2	3	2	2
76	3	2	3	5	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	5	3	3	2	2	1	3	2	3	4	1	2	2	2	3
77	2	3	3	5	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	2	2	2	2	3	2	4	2	4	2	1	2
78	2	3	3	5	2	4	4	3	4	4	5	5	2	3	3	4	3	2	1	3	3	2	2	3	3	2	2	2	1
79	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	2	1	2	5	2	2	3	3	1	1	4	2
80	2	3	3	5	4	4	4	3	4	4	5	3	3	3	2	4	3	2	4	1	3	2	3	5	2	2	2	2	3
81	3	4	3	4	4	4	2	4	5	4	4	4	2	2	3	2	4	1	3	2	5	3	2	4	3	4	1	2	2
82	3	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	2	3	3	4	4	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2	1	2	4
83	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	5	3	3	5	3	4	1	1	3
84	3	4	3	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	2	3	5	3	3	4	2	2	3	4	2

No. Responde n	X1 .1	X1 .2	X1 .3	X1 .4	X2 .1	X2 .2	X2 .3	X2 .4	X3 .1	X3 .2	X3 .3	X3 .4	Z. 1	Z. 2	Z. 3	Z. 4	Z. 5	Z. 6	Z. 7	Z. 8	Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	Y. 5	Y. 6	Y. 7	Y. 8	Y. 9
85	5	2	3	5	3	3	3	3	4	3	4	4	2	4	3	4	2	3	3	2	5	3	3	5	3	4	3	4	1
86	3	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	5	3	4	2	4	3	4	3	1	5	3	2	4	3	2	2	4	1
87	5	4	2	5	4	3	3	4	4	3	4	3	2	4	3	3	4	3	3	1	3	4	3	5	3	2	2	2	1
88	5	4	2	5	4	3	3	3	4	3	5	5	3	4	4	4	3	2	3	1	3	3	3	5	3	2	3	1	1

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI DATA INTERVAL ( HASIL KONVERSI DATA ORIGINAL KE DATA INTERVAL DENGAN *METODE SUCCESIVE INTERVAL*)

No.	X1.	X1.	X1.	X1.	X2.	X2.	X2.	X2.	Х3.	Х3.	Х3.	Х3.		l					I	l									T.,,
Responden	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9
1	3.0 0	2.0 0	2.0	3.0 0	3.0 8	2.0	2.0 0	2.0	3.3 3	2.0	2.0	3.1 1	4.0 0	5.0 0	5.0 0	4.0 0	4.0 0	4.0 0	4.0 0	3.0	2.2 8	2.2 4	2.4 1	2.5 6	3.3 7	3.8 1	1.0 0	2.2 8	2.1
2	1.9 9	2.8 7	2.7	2.4 5	3.7 1	2.2 9	3.4 3	3.5 8	3.1 6	3.3 9	3.6 3	2.3 5	2.9	3.3	3.2 6	3.3	3.5 7	1.9 5	2.7 6	1.0	2.2 6	3.3	3.1 1	3.6 8	3.3 7	3.8 2	1.0	2.2 7	2.1
3	3.9 1	4.2 0	3.8 5	2.4 5	3.7 1	2.2 9	1.0 0	1.0 0	3.1 6	3.3 9	3.6 3	2.3 5	2.9 2	2.1	2.1	2.0 9	2.2 9	2.9 0	2.7 6	2.7 4	2.2 6	2.2	2.1 6	2.5 5	2.1 8	3.8 2	1.0	2.2 7	2.1 0
4	3.9	4.2	3.8 5	2.4	3.7	2.2	3.4	3.5	3.1	3.3	2.1	3.5	3.8	3.3	3.2	3.3	3.5	3.9	1.0	1.0	3.3	3.3	2.1	3.6	3.3	2.4	2.1	2.2	3.0
5	3.9	4.2 0	2.7	2.4	3.7	3.6	2.1	2.3	4.3	4.7	3.6	3.5	3.8	3.3	3.2	3.3	3.5	3.9	3.8	3.6	2.2	2.2	4.1	2.5	2.1	3.8	2.1	2.2	3.0
6	3.9	4.2	2.7	2.4	3.7	3.6	2.1	3.5	4.3	4.7	3.6	3.5	3.8	4.6	4.5	3.3	3.5	3.9	3.8	3.6	3.3	2.2	1.0	3.6	1.0	2.4	1.0	3.5	2.1
7	2.8	4.2 0	3.8	2.4	2.2	2.2	2.1	2.3	3.1	3.3	2.1	3.5	3.8	3.3	3.2	3.3	1.0	3.9	1.9	2.0	3.3	3.3	2.1	2.5	2.1	3.8	2.1	1.0	1.0
8	3.9	4.2	2.7	2.4	2.2	1.0	1.0	3.5	4.3	4.7	3.6	3.5	3.8	4.6	3.2	3.3	3.5	1.9	1.9	2.0	2.2	3.3	3.1	3.6	2.1	2.4	1.0	3.5	1.0
9	1.9	4.2	2.7	2.4	3.7	2.2	3.4	2.3	3.1	3.3	3.6	2.3	5.0	3.3	3.2	2.0	3.5	2.9	1.9	2.0	3.3	3.3	3.1	3.6	3.3	3.8	3.1	2.2	1.0
10	2.8	4.2	2.7	2.4	3.7	2.2	3.4	2.3	4.3	3.3	1.0	3.5	3.8	4.6	3.2	3.3	3.5	3.9	2.7	2.0	2.2	2.2	2.1	4.8	2.1	2.4	2.1	3.5	2.1
11	3.9	4.2	2.7	2.4	2.2	2.2	1.0	2.3	3.1	2.1	3.6	3.5	3.8	3.3	3.2	3.3	3.5	3.9	3.8	3.6	2.2	2.2	2.1	4.8	2.1	3.8	2.1	2.2	3.0
12	1.9	0 4.2	1.9	5 3.9	2.2	9 2.2	2.1	1.0	6 3.1	2.1	2.1	3.5	2.0	2.1	6 2.1	2.0	2.2	7 1.9	1.0	1.0	2.2	1.0	6 3.1	2.5	1.0	2.4	2.1	2.2	2.1
13	9 2.8	0 4.2	1.0	3.9	3.7	3.6	2.1	3.5	6 2.1	1.0	9 3.6	2.3	3.8	2.1	2.1	9 3.3	9 3.5	5 2.9	3.8	2.7	6 2.2	2.2	3.1	5 4.8	2.1	3.8	1.0	7 3.5	1.0
14	1.9	0 4.2	1.9	8 3.9	3.7	5 2.2	7 2.1	8 2.3	1.0	2.1	3.6	5 2.3	9 3.8	3 2.1	2.1	2.0	7.2.2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.1	2.5	1.0	2.4	2.1	7 3.5	0 2.1
	9 3.9	0 4.2	3 1.9	3.9	3.7	9 3.6	7 2.1	2.3	0 4.3	7 3.3	3.6	5 4.7	9 3.8	3 2.1	3.2	9	9 3.5	0 2.9	0 2.7	3.6	0 3.3	3.3	6 3.1	5 3.6	0 2.1	0 3.8	3.1	7 2.2	3.0
15	3.9	0 4.2	1.9	3.9	3.7	5 3.6	7 2.1	1 2.3	2.1	9 2.1	3.6	2.3	9 3.8	3 2.1	6 3.2	3.3	7	0 2.9	6	3 2.0	2.2	3 2.2	3.1	2.5	2.1	3.8	2.1	7	2.1
16	3.9	0	1.9	8	3.7	5.3	7	1	2	7	3.6	5 2.3	9	3	6 3.2	3.3	7 3.5	0	6	0	6 3.3	3.3	1	5 2.5	8	2	3.1	0 2.2	0 2.1
17	1	4.2	3	3.9	1	7	3	3.5	3.1	2.1	3	5	2.9	4.6	6	0	7	1.9 5	1.9	2.0	4	3	2.1 6	5	3.3	2.4	2	7	0
18	1.9 9	4.2 0	3.8 5	3.9	3.7	2.2 9	3.4	1.0	1.0	2.1	3.6	3.5	2.9	2.1	2.1	2.0 9	2.2 9	2.9	2.7 6	2.7	1.0	2.2	2.1 6	3.6 8	3.3	1.0	2.1	1.0	2.1
19	3.9 1	2.8 7	3.8 5	3.9 8	3.7 1	3.6 5	3.4 3	2.3	3.1 6	3.3 9	3.6 3	2.3 5	2.9 2	3.3 0	3.2 6	3.3 0	3.5 7	1.9 5	1.9 6	1.0 0	2.2 6	2.2 3	3.1 1	2.5 5	2.1 8	3.8 2	1.0 0	2.2 7	3.0 8
20	3.9 1	1.0 0	1.0 0	3.9 8	5.8 3	3.6 5	2.1 7	2.3	3.1 6	4.7 2	3.6 3	2.3 5	3.8 9	3.3 0	3.2 6	3.3 0	3.5 7	3.9 7	3.8 1	3.6 3	3.3 4	3.3 3	3.1 1	4.8 4	3.3 7	2.4 0	1.0 0	1.0 0	3.0 8
21	3.9 1	1.8 2	1.9 3	3.9 8	2.2	1.0 0	2.1 7	2.3 1	3.1 6	3.3 9	3.6 3	2.3 5	2.9 2	2.1	2.1	3.3 0	3.5 7	1.9 5	1.9 6	2.0	2.2 6	2.2	4.1 4	2.5 5	2.1 8	3.8 2	2.1	2.2 7	1.0 0

No. Responden	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1.	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X3.	X3. 2	X3. 3	X3. 4	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9
22	3.9	1.8	3.8	2.4 5	2.2	3.6 5	2.1	3.5 8	2.1	3.3	3.6	3.5	2.0	3.3	2.1	3.3	2.2	3.9	3.8	2.7	2.2	2.2	3.1	4.8	3.3	2.4	2.1	2.2	3.0 8
23	3.9	2.8	3.8	2.4	3.7	2.2	1.0	3.5	2.1	3.3	3.6	3.5	3.8	2.1	2.1	2.0	3.5	3.9	2.7	3.6	2.2	2.2	2.1	4.8	3.3	3.8	2.1	3.5	2.1
24	2.8	4.2	2.7	3.9	2.2	3.6	3.4	3.5	2.1	3.3	3.6	3.5	3.8	3.3	3.2	3.3	3.5	2.9	2.7	2.0	2.2	2.2	3.1	4.8	1.0	2.4	2.1	2.2	3.0
25	3.9	4.2	3.8	3.9	2.2	3.6	1.0	3.5 8	1.0	3.3	2.1	3.5	3.8	1.0	3.2	2.0	2.2	2.9	1.9	1.0	2.2	3.3	4.1	3.6	3.3	3.8	3.1	2.2	3.0
26	3.9	4.2	3.8 5	3.9	2.2	3.6	2.1	1.0	2.1	3.3	2.1	3.5	3.8	3.3	4.5	2.0	5.0	5.1 6	2.7	2.0	3.3	3.3	3.1	3.6	3.3	2.4	3.1	3.5	2.1
27	3.9	4.2	3.8	3.9 8	3.7	3.6	1.0	2.3	2.1	3.3	2.1	3.5	3.8	3.3	3.2	2.0	2.2	2.9	2.7	2.7	2.2	2.2	2.1	3.6	3.3	2.4	2.1	1.0	1.0
28	3.9	4.2	3.8	3.9	3.7	3.6	3.4 3	2.3	2.1	3.3	2.1	3.5	3.8	3.3	3.2	3.3	3.5	2.9	6 2.7 6	2.0	4.5	4.4	4.1	4.7	3.3	2.4	4.1	3.5	4.2
29	2.8	2.8	3.8	2.4	2.2	2.2 9	2.1	2.3	2.1	3.3 9	2.1	3.5	3.8	2.1	3.2	3.3	3.5	2.9	2.7	3.6	2.2	1.0	3.1	3.6	2.1	2.4	3.1	2.2	2.1
30	2.8	2.8	3.8 5	2.4	3.7	3.6	3.4	3.5	3.1 6	3.3	3.6	3.5	2.9	3.3	2.1	2.0	2.2	1.0	1.0	2.7	3.3	3.3	4.1	4.8	3.3	3.8	2.1	3.5	3.0
31	2.8	2.8	3.8	2.4	3.7	3.6	5.2	3.5 8	3.1 6	3.3	3.6	2.3	2.9	2.1	1.0	1.0	2.2	1.9	1.9	2.0	3.3	3.3	4.1	3.6	2.1	2.4	3.1	1.0	1.0
32	2.8	2.8	2.7	3.9	3.7	2.2	2.1	2.3	1.0	3.3	3.6	2.3	3.8	3.3	3.2 6	1.0	2.2	1.9 5	1.0	1.0	3.3	4.4	4.1	4.8	4.7	3.8	4.1	3.5	4.2
33	2.8	2.8	2.7	3.9	3.7	3.6	3.4	2.3	4.3	3.3	3.6	2.3	3.8	3.3	3.2	3.3	3.5	2.9	1.9	5.0	4.5	2.2	2.1	2.5	3.3	3.8	3.1	3.5	2.1
34	2.8	2.8	3.8	2.4	3.7	1.0	3.4	1.0	2.1	3.3	3.6	3.5	2.0	3.3	3.2 6	3.3	2.2	1.0	1.0	1.0	2.2	3.3	4.1	2.5	2.1	3.8	1.0	3.5	2.1
35	3.9	4.2	2.7	3.9	3.7	2.2	3.4	2.3	2.1	2.1	2.1	3.5	3.8	2.1	2.1	2.0	2.2	1.9	1.0	1.0	4.5	1.0	3.1	3.6	3.3	2.4	2.1	2.2	3.0
36	1.9	2.8	3.8	1.0	2.2	2.2	3.4	1.0	2.1	1.0	3.6	3.5	2.0	3.3	3.2	2.0	1.0	2.9	1.9	2.0	2.2	3.3	2.1	2.5	1.0	1.0	1.0	3.5	2.1
37	2.8	4.2	3.8 5	1.0	3.7	2.2	2.1 7	2.3	2.1	2.1	3.6	3.5	2.9	3.3	3.2 6	3.3	3.5	1.0	2.7	2.7	4.5	3.3	1.0	2.5	2.1	3.8	1.0	2.2	1.0
38	3.9	2.8	1.0	2.4	3.7	3.6	1.0	2.3	3.1	2.1	2.1	3.5	2.9	4.6	4.5 2	4.7	2.2	2.9	1.9	2.7	3.3	3.3	1.0	2.5	3.3	2.4	1.0	2.2	1.0
39	2.8	2.8	3.8	2.4	2.2	2.2	2.1	1.0	3.1 6	2.1	1.0	4.7	2.9	3.3	3.2	3.3	2.2	1.9	1.9	2.7	3.3	2.2	1.0	2.5	3.3	2.4	2.1	2.2	1.0
40	2.8	2.8	2.7	3.9	2.2	3.6	3.4	2.3	4.3	3.3	3.6	2.3	2.0	4.6	4.5	4.7	2.2	2.9	1.9	2.7	4.5	2.2	2.1	3.6	3.3	3.8	2.1	2.2	1.0
41	2.8	2.8	3.8	2.4	2.2	2.2	3.4	1.0	3.1 6	4.7	3.6	4.7	2.9	3.3	3.2	3.3	3.5	2.9	2.7	2.0	4.5	2.2	2.1	2.5	2.1	3.8	3.1	2.2	1.0
42	2.8	2.8	3.8	2.4	3.7	3.6	2.1	2.3	2.1	3.3	3.6	4.7	3.8	3.3	3.2	3.3	3.5	2.9	3.8	2.7	4.5	2.2	2.1	2.5	3.3	3.8	3.1	1.0	2.1
43	2.8	2.8	3.8	2.4	3.7	3.6	3.4	5.0	2.1	3.3	3.6	2.3	2.9	3.3	3.2	3.3	3.5	3.9	3.8	3.6	3.3	2.2	2.1	3.6	2.1	3.8	3.1	2.2	1.0
44	1.9	4.2	3.8	3.9	3.7	3.6	3.4	3.5	3.1	3.3	3.6	2.3	5.0	3.3	4.5	4.7	3.5	3.9	2.7	2.0	4.5	2.2	3.1	3.6	3.3	3.8	3.1	1.0	2.1
45	2.8	2.8	3.8 5	3.9	2.2	3.6	1.0	3.5	3.1	4.7	3.6	4.7	5.0	4.6	4.5	3.3	3.5	2.9	3.8	3.6	3.3	2.2	4.1	3.6	2.1	3.8	3.1	2.2	1.0

No. Responden	X1. 1	X1.	X1. 3	X1.	X2.	X2.	X2. 3	X2. 4	X3.	X3.	X3.	X3. 4	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9
46	3.9	4.2 0	3.8 5	2.4 5	3.7 1	3.6 5	3.4	3.5 8	4.3	4.7	3.6	4.7	5.0 1	4.6	4.5	4.7	3.5 7	3.9 7	3.8	2.7 4	4.5	4.4 8	4.1 4	4.8	4.7 2	2.4	4.9 4	3.5 7	3.0 8
47	3.9	4.2	3.8	2.4	3.7	2.2	2.1	2.3	3.1	4.7	3.6	2.3	3.8	4.6	3.2	4.7	3.5	3.9	3.8	2.7	3.3	4.4	4.1	4.8	4.7	2.4	4.1	3.5	3.0
48	3.9	4.2	3.8	2.4 5	3.7	3.6	2.1 7	2.3	3.1	4.7	3.6	3.5	5.0	3.3	4.5	4.7	5.0	2.9	2.7	2.7	4.5	3.3	4.1	4.7	4.7	2.4	3.1	2.2	3.0
49	3.9	4.2	3.8	2.4 5	3.7	3.6	3.4	3.5	4.3	4.7	3.6	3.5	5.0	3.3	4.5	4.7	3.5	2.9	2.7	3.6	4.5	4.4 8	4.1	4.8	4.7	2.4	3.1	3.5	3.0
50	2.8	4.2	3.8	3.9 8	3.7	3.6	3.4	1.0	3.1	4.7	3.6	4.7	5.0	3.3	4.5	4.7	5.0	5.1	3.8	3.6	4.5	4.4 8	4.1	4.8	4.7	2.4	4.1	3.5	3.0
51	3.9	2.8	3.8	3.9	2.2	2.2	2.1	2.3	3.1	3.3	2.1	3.5	2.9	2.1	3.2	3.3	3.5	2.9	3.8	2.7	4.5	4.4	4.1	4.8	3.3	2.4	4.1	2.2	2.1
52	3.9	2.8	3.8	3.9	3.7	3.6	3.4	2.3	2.1	3.3	3.6	3.5	2.0	3.3	2.1	2.0	2.2	2.9	3.8	2.0	2.2	2.2	4.1	2.5	2.1	3.8	3.1	1.0	2.1
53	3.9	4.2	2.7	3.9 8	3.7	5 2.2 9	3.4	3.5	3.1	9 4.7 2	2.1	3.5	2.9	2.1	3.2	1.0	3.5	2.9	3.8	1.0 0	3.3 4	3 3.3 3	3.1	4.8	2.1 8	2.4	2.1	2.2	2.1
54	2.8	4.2	3.8	2.4	3.7	3.6	2.1	3.5	2.1	4.7	2.1	2.3	3.8	3.3	4.5	2.0	2.2	2.9	3.8	2.0	3.3	2.2	2.1	3.6	3.3	3.8	1.0	3.5	3.0
55	3.9	1.8	2.7	3.9	3.7	3.6	1.0	3.5	2.1	2.1	3.6	3.5	2.9	2.1	3.2	3.3	1.0	2.9	2.7	1.0	3.3	4.4	4.1	3.6	3.3	2.4	2.1	2.2	2.1
56	2.8	4.2	2.7	2.4	3.7	2.2	2.1 7	2.3	2.1	3.3	2.1	3.5	2.9	3.3	2.1	1.0	2.2	2.9	1.9	3.6	4.5	2.2	3.1	3.6	3.3	3.8	3.1	1.0	3.0
57	2.8	2.8	2.7	3.9	1.0	3.6	2.1	3.5	2.1	3.3	2.1	4.7	2.9	2.1	3.2	2.0	3.5	2.9	2.7	3.6	3.3	3.3	3.1	4.8	2.1	2.4	3.1	2.2	2.1
58	2.8	2.8	3.8	3.9	2.2	2.2	7 2.1 7	3.5	2.1	3.3	2.1	2.3	2.9	4.6	2.1	3.3	2.2	2.9	1.9	3.6	4.5	2.2	4.1	3.6	3.3	3.8	2.1	3.5	3.0
59	2.8	4.2	3.8	3.9	3.7	1.0	2.1	3.5	2.1	4.7	3.6	4.7	2.9	3.3	1.0	2.0	2.2	2.9	1.0	2.7	3.3	1.0	3.1	3.6	2.1	2.4	1.0	3.5	2.1
60	2.8	2.8	2.7	3.9	2.2	2.2	2.1	2.3	3.1	3.3	3.6	4.7	2.9	3.3	1.0	3.3	2.2	3.9	1.0	2.0	4.5	2.2	2.1	4.8	3.3	2.4	1.0	2.2	2.1
61	2.8	2.8	3.8	3.9	2.2	3.6	3.4	2.3	4.3	4.7	3.6	3.5	2.0	3.3	2.1	2.0	3.5	2.9	1.0	2.7	3.3	3.3	3.1	3.6	2.1	2.4	1.0	1.0	2.1
62	3.9	4.2	5 3.8	3.9	3.7	3.6	3.4	5.0	4.3	3.3	3.6	4.7	2.9	1.0	3.2	3.3	2.2	1.9	1.0	2.0	4.5	2.2	2.1	4.8	3.3	1.0	2.1	2.2	2.1
63	1.9	2.8	2.7	3.9	3.7	3.6	2.1	1.0	4.3	9 3.3	3.6	4.7	2.0	1.0	6 2.1	3.3	9 3.5	5 2.9	1.0	1.0	3.3	1.0	2.1	3.6	3.3	1.0	3.1	1.0	3.0
64	1.0	7 2.8	3.8	3.9	3.7	5 3.6	3.4	3.5	4.3	9 4.7	3.6	3.5	2.9	2.1	3.2	3.3	7 2.2	3.9	1.9	2.0	4.5	1.0	1.0	4.8	3.3	1.0	2.1	2.2	4.2
65	1.9	7 2.8	5 2.7	3.9	3.7	5 2.2	3 2.1	2.3	3.1	3.3	3.6	4.7	2.0	3.3	6 2.1	3.3	1.0	3.9	1.9	2.7	3.3	2.2	2.1	3.6	7 2.1	2.4	3.1	7 2.2	3.0
66	9 1.9	7 2.8	2.7	3.9	3.7	9	7 3.4	1.0	6 4.3	9.3.3	3 5.2	3.5	2.0	2.1	2 4.5	3.3	2.2	7 3.9	6 2.7	3.6	3.3	3.3	6 2.1	8 2.5	8 2.1	1.0	2.1	7 2.2	8 4.2
67	9 1.9	7 2.8	2.7	8 3.9	1 2.2	0 2.2	3.4	0 2.3	2 4.3	9.3.3	9 5.2	1 3.5	1.0	3.3	3.2	0 3.3	9 2.2	7 2.9	6 3.8	3.6	3.3	3 2.2	6 1.0	5 3.6	8 2.1	0 2.4	2 3.1	7 3.5	3.0
68	9	7 2.8	3.8	8 3.9	3 2.2	9 3.6	3.4	3.5	2.1	9 2.1	9 2.1	2.3	1.0	0 4.6	6 2.1	0 3.3	9 2.2	0 1.9	3.8	3.6	3.3	3.3	1.0	1.0	3.3	0 3.8	2.1	7 2.2	3.0
	0	7 2.8	5 2.7	3.9	3.7	5 2.2	3.4	2.3	3.1	7.7	9 5.2	5 3.5	1.0	3.3	3.2	2.0	9 2.2	5 2.9	3.8	3.6	4.5	3 2.2	1.0	0 2.5	7 2.1	2.4	3.1	7	3.0
69	9	7	2	8	1	9	3	1	6	2	9	1	0	0	6	9	9	0	1	3	3	3	0	5	8	0	2	0	8

No.	X1.	X1.	X1.	X1.	X2.	X2.	X2.	X2.	Х3.	X3.	X3.	X3.	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9
Responden 70	1.9	2.8	2.7	3.9	2.2	3.6	2.1	2.3	3.1	3.3	3.6	4.7	3.8	2.1	2.1	1.0	3.5	1.0	3.8	2.7	3.3	3.3	2.1	3.6	3.3	3.8	2.1	2.2	2.1
71	9 1.9 9	2.8	2.7	3.9	2.2	5 3.6 5	3.4	2.3	4.3	9 3.3 9	3.6	4.7 2	9 2.9 2	3.3	3.2	2.0	2.2	1.0	2.7	2.0	3.3	2.2	2.1	2.5	2.1	2.4	3.1	1.0	1.0
72	3.9	2.8	2.7	3.9	2.2	2.2	2.1	2.3	1.0	3.3	3.6	1.0	2.0	4.6	4.5	3.3	2.2	1.0	2.7	1.0	3.3	1.0	3.1	3.6	1.0	3.8	2.1	2.2	1.0
73	3.9	2.8	2.7	3.9	3.7	2.2	1.0	2.3	2.1	2.1	2.1 9	2.3	2.9	4.6	3.2	2.0	3.5	1.9	2.7	2.0	4.5	3.3	2.1	2.5	1.0	2.4	1.0	3.5	1.0
74	1.9	1.8	1.0	3.9	3.7	2.2	2.1	3.5	4.3	3.3	3.6	2.3	3.8	4.6	2.1	3.3	2.2	2.9	1.9	2.7	3.3	1.0	2.1	3.6	3.3	2.4	2.1	2.2	1.0
75	1.0	1.8	1.9	3.9 8	1.0	5.3	1.0	2.3	3.1	3.3	3.6	3.5	5.0	3.3	3.2	2.0	1.0	2.9	2.7	2.0	2.2	1.0	4.1 4	2.5	2.1	2.4	3.1	2.2	2.1
76	1.9	1.0	1.9	3.9 8	3.7	3.6	2.1	3.5	3.1 6	4.7	3.6	4.7	3.8	3.3	4.5	2.0	2.2	1.9	1.9	1.0	3.3	2.2	3.1	3.6	1.0	2.4	2.1	2.2	3.0
77	1.0	1.8	1.9	3.9 8	3.7	3.6 5	3.4	2.3	3.1 6	4.7	3.6	3.5 1	2.9	3.3	3.2 6	2.0	3.5 7	1.9 5	1.9	2.0	2.2	3.3	2.1	3.6 8	2.1	3.8	2.1	1.0	2.1
78	1.0	1.8	1.9	3.9	1.0	3.6	3.4	2.3	3.1	3.3	5.2 9	4.7	2.0	2.1	2.1	3.3	2.2	1.9	1.0	2.7	3.3	2.2	2.1	2.5	3.3	2.4	2.1	2.2	1.0
79	2.8	1.8 2	1.9 3	2.4	3.7	3.6 5	2.1 7	2.3	2.1	2.1 7	2.1 9	2.3 5	2.9	3.3	2.1 2	3.3	1.0	1.9 5	1.0	2.0	4.5 3	2.2	2.1 6	2.5 5	3.3 7	1.0	1.0	3.5 7	2.1
80	1.0	1.8 2	1.9 3	3.9 8	3.7 1	3.6 5	3.4	2.3	3.1 6	3.3 9	5.2 9	2.3	2.9	2.1	1.0	3.3	2.2 9	1.9 5	3.8	1.0	3.3	2.2	3.1 1	4.8 4	2.1 8	2.4	2.1	2.2 7	3.0
81	1.9 9	2.8 7	1.9 3	2.4	3.7 1	3.6 5	1.0	3.5 8	4.3	3.3	3.6	3.5 1	2.0	1.0	2.1	1.0	3.5 7	1.0	2.7 6	2.0	4.5 3	3.3	2.1 6	3.6 8	3.3	3.8	1.0	2.2 7	2.1
82	1.9 9	2.8 7	1.9 3	2.4	3.7 1	2.2 9	3.4	3.5 8	4.3 2	3.3 9	3.6	1.0 0	2.9	2.1	3.2 6	3.3	2.2 9	1.9 5	1.9 6	2.7	3.3 4	3.3	2.1 6	2.5 5	2.1 8	2.4 0	1.0	2.2 7	4.2 4
83	2.8	2.8 7	1.9 3	2.4	3.7 1	3.6 5	3.4	3.5 8	4.3	3.3 9	3.6	2.3	3.8 9	3.3	2.1	2.0 9	2.2 9	2.9	2.7 6	3.6 3	4.5 3	3.3	3.1 1	4.7 2	3.3	3.8	1.0	1.0	3.0 8
84	1.9 9	2.8	1.9	3.9 8	3.7 1	3.6 5	3.4	2.3	3.1 6	3.3	3.6	3.5	2.9	2.1	3.2 6	3.3	2.2	3.9 7	1.9	2.7	4.5	3.3	3.1 1	3.6 8	2.1 8	2.4	3.1	3.5 7	2.1
85	3.9 1	1.0	1.9 3	3.9 8	2.2	2.2	2.1 7	2.3	3.1 6	2.1	3.6	3.5	2.0	3.3	2.1	3.3	1.0	2.9	2.7	2.0	4.5 3	3.3	3.1	4.8	3.3	3.8	3.1	3.5	1.0
86	1.9	2.8	2.7	3.9	3.7	3.6	3.4	2.3	3.1 6	2.1	3.6	4.7	2.9	3.3	1.0	3.3	2.2	3.9	2.7	1.0	4.5	3.3	2.1	3.6	3.3	2.4	2.1	3.5	1.0
87	3.9	2.8	1.0	3.9	3.7	2.2	2.1 7	3.5	3.1 6	2.1	3.6	2.3	2.0	3.3	2.1	2.0	3.5 7	2.9	2.7	1.0	3.3	4.4	3.1	4.8	3.3	2.4	2.1	2.2	1.0
88	3.9	2.8	1.0	3.9 8	3.7	2.2	2.1 7	2.3	3.1 6	2.1	5.2 9	4.7	2.9	3.3	3.2	3.3	2.2	1.9 5	2.7 6	1.0	3.3	3.3	3.1	4.7	3.3	2.4	3.1	1.0	1.0

KUESIONER PENELITIAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM BIDANG PENDAFTARAN TANAH ( Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

## Yth. Bapak / Ibu / Saudara / i

Sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi, kami diwajibkan untuk melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang telah diajarkan. Sehubungan dengan hal tersebut sudilah kiranya Bapak / Ibu / Sdr / i untuk menjadi responden dari penelitian kami. Adapun penlelitian kami berjudul Faktor – Faktor Yang Mempegaruhi Implementasi Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dalam Bidang Pendaftaran Tanah Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengisian kuesioner ini dilakukan untuk tujuan penulisan ilmiah guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister (S-2). Penulis tidak menyebutkan identitas responden dalam tulisan dan benar - benar menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari responden. Penulis mohon kerjasama dan bantuan responden dalam pengisian formulir ini.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan partisipasi dan mohon kesediaan Bapak / Ibu / Sdr / i untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dan menuliskan jawaban yang sebenar - benarnya sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Atas kesediaan dan kerja sama Bapak / Ibu / Sdr / i, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

#### PETUNJUK PENGISIAN:

- 1. Bacalah dengan baik setiap pertanyaan dan pilih jawaban sesui dengan keadaan yang sebenarnya
- 2. Isilah jawaban dengan cara memberi tanda silang pada kotak jawaban yang dianggap paling tepat
- 3. Jawablah seluruh pertanyaan tanpa ada yang terlewatkan

A. ID	ENTITAS RESP	ONDEN		
1. Na	ama lengkap		L/P	Usia :
	disertai gelar)			
2. Ja	abatan			

3. Alamat	
4. Telp	
5. E-mail	

#### **B. DAFTAR PERTANYAAN**

## X1. Komunikasi level I (Komunikasi antara atasan dan bawahan)

- 1. Menurut pendapat anda, keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dengan bawahan dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah memadahi (via telp,wa,sms, verbal langsung, tertulis)
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 2. Menurut pendapat anda, intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah pegawai yang tersosialisasikan) antara atasan dengan bawahan dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017telah memadahi
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- Menurut pendapat anda, ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara atasan dengan bawahan dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 – 2017 telah memadahi
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 4. Menurut pendapat anda, kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah memadahi sehingga tidak banyak pertanyaan dari pelaksana program
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju

# X2. Komunikasi level II ( komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Kelompok sasaran, Desa / Kelurahan, masyarakat)

- Menurut pendapat anda, keragaman dan kelancaran komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Kelompok sasaran dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 – 2017 telah memadahi (via telp, wa,sms, verbal, tertulis, internet)
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 2. Menurut pendapat anda, intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah masyarakat yang tersosialisasikan) antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Kelompok sasaran dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah memadahi
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 3. Menurut pendapat anda, ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Kelompok sasaran dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah memadahi
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 4. Menurut pendapat anda, kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Kelompok sasaran dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah memadahi sehingga tidak banyak pertanyaan dari masyarakat kelompok sasaran
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju

## X3. Komunikiasi level III (komunikasi antara Kantor Pertanahan Kab Bantul dengan instansi terkait, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Provinsi DIY, ISI,Surveyor Berlisensi, Bakosurtanal dII)

- Menurut pendapat anda, keragaman dan kelancaran komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Instansi terkait dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 - 2017 telah memadahi (via telp, wa,sms, verbal, tertulis, internet)
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 2. Menurut pendapat anda, intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah instansi lain yang tersosialisasikan) antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan instansi terkait dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah memadahi
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 3. Menurut pendapat anda, ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Instansi terkait dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah memadahi
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 4. Menurut pendapat anda, kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan instansi terkait dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah memadahi sehingga tidak banyak pertanyaan dari pihak instansi tersebut
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuiu
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju

## Z. Sumber Daya

1. Menurut pendapat anda, jumlah, tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian,

- Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah sesuai dengan kebutuhan
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 2. Menurut pendapat anda, tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah sesuai
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 3. Menurut pendapat anda, tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah pada Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah sesuai ketentuan yang berlaku
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- **4.** Menurut pendapat anda, informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah mencukupi
- (1) Sangat Tidak Setuiu
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 5. Menurut pendapat anda, koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana dalam Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah dilaksanakan dengan baik
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- **6.** Menurut pendapat anda, Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah memadahi dalam mendukung pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 7. Menurut pendapat anda, Jumlah anggaran dalam pelaksanaan Program

- Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah mencukupi kebutuhan
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 8. Menurut pendapat anda, waktu yang tersedia mencukupi untuk penyelesaian Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
  - Y. Implementasi rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Dalam bidang pendaftaran tanah (PTSL / Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
- Menurut pendapat anda, Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 - 2017 telah berhasil meningkatkan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 2. Menurut pendapat anda, Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 2017 telah berhasil meningkatkan kualitas peta dasar pendaftaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- Menurut pendapat anda, pada tahun 2015 2017 Kantor Pertanahan Kab. Bantul telah berhasil meningkatkan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- Menurut pendapat anda, pada tahun 2015 2017 Kantor Pertanahan Kab. Bantul telah berhasil meningkatkan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan

- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 5. Menurut pendapat anda, pada tahun 2015 2017 Kantor Pertanahan Kab. Bantul telah berhasil meningkatkan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- Menurut pendapat anda, Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 - 2017 telah berhasil meningkatkan luas cakupan peta dasar pendaftaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- Menurut pendapat anda, pada tahun 2015 2017 Kantor Pertanahan Kab. Bantul telah berhasil menyelesaikan jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- 8. Menurut pendapat anda, pada tahun 2015 2017 Kantor Pertanahan Kab. Bantul telah berhasil menyelesaikan keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju
- Menurut pendapat anda, Program Pendaftaran Tanah (Prona, Proda, SG, UKM, Tanah Pertanian, Swadaya, PTSL) Tahun 2015 - 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal misalnya, prona untuk masyarakat miskin, PTSL dilaksanakan secara sistematik satu hamparan desa lengkap, dll
- (1) Sangat Tidak Setuju
- (2) Tidak Setuju
- (3) Cukup Setuju
- (4) Setuju
- (5) Sangat Setuju

## **HASIL UJI VALIDASI**

## (1) Hasil Uji Validasi Item Komunikasi Level I (Komunikasi antara atasan dan bawahan)

## Correlations

			lations			
		Item_X1.1	Item_X1.2	Item_X1.3	Item_X1.4	Skor_Total
Item_X1.1	Pearson Correlation	1	.047	.230	.178	.585
	Sig. (2-tailed)		.805	.222	.347	.001
	N	30	30	30	30	30
Item_X1.2	Pearson Correlation	.047	1	.315	.268	.693
	Sig. (2-tailed)	.805		.090	.152	.000
	N	30	30	30	30	30
Item_X1.3	Pearson Correlation	.230	.315	1	144	.695
	Sig. (2-tailed)	.222	.090		.448	.000
	N	30	30	30	30	30
Item_X1.4	Pearson Correlation	.178	.268	144	1	.396
	Sig. (2-tailed)	.347	.152	.448		.030
	N	30	30	30	30	30
Skor_Total	Pearson Correlation	.585	.693	.695	.396	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.030	
	N	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## (2) Hasil Uji Validasi Item Komunikasi Level II (Komunikasi antara Kantor Pertanahan Kab. Bantul dengan Kelompok Sasaran)

		Item_X2.1	Item_X2.2	Item_X2.3	Item_X2.4	Skor_Total
Item_X2.1	Pearson Correlation	1	.375	.332	.088	.617
	Sig. (2-tailed)		.041	.073	.643	.000
	N	30	30	30	30	30
Item_X2.2	Pearson Correlation	.375	1	.293	.292	.694
	Sig. (2-tailed)	.041		.116	.118	.000
	N	30	30	30	30	30
Item_X2.3	Pearson Correlation	.332	.293	1	.153	.705**
	Sig. (2-tailed)	.073	.116		.421	.000
	N	30	30	30	30	30

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Item_X2.4	Pearson Correlation	.088	.292	.153	1	.613**
	Sig. (2-tailed)	.643	.118	.421		.000
	N	30	30	30	30	30
Skor_Total	Pearson Correlation	.617	.694	.705	.613	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

# (3) Hasil Uji Validasi Item Komunikasi Level III (Komunikasi antara Kantor Pertanahan Kab. Bantul dengan Instansi terkait)

#### Correlations

		Item_X3.1	Item_X3.2	Item_X3.3	Item_X3.4	Skor_Total
Item_X3.1	Pearson Correlation	1	.499	.100	.165	.780
	Sig. (2-tailed)		.005	.600	.382	.000
	N	30	30	30	30	30
Item_X3.2	Pearson Correlation	.499	1	.190	.331	.825
	Sig. (2-tailed)	.005		.316	.074	.000
	N	30	30	30	30	30
Item_X3.3	Pearson Correlation	.100	.190	1	203	.408
	Sig. (2-tailed)	.600	.316		.282	.025
	N	30	30	30	30	30
Item_X3.4	Pearson Correlation	.165	.331	203	1	.450
	Sig. (2-tailed)	.382	.074	.282		.013
	N	30	30	30	30	30
Skor_Total	Pearson Correlation	.780	.825	.408	.450	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.025	.013	
	N	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## (4) Hasil Uji Validasi Item Sumber Daya

					Clation					
		Item_Z 1	Item_Z 2	Item_Z 3	Item_Z 4	Item_Z 5	Item_Z 6	Item_Z 7	Item_Z 8	Skor_Tot al
Item_Z1	Pearson Correlatio n	1	.112	.513 <sup>**</sup>	.073	.350	.355	.158	.194	.510 <sup>**</sup>
	Sig. (2- tailed)		.554	.004	.703	.058	.054	.403	.304	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Item_Z2	Pearson Correlatio n	.112	1	.555**	.434 <sup>*</sup>	.292	.203	.221	.062	.519 <sup>**</sup>
	Sig. (2- tailed)	.554		.001	.017	.118	.282	.240	.744	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Z3	Pearson Correlatio n	.513 <sup>**</sup>	.555**	1	.354	.493**	.484**	.297	.053	.674 <sup>**</sup>
	Sig. (2- tailed)	.004	.001		.055	.006	.007	.110	.783	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Z4	Pearson Correlatio n	.073	.434 <sup>*</sup>	.354	1	.362 <sup>*</sup>	.196	.364 <sup>*</sup>	.134	.503**
	Sig. (2- tailed)	.703	.017	.055		.049	.300	.048	.481	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Z5	Pearson Correlatio n	.350	.292	.493 <sup>**</sup>	.362 <sup>*</sup>	1	.272	.310	.135	.568**
	Sig. (2- tailed)	.058	.118	.006	.049		.147	.095	.478	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Z6	Pearson Correlatio n	.355	.203	.484**	.196	.272	1	.627**	.425 <sup>*</sup>	.759 <sup>**</sup>
	Sig. (2- tailed)	.054	.282	.007	.300	.147		.000	.019	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Z7	Pearson Correlatio n	.158	.221	.297	.364 <sup>*</sup>	.310	.627**	1	.698**	.802**
	Sig. (2- tailed)	.403	.240	.110	.048	.095	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Z8	Pearson Correlatio n	.194	.062	.053	.134	.135	.425 <sup>*</sup>	.698 <sup>**</sup>	1	.641 <sup>**</sup>
	Sig. (2- tailed)	.304	.744	.783	.481	.478	.019	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor_Tot al	Pearson Correlatio n	.510 <sup>**</sup>	.519 <sup>**</sup>	.674 <sup>**</sup>	.503 <sup>**</sup>	.568**	.759 <sup>**</sup>	.802 <sup>**</sup>	.641 <sup>**</sup>	1
	Sig. (2- tailed)	.004	.003	.000	.005	.001	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 $<sup>^{\</sup>star}.$  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## (5) Hasil Uji Validasi Item Implementasi Renstra

	Correlations										
		Item_ Y1	Item_ Y2	Item_ Y3	Item_ Y4	Item_ Y5	Item_ Y6	Item_ Y7	Item_ Y8	Item_ Y9	Skor_To tal
Item_Y1	Pearson Correlati on	1	.703**	.212	.244	.298	.091	.462 <sup>*</sup>	.353	.339	.744**
	Sig. (2-tailed)		.000	.260	.194	.109	.631	.010	.056	.067	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Y2	Pearson Correlati on	.703**	1	.258	.215	.532 <sup>**</sup>	.098	.327	.222	.243	.733**
	Sig. (2- tailed)	.000		.168	.255	.002	.605	.077	.238	.195	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Y3	Pearson Correlati on	.212	.258	1	.094	.165	.344	.335	.285	.306	.624**
	Sig. (2- tailed)	.260	.168		.621	.384	.062	.071	.126	.101	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Y4	Pearson Correlati on	.244	.215	.094	1	.260	167	.108	.193	.328	.406 <sup>*</sup>
	Sig. (2- tailed)	.194	.255	.621		.166	.377	.569	.308	.076	.026
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Y5	Pearson Correlati on	.298	.532 <sup>**</sup>	.165	.260	1	.146	.246	086	.120	.537**
	Sig. (2- tailed)	.109	.002	.384	.166		.441	.190	.653	.526	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Y6	Pearson Correlati on	.091	.098	.344	167	.146	1	.000	066	069	.281
	Sig. (2- tailed)	.631	.605	.062	.377	.441		1.000	.729	.718	.133
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Y7	Pearson Correlati on	.462 <sup>*</sup>	.327	.335	.108	.246	.000	1	.232	.272	.600**
	Sig. (2- tailed)	.010	.077	.071	.569	.190	1.000		.218	.146	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Y8	Pearson Correlati on	.353	.222	.285	.193	086	066	.232	1	.154	.455 <sup>*</sup>

	Sig. (2- tailed)	.056	.238	.126	.308	.653	.729	.218		.416	.012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Item_Y9	Pearson Correlati on	.339	.243	.306	.328	.120	069	.272	.154	1	.547**
	Sig. (2-tailed)	.067	.195	.101	.076	.526	.718	.146	.416		.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor_To tal	Pearson Correlati on	.744**	.733 <sup>**</sup>	.624 <sup>**</sup>	.406 <sup>*</sup>	.537**	.281	.600 <sup>**</sup>	.455 <sup>*</sup>	.547**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.026	.002	.133	.000	.012	.002	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## **HASIL UJI RELIABILITY**

## (1)Hasil Uji reliability Item Komunikasi Level I (Komunikasi antara atasan dan bawahan)

#### Correlations

	Skor_Total_X1_I	Skor_Total_X1_II
Skor_Total_X1_I Pearson Correlation	1	.381
Sig. (2-tailed)		.038
N	30	30
Skor_Total_X1_II Pearson Correlation	.381 <sup>*</sup>	1
Sig. (2-tailed)	.038	
N	30	30

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

# (2) Hasil Uji Reliability Item Komunikasi Level II (Komunikasi antara Kantor Pertanahan Kab. Bantul dengan Kelompok Sasaran)

#### Correlations

	Skor_Total_X2_I	Skor_Total_X2_II
Skor_Total_X2_I Pearson Correlation	1	.449
Sig. (2-tailed)		.013
N	30	30
Skor_Total_X2_II Pearson Correlation	.449	1
Sig. (2-tailed)	.013	
N	30	30

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## (3) Hasil Uji Validasi Item Komunikasi Level III (Komunikasi antara Kantor Pertanahan

#### Kab. Bantul dengan Instansi terkait)

-	Skor_Total_X3_I	Skor_Total_X3_II
Skor_Total_X3_I Pearson Correlation	1	.462 <sup>*</sup>
Sig. (2-tailed)		.010
N	30	30
Skor_Total_X3_II Pearson Correlation	.462	1
Sig. (2-tailed)	.010	
N	30	30

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## (4) Hasil Uji Reliability Item Sumber Daya

## Correlations

	Skor_Total_Z_I	Skor_Total_Z_II
Skor_Total_Z_I Pearson Correlation	1	.416 <sup>-</sup>
Sig. (2-tailed)		.022
N	30	30
Skor_Total_Z_II Pearson Correlation	.416	1
Sig. (2-tailed)	.022	
N	30	30

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## (5) Hasil Uji Reliability Item Implementasi Renstra

	Skor_Total_Y_I	Skor_Total_Y_II
Skor_Total_Y_I Pearson Correlation	1	.459
Sig. (2-tailed)		.011
N	30	30
Skor_Total_Y_II Pearson Correlation	.459	1
Sig. (2-tailed)	.011	
N	30	30

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## HASIL UJI ASUMSI KLASIK

## (1) Hasil Uji Normalitas dengan Angka

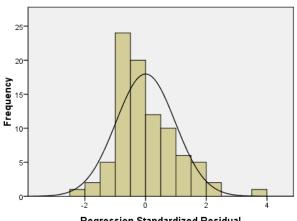
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
	88
Mean	.0000000
Std. Deviation	3.72273591
Absolute	.111
Positive	.111
Negative	080
	1.045
	.225
nal.	
	Std. Deviation Absolute Positive Negative

## (2) Hasil Uji Normalitas dengan Gambar

## Histogram

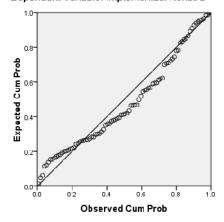
## Dependent Variable: Implementasi Renstra



Regression Standardized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Implementasi Renstra



## (3) Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients<sup>a</sup>

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinea Statistic	,
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.110	4.228		1.445	.152		
Komunikasi Level I	.552	.225	.248	2.452	.016	.918	1.089
Komunikasi Level II	.437	.202	.212	2.161	.034	.970	1.031
Komunikasi Level III	.162	.185	.088	.876	.384	.922	1.085
Sumber Daya	.223	.097	.236	2.290	.025	.883	1.133

a. Dependent Variable: Implementasi

Renstra

## (4) Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Angka

Correlations

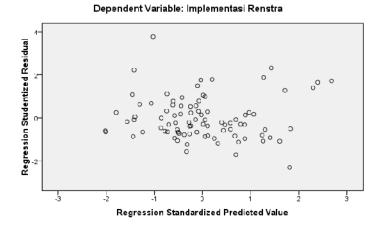
			Komunikas i Level I	Komunikas i Level II	Komunikas i Level III	Sumbe r Daya	Unstandardize d Residual
Spearman' s rho	Komunikasi Level I	Correlatio n Coefficien t	1.000	.019	138	.244 <sup>*</sup>	076
		Sig. (2- tailed)		.863	.201	.022	.479
		N	88	88	88	88	88

Komunikasi Level II	Correlatio n Coefficien t	.019	1.000	.177	.125	.028
	Sig. (2- tailed)	.863		.099	.245	.799
	N	88	88	88	88	88
Komunikasi Level III	Correlatio n Coefficien t	138	.177	1.000	.156	.068
	Sig. (2- tailed)	.201	.099		.148	.526
	N	88	88	88	88	88
Sumber Daya	Correlatio n Coefficien t	.244 <sup>*</sup>	.125	.156	1.000	030
	Sig. (2- tailed)	.022	.245	.148		.783
	N	88	88	88	88	88
Unstandardize d Residual	Correlatio n Coefficien t	076	.028	.068	030	1.000
	Sig. (2- tailed)	.479	.799	.526	.783	
	N	88	88	88	88	88

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## (5) Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Gambar





## (6) Hasil Uji Linearitas

## **ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Sumber Daya *	Between	(Combined)	881.440	38	23.196	1.333	.170
Komunikasi Level I	Groups	Linearity	110.192	1	110.192	6.335	.015
			771.248	37	20.845	1.198	.274
	Within Groups			49	17.395		
	Total		1733.790	87			

## **ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Between	(Combined)	842.079	39	21.592	1.162	.308
Komunikasi Level II	Groups	Linearity	17.432	1	17.432	.938	.338
		Deviation from Linearity	824.646	38	21.701	1.168	.303
	Within Groups		891.711	48	18.577		
	Total		1733.790	87			

## **ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Between	(Combined)	1013.262	44	23.029	1.374	.150
	Groups	Linearity	70.716	1	70.716	4.220	.046
		Deviation from Linearity	942.546	43	21.920	1.308	.191
Within Grou		ips	720.528	43	16.756		
	Total		1733.790	87			

## **ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Implementasi Renstra *	Between	(Combined)	698.565	38	18.383	1.058	.422
Komunikasi Level I	Groups	Linearity	142.607	1	142.607	8.210	.006
	Deviation from Linearity	555.958	37	15.026	.865	.674	
Within Groups		ps	851.174	49	17.371		
	Total		1549.740	87			

## **ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Implementasi Renstra *	Between	(Combined)	734.856	39	18.842	1.110	.363
Komunikasi Level II	Groups	Linearity	99.958	1	99.958	5.888	.019
		Deviation from Linearity	634.898	38	16.708	.984	.516
	ps	814.884	48	16.977			
	Total		1549.740	87			

## **ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Implementasi Renstra * Between	(Combined)	788.483	44	17.920	1.012	.485	
Komunikasi Level III	Groups	Linearity	34.763	1	34.763	1.964	.168
		Deviation from Linearity	753.720	43	17.528	.990	.513
	Within Grou	ıps	761.256	43	17.704		
	Total		1549.740	87			

## **ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Implementasi Renstra *	Between	(Combined)	1442.872	82	17.596	.823	.690
Sumber Daya	Groups	Linearity	176.577	1	176.577	8.261	.035
			1266.294	81	15.633	.731	.755
	Within Groups		106.868	5	21.374		
	Total		1549.740	87			

## **HASIL REGRESI LINIER**

## (1) Hasil Regresi Linier terhadap Sumber Daya sebelum Trimming

## **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.342 <sup>a</sup>	.117	.086	4.26896

a. Predictors: (Constant), Komunikasi Level III, Komunikasi Level I, Komunikasi Level II

## **ANOVA**<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	202.969	3	67.656	3.712	.015 <sup>a</sup>
Residual	1530.821	84	18.224		
Total	1733.790	87			

a. Predictors: (Constant), Komunikasi Level III, Komunikasi Level I, Komunikasi Level II

#### Coefficients<sup>a</sup>

	Unstandardiz	zed Coefficients	Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	8.077	4.653		1.736	.086
Komunikasi Level I	.632	.242	.268	2.608	.011
Komunikasi Level II	.135	.226	.062	.599	.551
Komunikasi Level III	.416	.203	.214	2.051	.043

a. Dependent Variable: Sumber Daya

## (2) Hasil Regeresi Linier terhadap Sumber Daya setelah Trimming

## **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.337 <sup>a</sup>	.113	.092	4.25282

a. Predictors: (Constant), Komunikasi Level III, Komunikasi Level I

## $\textbf{ANOVA}^{\text{b}}$

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	196.438	2	98.219	5.431	.006 <sup>a</sup>
Residual	1537.352	85	18.086		
Total	1733.790	87			

b. Dependent Variable: Sumber Daya

#### **ANOVA**<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	196.438	2	98.219	5.431	.006 <sup>a</sup>
Residual	1537.352	85	18.086		
Total	1733.790	87			

- a. Predictors: (Constant), Komunikasi Level III, Komunikasi Level I
- b. Dependent Variable: Sumber Daya

#### Coefficients<sup>a</sup>

	Unstandardiz	Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients			
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	9.318	4.150		2.245	.027
Komunikasi Level I	.636	.241	.270	2.637	.010
Komunikasi Level III	.435	.199	.224	2.184	.032

a. Dependent Variable: Sumber Daya

## (3) Hasil Regresi Linier terhadap Implementasi Renstra sebelum Trimming

## **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.471 <sup>a</sup>	.222	.184	3.81138

a. Predictors: (Constant), Sumber Daya, Komunikasi Level II, Komunikasi Level II, Komunikasi Level I

## **ANOVA**<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	344.027	4	86.007	5.921	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1205.712	83	14.527		
	Total	1549.740	87			

- a. Predictors: (Constant), Sumber Daya, Komunikasi Level II, Komunikasi Level III, Komunikasi Level I
- b. Dependent Variable: Implementasi Renstra

#### Coefficients<sup>a</sup>

	Unstandardi	zed Coefficients	Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	6.110	4.228		1.445	.152
Komunikasi Level I	.552	.225	.248	2.452	.016
Komunikasi Level II	.437	.202	.212	2.161	.034
Komunikasi Level III	.162	.185	.088	.876	.384
Sumber Daya	.223	.097	.236	2.290	.025

a. Dependent Variable: Implementasi Renstra

## (4) Hasil Regresi Linier terhadap Implementasi Renstra setelah Trimming

## **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.463 <sup>a</sup>	.215	.187	3.80610

a. Predictors: (Constant), Sumber Daya, Komunikasi Level II, Komunikasi Level I

## $ANOVA^b$

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	332.880	3	110.960	7.660	.000 <sup>a</sup>
Residual	1216.860	84	14.486		
Total	1549.740	87			

a. Predictors: (Constant), Sumber Daya, Komunikasi Level II, Komunikasi Level I

b. Dependent Variable: Implementasi Renstra

## Coefficients<sup>a</sup>

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	7.859	3.722		2.111	.038
Komunikasi Level I	.524	.223	.235	2.357	.021
Komunikasi Level II	.463	.200	.225	2.313	.023
Sumber Daya	.242	.095	.256	2.546	.013

a. Dependent Variable: Implementasi Renstra

# LAMPIRAN 8 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

Realisasi Kegiatan Sertipikasi Tanah PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2010-2017

Transfer Telegraphical Durient Tunun 2010 2017						
No.	Tahun	Target (Bid)	Realisasi (Bid)	%		
1.	2010	3.450	3.450	100		
2.	2011	1.500	1.500	100		
3.	2012	6.600	6.600	100		
4.	2013	2.350	2.350	100		
5.	2014	2.539	2.539	100		
6.	2015	2.500	2.500	100		
7	2016	5300	5300	100		
8	2017 (PTSL)	25.900	3350	s/d Juli		

## Realisasi Kegiatan Sertipikasi Tanah Lintas Sektor UKM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2010-2016

No.	Tahun	Target (Bid)	Realisasi (Bid)	%
1.	2010	100	100	100
2.	2011	100	100	100
3.	2012	100	100	100
4.	2013	100	100	100
5.	2014	100	100	100
6.	2015	100	100	100
7	2016	200	200	100

Realisasi Kegiatan Sertipikasi Tanah Lintas Sektor Pertanian Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2010-2016

No.	Tahun	Target (Bid)	Realisasi (Bid)	%
1.	2010	300	300	100
2.	2011	150	150	100
3.	2012	150	150	100
4.	2013	350	350	100
5.	2014	161	161	100
6.	2015	400	400	100
7	2016	300	300	100

## Realisasi Kegiatan Sertipikasi Tanah Lintas Sektor MBR Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2010-2016

No.	Tahun	Target (Bid)	Realisasi (Bid)	%
1.	2010	-	-	-
2.	2011	-	-	-
3.	2012	100	100	100
4.	2013	-	-	-
5.	2014	-	-	-
6.	2015	-	-	-
7	2016	-	-	-

Realisasi Kegiatan Sertipikasi Tanah Lintas Sektor Nelayan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2010-2016

No.	Tahun	Target (Bid)	Realisasi (Bid)	%	
1.	2010	-	-	-	
2.	2011	-	-	-	
3.	2012	100	100	100	
4.	2013	-	-	-	
5.	2014	-	-	-	
6.	2015	-	-	-	
7	2016	-	-	-	

Realisasi Kegiatan Sertipikasi Redistribusi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2010-2016

No.	Tahun	Target (Bid)	Realisasi (Bid)	%
1.	2010	-	-	-
2.	2011	-	-	-
3.	2012	-	-	-
4.	2013	135	135	100
5.	2014	-		-
6.	2015	-	-	-
7	2016	90	90	100

# Peningkatan Pelayanan Masyarakat : Pelayanan "One Day service"

No.	Jenis Layanan		2015		2016			
	·	Masuk	Selesai	Sisa	Masuk	Selesai	Sisa	
1.	Pengecekan sertipikat							
2.	Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)	521	521	0	481	481	0	
3.	Perubahan Hak Atas Tanah	25	25	0	27	27	0	
4.	Peralihan Hak	777	777	0	1.103	1.103	0	

## Pelayanan "Quick Wins "

	Jenis Layanan		20:	15		2016				
No.		Masuk	Sesuai	Tidak Sesuai	%	Masuk	Sesuai	Tidak Sesuai	%	
1.	Pengecekan sertipikat	16.814	16.654	160	99,05	19.176	19.163	13	99,93	
2.	Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)	4.878	4.581	297	93,91	3.526	3.413	113	96,80	
3.	Perubahan Hak Atas Tanah	523	429	94	82,03	246	240	6	97,56	
4.	Peralihan Hak	8.371	8.062	309	96,31	7.207	6.981	226	96,86	

## Pelayanan "LARASITA"

NT-	Jenis			2015		2016				
No.	Layanan	Masuk	Selesai	Tidak Selesai	%	Ket	Masuk	Selesai	Sisa	%
1.	Pendaftaran Pertama kali	71	7	64	10	Proses di Pengukuran	45	11	34	24,44
2.	Perubahan Hak Atas Tanah	30	30	0	100		11	11	0	100

## PROGRAM LAYANAN 70-70"

<b>.</b>				2016					
No.	Jenis Layanan	Masuk	Selesai	Tidak Selesai	%	Ket	Masuk	Selesai	Tidak Selesai
1.	Pengecekan Sertipikat	12	12	0	100		3	3	0
2.	Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)	97	97	0	100		442	442	0
3.	Perubahan Hak Atas Tanah	36	36	0	100		57	57	0
4.	Peralihan Hak karena Jual Beli	68	68	0	100		345	345	0
5.	Hak Tanggungan	-	-	-	-		1	1	0
6.	Pemisahan/Pemecahan	4	4	0	100		-	-	-
7.	Pendaftaran Pertamakali	11	9	2	81,82	Proses Pengumuman	7	7	0

## PENYELESAIAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA

No.	Jenis Layanan	Sisa Tahun 2015	Masuk	Selesai	Tidak Selesai	%	Ket
1.	Perkara	24	8	8	24	33,33	Perkara yang belum selesai karena menunggu/masih ada upaya hukum
2	Pengaduan	1	24	24	1	96	Proses
3	Sengketa	1	9	9	1	90	Proses
4	Mediasi		14	13	1	92,86	1 dalam proses

## LEGALISASI ASET DENGAN SUMBER DANA APBD I DAN APBD II

No	Jenis Kegiatan	Sumber Biaya		2015					2016				
			Tar	get	Real	isasi	S	Sisa	Ket	Target	Realisasi	Sisa	Ket
1	Sertipikasi Tanah SG	Danais	168	Bid	168	Bid	0	Bid		300 Bid			Dalam Proses
2	Sertipikasi Tanah Pertanian	Danais	100	Bid	100	Bid	0	Bid					
3	Pengukuran Tanah SG	Danais	974	Bid	967	Bid	7	Bid	Tdk bisa diproses	300 Bid			Hasil Ukur
4	Sertipikasi Tanah Pertanian	APBD II (Dinas Pertanian Kab. Bantul)	250	Bid	250	Bid	0	Bid		350 Bid	350 Bid	0 Bid	
5	Sertipikasi PRODA	APBD II (Tapem Kab. Bantul)	500	Bid	493	Bid	7	Bid	Dalam Proses	325 Bid	310 Bid	13 Bid	2 Batal
6	Pengadaan Tanah Pemerintah	APBD II (Tapem Kab. Bantul)	155	Bid	155	Bid	0	Bid					